



**SURPLUS KEUNTUNGAN KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA
TAHUN 1878 – 1941**

TESIS

Oleh

**Aryni Ayu W
NIM 170220303003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN IPS
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2019



SURPLUS KEUNTUNGAN KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA

TAHUN 1878 – 1941

Tesis ini ditujukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata II

TESIS

Oleh

**Aryni Ayu W
NIM 170220303003**

**PROGRAM STUDI MAGISTER PENDIDIKAN IPS
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS JEMBER**

2019

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda Agus Hery S dan Ibunda Sri Herlina U
2. guru – guruku dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi
3. Almamater Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi Magister Pendidikan IPS Universitas Jember

HALAMAN MOTTO

Anda tidak akan pernah melakukan apa pun di dunia tanpa keberanian. Ini adalah kualitas pikiran terbaik setelah kehormatan.*)



*) Aristoteles. 1992. *Rhetoric, Poetics and Logic*. USA : Frederick Davidson, Inc.

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aryni Ayu Widiyawati

NIM : 170220303003

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Surplus Keuntungan Kolonial Belanda di Indonesia tahun 1878 – 1941” adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Juli 2019

Yang menyatakan,

Aryni Ayu W

NIM. 170220303003

TESIS

**SURPLUS KEUNTUNGAN KOLONIAL BELANDA
DI INDONESIA TAHUN 1878 – 1941**

Oleh

Aryni Ayu Widiyawati

NIM. 170220303003

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Sumardi, M.Hum

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Mohamad Na'im, M.Pd

PENGESAHAN

Tesis berjudul “Surplus Keuntungan Kolonial Belanda di Indonesia Tahun 1878 – 1941” karya Aryni Ayu Widiyawati telah diuji dan disahkan pada :

hari, tanggal : Jumat, 26 Mei 2019

tempat : Ruang Sidang Gedung 1, FKIP Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Sekretaris

Dr. Sumardi, M. Hum

NIP. 19600518 198902 1 001

Dr. Muhamad Na'im, M.Pd

NIP. 19660328 200012 1 001

Anggota I

Anggota II

Anggota III

Dr. Nurul Umamah, M.Pd

NIP. 19690204 199303 2 008

Dr. Sri Kantun, M.Ed

NIP. 19581007 198602 2 001

Dr. Sukidin, M.Pd

NIP. 19660323 199301 1 001

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Prof. Drs. Dafik, M.Sc, Ph.D

NIP. 19680802 199303 1 004

RINGKASAN

Surplus Keuntungan Kolonial Belanda di Indonesia Tahun 1878 – 1941. Aryni Ayu Widiyawati, 170220303003; 2019 : 105 halaman; Jurusan Magister Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember.

Kondisi yang mendukung terbentuknya surplus keuntungan kolonial diantaranya adalah (1) status Belanda sebagai jajahan kekuasaan Prancis dan Spanyol sampai tahun 1848, serta tuntutan dari para pejabat politik yang menginginkan keuntungan lebih banyak untuk membangun negara Belanda. (2) Kondisi tertentu yang akan disampaikan dalam penelitian ini terkait pembuktian arsip yang menunjukkan keberadaan surplus keuntungan kolonial dipengaruhi oleh perubahan politik konservatif ke liberalisme. Adanya pergolakan politik di tahun 1848 menandai lepasnya Belanda dari jajahan Perancis. *Code of Law* yang diterapkan Bonaparte untuk memonopoli perdagangan di Eropa diperbaharui menjadi *Code of France* yang mengarah pada liberalisasi. Sehingga perdagangan di Hindia – Belanda ikut terpengaruh. Terjadi perbedaan antara keuntungan yang didapat Belanda di peralihan masa merkantilisme ke liberalisme. Dinamika keuntungan dipengaruhi faktor diantaranya : perubahan politik negara induk, perubahan konsep kepemilikan tanah, adanya surat – surat ijin mendirikan bangunan yang dimulai tahun 1870, dan tingginya jumlah privatisasi perusahaan. Hal ini menjadikan Belanda “The Greatest Trade of Europe”, negara dengan jumlah perdagangan tertinggi di Eropa.

Surplus keuntungan tidak terlepas dari colonial drain. Permasalahan *colonial drain* yang muncul sepanjang diterapkannya politik ekonomi liberal di tahun 1870 adalah meningkatnya surplus keuntungan dari ekspor bahan baku Hindia – Belanda ke Eropa. Anne Booth dalam “Output Growth and Structural Change : 1820 – 1990” (1989 : 15) mencatat tingginya pendapatan perusahaan – perusahaan privat asing di tahun 1870 dan 1885, sedangkan Hindia Belanda berada dalam posisi stagnan sampai tahun 1895. Penelitian ini berfokus pada keuntungan Belanda terutama dari hasil pengolahan perusahaan – perusahaan gula di sepanjang tahun 1870 – 1941. Fakta

bahwa hampir 450 milyar gulden dinyatakan hutang oleh Belanda turut menjadi kajian dari penghitungan surplus keuntungan kolonial.

Kolonial dan Keuntungan adalah dua hal terkait yang memberikan pandangan bahwa penjajah Belanda dan Eropa melakukan eksploitasi terhadap *East Indies* untuk memenuhi kebutuhan pasar Eropa. Historiografi Belanda yang menulis tentang keuntungan / surplus diantaranya : Van der Eeng (2012) “Indonesia growth experince in 20th century”, Wolers (2006) “Managing Multiple Currencies Netherlands Indies 1600 – 1800”, Alex Gordon (2010) “How Real Surplus Dutch Colonial”, Ulbe Bosma “The Economic history of Dutch Colonial Empire”, dan “The Development of Indonesia Society” Queensland University, menginterpretasikan keuntungan Belanda sebatas pada skala penjajahan klasik sampai tahun 1800, yang dilanjutkan karena perubahan politik Merkantilisme menuju Liberalisme tahun 1870, menempatkan Indonesia sebagai pemenuh *batig slot*.

Untuk menganalisis awal dari terbentuknya surplus keuntungan di Hindia – Belanda terutama dalam historis Jawa, terdapat dua tahapan : (1) keuntungan dalam konsep dan historikal, dan (2) keuntungan dan pergantian rezim. Analisis awal menggunakan pendekatan sejarah institusional dengan membandingkan hasil analisis arsip terbitan KITLV Belanda dan Universitas Leiden dan penelitian terdahulu. Dengan *menghitung weighted cost of capital (WACC)* sebelum tahun 1878 hingga 1941. Hasil penghitungan dianalisis kausalitas sejarahnya dengan teori David Richardo untuk memperkuat data bahwa surplus keuntungan kolonial didapat dari perusahaan publik dan privat, dan diluar prediksi, “private profits” menjadi komoditi terbesar. Total persentase keuntungan menunjukkan bahwa Surplus Kolonial Belanda memperoleh laba sejumlah f 45,5 triliyun gulden untuk periode 1878–1942.

SUMMARY

Dutch Colonial Profit Surplus in Indonesia 1878 – 1941 . Aryni Ayu Widiyawati, 170220303003; 2019: 105 pages; Master of Social Sciences Department of Teacher Training and Education at the University of Jember.

Conditions that support the formation of a surplus of colonial profits include (1) the status of the Dutch as colonies of French and Spanish rule until 1848, as well as demands from political officials who wanted more profits to build the Dutch state. (2) Certain conditions that will be conveyed in this study are related to proof of records that show the existence of surplus colonial advantages influenced by conservative political changes to liberalism. The existence of political upheaval in 1848 marked the release of the Netherlands from the French colony. The Code of Law Bonaparte applied to monopolize trade in Europe was renewed to become the Code of France which led to liberalization. So that trade in the Indies was also affected. There is a difference between the benefits gained by the Dutch in the transition of mercantilism to liberalism. The dynamics of profits are influenced by factors such as changes in the political state of the parent country, changes in the concept of land ownership, the existence of letters of building permits that began in 1870, and the high number of privatization companies. This makes the Netherlands "The Greatest Trade of Europe", a country with the highest number of trades in Europe.

Profit surplus cannot be separated from the colonial drain. The problem of colonial drain that emerged during the implementation of liberal economic politics in 1870 was the increasing surplus of profits from exports of Indies - Dutch raw materials to Europe. Anne Booth in "Output Growth and Structural Change: 1820 - 1990" (1989: 15) noted the high income of foreign private companies in 1870 and 1885, while the Dutch East Indies was in a stagnant position until 1895. This study focused on Dutch profits especially from the processing of sugar companies

throughout 1870-1941. The fact that nearly 450 billion guilders were declared indebted by the Dutch was also a study of the calculation of surplus colonial profits.

Colonial and Profit are two related things that give the view that the Dutch and European colonizers exploited the East Indies to meet the needs of the European market. Dutch historiography writing about profit / surplus includes: Van der Eeng (2012) "Indonesia growth experience in 20th century", Wolers (2006) "Managing Multiple Currencies Netherlands Indies 1600 - 1800", Alex Gordon (2010) "How Real Surplus Dutch Colonial ", Ulbe Bosma " The Economic History of Dutch Colonial Empire ", and " The Development of Indonesia Society "Queensland University, interpreting Dutch profits as limited to the scale of classical colonialism until 1800, which continued because of Mercantilism's political change towards Liberalism in 1870, placing Indonesia as a fulfillment of slot capacity.

To analyze the beginning of the formation of surplus profits in the Dutch East Indies, especially in Javanese history, there are two stages: (1) historical and conceptual benefits, and (2) regime benefits and changes. The initial analysis used an institutional history approach by comparing the results of the analysis of archives published by KITLV Netherlands and Leiden University and previous research. By calculating the weighted cost of capital (WACC) from 1878 to 1941. The calculation results were analyzed by historical causality with the theory of David Richardo to strengthen the data that surplus colonial profits were obtained from public and private companies, and beyond predictions, "private profits" became the largest commodity. The total profit percentage shows that the Dutch Colonial Surplus made a profit of f 45.5 triliyun guilders for the period 1878-1942.

PRAKATA

Puji syukur kepada Tuhan YME. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Surplus Keuntungan Kolonial Belanda di Indonesia Tahun 1878 – 1941”. Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) pada Jurusan Magister Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D., selaku rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dafik, M.Sc., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember;
3. Dr. Pudjo Suharso, M. Pd., selaku Program Studi Magister Pendidikan IPS FKIP Universitas Jember;
4. Dr. Sumardi, M.Si, selaku ketua Jurusan IPS
5. Dr. Sumardi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Utama, Dr. Mohamad Na'im, M. Pd, selaku Dosen Pembimbing Anggota, yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian atas penulisan tesis ini;
6. Dr. Sukidin, M.Pd., selaku Dosen Penguji Utama, Dr. Sri Kantun, M.Ed., selaku Dosen Penguji Anggota, Dr. Nurul Umamah, M.Pd., selaku Dosen Penguji Anggota yang telah memberikan masukan terhadap penulisan tesis ini;
7. Bapak Agus Hery S, dan Ibu Sri Herlina Utami, dan Adik Adi Luhur P yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikannya tesis ini;

Penulis juga menerima segala kritik dan saran. Akhirnya penulis berharap, semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Jember, Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PEMBIMBINGAN	
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN / SUMMARY	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR ISTILAH	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2 Penegasan Judul	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
BAB 3 METODE PENELITIAN	23
BAB 4 LATAR BELAKANG TERBENTUKNYA SURPLUS	
KEUNTUNGAN KOLONIAL	30
4.1 Struktur Sosial Masyarakat Jawa Abad - 19	31
4.1.1 Sistem Feodalisme Jawa	32

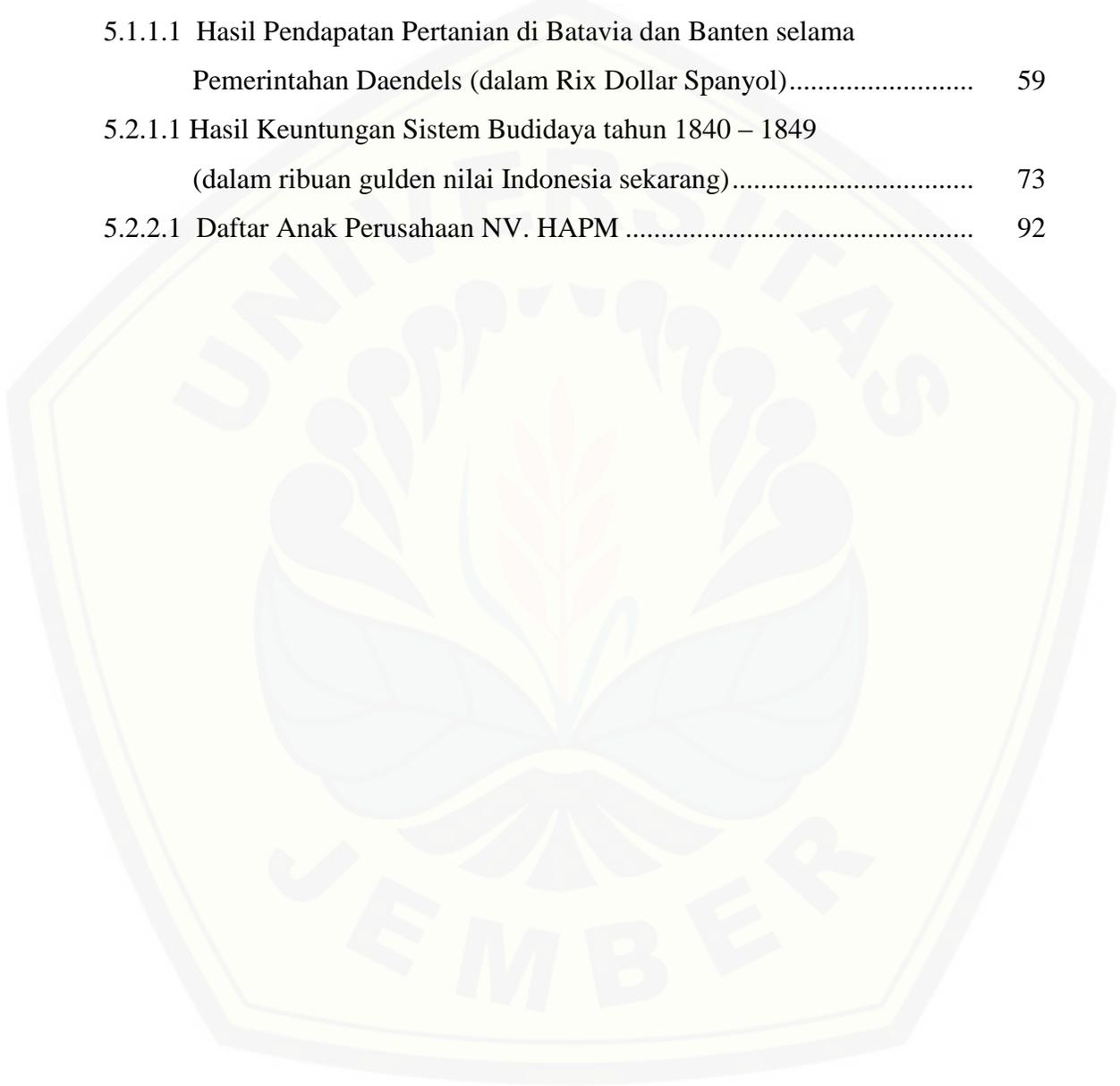
4.1.2 Kaum Priyayi	36
4.2 Transisi Kebijakan Ekonomi Pemerintah Belanda	38
4.2.1 Kebijakan Sistem Merkantilisme	40
4.2.2 Kebijakan Reformasi Ekonomi	47
BAB 5. PEMBENTUKAN SURPLUS KEUNTUNGAN KOLONIAL	
BELANDA DI INDONESIA	54
5.1 Transisi Keuntungan Sistem Kultivasi	56
5.1.1 Keuntungan Sistem Tanam Paksa	57
5.1.2 Keuntungan Sistem Kultivasi	63
5.1.3 Penerapan Sistem Ekonomi Liberal	73
5.2 Surplus Keuntungan Kolonial Masa Ekonomi Liberal	77
5.2.1 Surplus Keuntungan di Bidang Pertambangan Minyak / Petroleum	78
5.2.2 Surplus Keuntungan di Bidang Pertanian	89
BAB 6. PENGARUH SURPLUS KEUNTUNGAN KOLONIAL	
BELANDA TERHADAP KONDISI MASYARAKAT	
INDONESIA	96
6.1 Kondisi Sosial Masyarakat	97
6.2 Kondisi Ekonomi Masyarakat	100
BAB 7. PENUTUP	103
7.1 Kesimpulan	103
7.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN-LAMPIRAN	114

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran		Halaman
Lampiran A	Matriks Penelitian	114
Lampiran B	Koran Kolonial	115
	B.1 : Bataviasche Koloniaal Courant	115
	B.2 : Asian Possesion	116
Lampiran C	Foto Perusahaan – Perusahaan Belanda	117
	B.1 : Royal Dutch Shell	117
	B.2 : Standart Oil Amerika	118
	B.3 : Bataafsche Petroleum Mij.	118
	B.4 : Verenigde Nederlandsche Scheepvaart	119
	B.5 : Royal Java-China-Paketvaart Lines NV	119
	B.6 : Koninklijke Nederlandsche Stoomboot	120
Lampiran D	Pemilik Perusahaan	
	B.1 : Pemilik Perusahaan Bidang Pertanian	121
	B.2 : Helen Grace Dorreepal	122

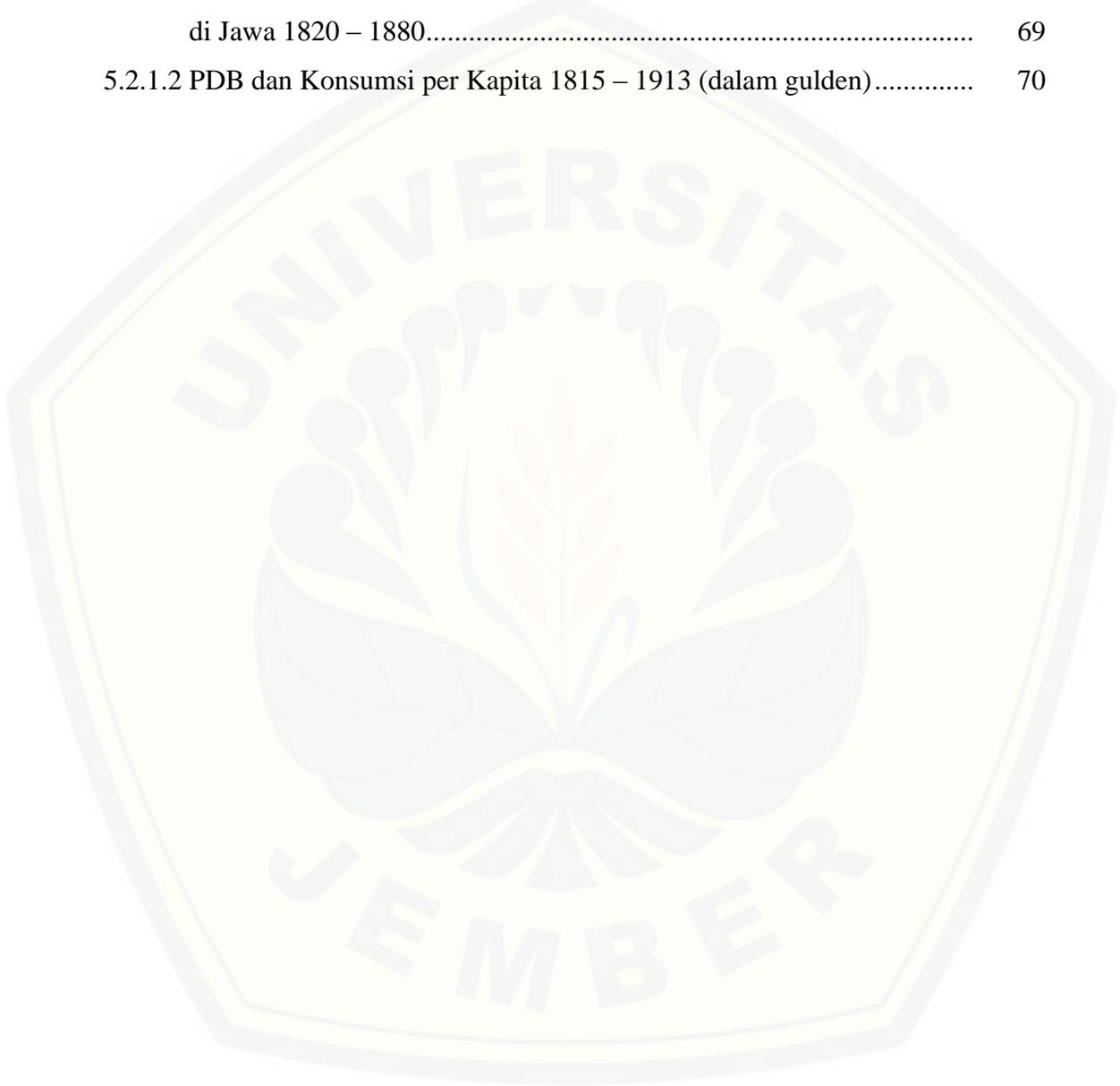
DAFTAR TABEL

2.1	Komoditi yang Dijual Pemerintah Belanda ke Eropa	21
5.1.1.1	Hasil Pendapatan Pertanian di Batavia dan Banten selama Pemerintahan Daendels (dalam Rix Dollar Spanyol).....	59
5.2.1.1	Hasil Keuntungan Sistem Budidaya tahun 1840 – 1849 (dalam ribuan gulden nilai Indonesia sekarang).....	73
5.2.2.1	Daftar Anak Perusahaan NV. HAPM	92



DAFTAR GAMBAR

5.2.1.1 Estimasi Hasil <i>Colonial Drain</i> sebagai Presentasi GDP di Jawa 1820 – 1880.....	69
5.2.1.2 PDB dan Konsumsi per Kapita 1815 – 1913 (dalam gulden).....	70



DAFTAR ISTILAH

B

Batig Slot adalah keuntungan yang berasal dari tanam paksa di Hindia-Belanda

British North Borneo Company adalah perusahaan perdagangan yang didirikan Inggris di Kalimantan Utara dengan pusat di Singapura pada pertengahan abad – 19.

C

Colonial Drain adalah penghisapan tanah jajahan untuk mengambil sumber daya alam dan memanfaatkan sumber daya manusia

Calvinis adalah sebuah sistem teologis dan pendekatan kepada kehidupan Kristen yang menekankan kedaulatan pemerintahan Allah atas segala sesuatu.

Capital Flight adalah perpindahan uang dalam jumlah besar dari suatu negara ke negara lain untuk mencari untung yang lebih besar atau untuk menghindari rugi atau kerugian akibat memburuknya ekonomi atau politik di negara asal.

Capital Stock adalah dana yang dibawa Belanda ke luar negeri, berasal dari tanah jajahan.

D

Drakonian adalah kata sifat yang berarti sangat parah, yang berasal dari Draco, seorang juru tulis hukum Athena dimana pelanggaran kecil memiliki hukuman berat.

Dualisme adalah sikap konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi. Dalam pandangan tentang hubungan antara jiwa dan raga, dualisme mengklaim bahwa fenomena mental adalah entitas non-fisik.

De-Industrialisasi adalah aktivitas melakukan pembangunan industri kembali yang digalakkan Belanda untuk melakukan penyerapan sumber daya alam.

E

East Indies adalah tanah jajahan yang dikuasai oleh Kerajaan Belanda, terletak di daerah Tenggara Asia

F

Firma Baureman & Parmentier adalah perusahaan swasta yang bekerjasama dengan Belanda, bergerak dalam bidang gula pada tahun 1877

G

Gulden adalah mata uang Belanda selama beberapa abad, sebelum digantikan oleh euro pada 1 Januari 2002.

Guilder adalah mata uang emas yang digunakan sebagai uang logam atau emas murni dalam transaksi perdagangan di abad – 19.

H

Hague adalah sebuah perusahaan Majalah di Belanda yang ebrgerak untuk meliput aktivitas penjajahan di Asia Tenggara.

K

Knowledge Based Society adalah masyarakat berbasis ilmu pengetahuan di era modernisme.

O

Opperbestuur adalah istilah untuk negara induk, Belanda.

S

Spanish Rix Dollar adalah juga dikenal sebagai dolar Spanyol, koin delapan real, atau potongan delapan (Spanyol *peso de ocho*), adalah sebuah koin perak yang berdiameter sekitar 38 mm dan bernilai delapan real, yang digunakan di Kekaisaran Spanyol setelah 1598. Belanda menggunakan SrD untuk melakukan transaksi perdagangan selama penjajahan di Indonesia.

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dutch Colonial Empire atau Kerajaan Kolonial Belanda adalah sebutan Furnivall dalam *Netherlands India: A Study of Plural Economy*, (Cambridge University, 1939 : 34) untuk Belanda yang memiliki perdagangan terkuat di Eropa. Sistem perekonomian Belanda berubah dari agraris menjadi sistem perekonomian maritim yang menguasai daerah – daerah sepanjang Asia dan Samudera Atlantik. Ulbe Bosma dalam “The Economic Historiography of the Dutch Colonial Empire” (2014 : 153) menyebut Belanda sebagai negara yang selama 350 tahun sangat aktif dalam perdagangan di belahan dunia Timur dan Barat (eastern and western hemispheres). Dari tahun 1600 dan 1870 sejarah kolonial Belanda didominasi oleh perdagangan global berupa penanaman tanaman perkebunan, dan pembentukan negara jajahan sebagai pertahanan ekonomi. Dari 1600 – 1800 Belanda mendirikan VOC di Indonesia, kemudian pembentukan sistem liberal di tahun 1800 – 1941 (Bosma, 2014 : 154).

Pembentukan surplus keuntungan kolonial diawali dengan perluasan perdagangan Belanda. Perusahaan perdagangan yang awalnya hanya didirikan di kawasan Samudera Atlantik (Afrika Barat, Amerika Utara, Brazil, Guyana, Kepulauan Karibia) kemudian diperluas sampai Asia Tenggara terutama di Indonesia. Bosma menggambarkan pembentukan *Vereegining Oost Indische Company* (VOC) dan *Dutch West India Company* (WIC) sebagai contoh dari perpanjangan usaha Belanda untuk memperkuat perekonomian di bidang maritim. Dalam perspektif penulisan sejarah Indonesia selama ini, VOC adalah perusahaan besar inti dari kekayaan kerajaan Belanda. Namun sanggahan dari Furnivall (1939 : 23), baik VOC maupun WIC hanya merupakan bagian minor dari narasi besar pembangunan ekonomi kerajaan Belanda. VOC menjadi ekonomi majemuk dari kekayaan Belanda. Penelitian mengenai surplus keuntungan kolonial diperlukan untuk menganalisis faktor pembentuk keuntungan yang tidak terlepas dari perubahan masyarakat dan total keuntungan terutama di masa perekonomian liberal.

Terlepas dari perspektif nirlando atau Indonesia – sentris, penelitian mengenai sejarah kolonial merupakan bagian integral dari dekonstruksi sejarah, keduanya sama – sama mensejajarkan fakta sejarah. Bambang Purwanto (*Historisisme Baru dan Kesadaran Dekonstruktif : Kajian Kritis Terhadap Historiografi Indonesia – sentris*, 2001 : 29 – 44) berpendapat bahwa perlunya konstruksi ulang terhadap gambaran kejadian sejarah, karena sejarah hanya terjadi sekali dan itu diluar jangkauan peneliti sejarah. Dalam historisisme modern, cara beripikir sejarah seharusnya tidak menggunakan tradisi kolonial sentris. Seperti misalnya: surplus kolonial yang diantaranya pembukaan lahan oleh Belanda terjadi karena penduduk Indonesia terutama di Jawa yang mudah disuap, atau Raffles yang menyebut penduduk Jawa sebagian besar ‘pemalas’. Menurut historisisme modern, terjadinya surplus keuntungan masa kolonial seharusnya terkait dengan perubahan kebijakan kolonial Belanda yang didukung oleh perubahan internal dalam struktur sosial masyarakat Jawa masa itu (Purwanto, 2001 : 35).

Tahun 1870 – 1942, dikenal sebagai Periode Liberal dalam sejarah ekonomi Indonesia masa kolonial. 1870 adalah penerapan sistem kapitalisme oleh Belanda, dan 1942 adalah akhir dari penjajahan Belanda di Indonesia sejak penjajahan Jepang. Menurut Burger, periode ini adalah periode ketika Hindia Belanda menerapkan asas ekonomi perdagangan bebas karena pengusaha dan modal dari berbagai bangsa dapat masuk tanpa dihalangi kebijakan-kebijakan proteksionis. Knight (1996) dan Van der Eeng (2002) menyatakan bahwa kolonialisme adalah hal yang ‘natural’ atau ‘tidak dipaksakan’ dalam historiografi kolonial. Sedangkan Gordon (2010 : 1 – 25) menentang bahwa tidak ada sesuatu hal yang ‘tidak dipaksakan’ dalam penjajahan, konsep kolonialisme itu sendiri yang menyebabkan surplus keuntungan.

Surplus keuntungan di Indonesia telah terbentuk sejak masa pra – kapitalisme sampai post – kapitalisme. Boeke (1953) menyatakan Indonesia hanya memiliki sistem pra – kapitalisme, yang masyarakatnya memiliki sistem perekonomian sebatas untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, dan sistem kapitalisme tinggi saat diterapkan perekonomian liberal. Argumentasi Boeke terkait dengan percobaan sistem

kapitalisme awal oleh Raffles, dilanjutkan Van den Bosch yang menerapkan sistem sewa tanah, namun kenyataannya memiliki kemiripan dengan sistem VOC. Berger menentang hal ini dengan mengatakan bahwa di Indonesia terdapat pra-kapitalisme, kapitalisme tinggi, serta lapisan-lapisan diantara keduanya, sehingga hubungan antara pra-kapitalisme dan kapitalisme bukanlah dualisme yang fatal. Artinya, pembentukan surplus membantu negara Belanda membangun ekonominya.

Sistem ekonomi liberal sebenarnya sudah dicita-citakan sejak awal abad XIX oleh orang-orang yang pernah memimpin Hindia Belanda seperti Deandels dan Raffles. Sikap pro Raffles terhadap ekonomi liberal memiliki alasan yang jelas. Bagi negara yang sudah industrialis seperti Inggris, sistem ekonomi liberal adalah sistem yang sempurna. Mereka bisa mendapatkan bahan baku murah dari koloninya, sekaligus bisa menjadikan koloninya sebagai pasar bagi produk industri mereka. Berbeda dengan Inggris, Belanda saat itu belum merupakan negara industri. Selain itu, kondisi perekonomian Indonesia masih lemah. Belum ada sistem kuat di negeri itu yang mampu melaksanakan tugas seberat mengorganisasi ekonomi yang bebas. Karena kondisi-kondisi ini, percobaan liberal awal abad XIX di Hindia Belanda akhirnya gagal. Sistem yang mulai tahun 1830 berlaku di Hindia Belanda adalah sistem yang justru mirip dengan sistem VOC. Sistem ini sebetulnya merupakan koalisi rapuh antara pihak-pihak yang berkepentingan mengeruk untung dari negeri ini. Elson menjelaskan koalisi ini sebagai berikut.

“Setidak-tidaknya terdapat 4 jenis pengelompokan politik yang berbeda, yang mungkin kita sebut negara kecil yang, karena masing-masing melihat keuntungan bersama susunan ini, bersama-sama membentuk koalisi *Convenience* yang sekarang kita sebut Sistem Tanam Paksa. Negara kecil yang pertama adalah banyak sekali para pemegang kekuasaan pribumi Jawa yang mempunyai kekuasaan di wilayah-wilayah terbatas secara regional. Kedua adalah perwakilan lokal negara kolonial Belanda, terutama para residen. Ketiga adalah para pengusaha swasta (baik Eropa maupun Cina) yang diperlukan Van den Bosch untuk skemanya terutama dalam industri gula. Keempat adalah negara kolonial sendiri di Batavia. Sumbangan politis Van den

Bosch yang gemilang dalam tahun-tahun segera sesudah tahun 1830 adalah membawa kekuatan ini bersama-sama untuk tujuan memeras surplus-surplus pertanian keluar dari Jawa.” (Elson, dalam J. Thomas Lindblad “Economic Aspect of The Dutch Expansion in Indonesia, 1870 – 1914, 1989 : 1 – 23).

Seperti yang tercantum diatas, kerjasama ini disatukan oleh kepentingan untuk meraup keuntungan pribadi dan golongan dari Hindia Belanda. Namun, kerja koalisi ini menekan satu kelompok yang tersisa, yang paling tidak memiliki daya tawar dalam simbiosis yang tidak seimbang ini, yakni masyarakat pribumi. Kerja koalisi tersebut ternyata berhasil menyelamatkan Belanda yang defisit di sekitar tahun 1830-an. Lebih dari itu, koalisi ini bahkan memberi untung besar. Akumulasi keuntungan selama pelaksanaan Sistem Tanam Paksa yang menurut Alec Gordon (2010 : 1 - 22) mencapai 3 milyar gulden tersebut ternyata juga berhasil menumbuhkan industri dan memperbesar jumlah kelas menengah di Belanda. Jumlah kelas menengah yang besar membuat posisi Partai Liberal yang mewakili suara mereka menguat di parlemen Belanda. Atas akumulasi beberapa faktor tersebut, Sistem Tanam Paksa secara bertahap dihapuskan dan diganti dengan sistem ekonomi bebas.

Sistem Ekonomi Liberal tahun 1870 berpedoman pada kebebasan individu. Dalam periode ekonomi baru ini tidak akan ada lagi peraturan-peraturan yang menentukan harus menanam apa, harus menjual ke mana, dan tidak boleh menjual pada siapa seperti pada masa Sistem Tanam Paksa. Menurut para pengusungnya, pengusaha-pengusaha swasta yang datang berinvestasi diharapkan akan menjadi contoh bagi masyarakat pribumi untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang dalam periode ini terbuka sama luasnya bagi siapapun.

Semangat liberal diimplementasikan pada beberapa kebijakan seperti pembukaan sewa tanah, rasionalisasi birokrasi, penerapan sistem upah bagi tenaga kerja, pengadaan berbagai infrastruktur untuk menyuburkan iklim investasi, hingga program-program pengembangan untuk masyarakat pribumi. Sistem tenaga kerjayang berbasis upah dan sistem sewa tanah, selain menjamin ketersediaan sumber daya bagi perkebunan-perkebunan, diharapkan juga bisa digunakan oleh pribumi sebagai modal

untuk dapat berkompetisi di sistem ekonomi baru yang berbasis pasar. Rasionalisasi birokrasi dilakukan untuk memperkuat negara. Sejumlah besar uang dari kas Belanda juga dialirkan masuk demi merealisasikan program-program pengembangan untuk memenuhi tuntutan pihak swasta.

Meski kebijakan-kebijakan bernada liberal sudah mulai dirintis sejak pertengahan abad XIX, banyak wilayah Jawa yang masih tidak terintegrasikan ke sistem ekonomi yang baru ini hingga menjelang 1930. Scott, meminjam penggambaran Tawney tentang Cina tahun 1931, menggambarkan bahwa keadaan ekonomi masyarakat pedesaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur waktu itu ibarat orang yang selamanya berdiri terendam dalam air sampai ke leher (James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, 1981 : 1) Dengan keadaan demikian, sekali dihantam ombak, kecilpun ombak tersebut, mereka akan tenggelam.

Boeke, berdasarkan pengamatannya sebagai pegawai jawatan kredit rakyat tahun pada 1920-1930, menyimpulkan dalam konsep ekonomi dualistisnya bahwa di Hindia Belanda terjadi dua sistem ekonomi yang berdampingan tapi tidak bisa bersatu yakni sistem setempat yang pra-kapitalis dan sistem asing yang kapitalis. Bezemer dalam *Beknopte Encyclopedie Van Nederland-Indie* yang terbit tahun 1921 menyebut bahwa sampai saat itu, perdagangan masih merupakan kegiatan ekonomi sampingan bagi mayoritas orang Jawa.

Dari realitas diatas, terdapat perbedaan antara realitas hukum / teoritis (das sollen) dan realitas empirisnya (das sein). Sistem ekonomi yang bebas tahun 1870 – 1941 dalam beberapa catatan penelitian seperti : Linbald (1989) yang mendeskripsikan bahwa Indonesia termasuk dalam promosi Belanda untuk dijadikan perekonomian maju yang akan membawa rakyat pribumi. Dalam ekonomi makro Indonesia berperan sebagai lahan eksploitasi dengan memberi 10% komisi kepada penguasa lokal. Pembukaan lahan di Kalimantan Barat tahun 1890 disebutkan Lindbald menguntungkan para investor sebesar 30% dan meningkat senilai 11 – 12 juta gulden sampai tahun 1914, di daerah Kalimantan dan Sumatera Barat. Linbald

dan Kuitenbower menilai tidak ada ‘kolonialisme’ di Indonesia sejak Belanda menandatangani perjanjian dengan Perancis setelah perang Napoleon tahun 1848. Baik Linbald dan Kuitenbower melupakan fakta bahwa imperialisme modern memposisikan Indonesia sebagai negara yang dieksploitasi untuk menghasilkan surplus. Alec Gordon mengungkap estimasi keuntungan mencapai hampir jutaan gulden sampai tahun 1941 tidak ada keuntungan yang berarti bagi kesejahteraan penduduk asli.

Lebih dari itu, fakta yang lain diantaranya disampaikan Anne Booth dalam “The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries” (1998 : 14 – 87) meski surplus keuntungan Jawa meningkat pesat bagi para pedagang besar dan investor asing, namun kesejahteraan masyarakat Jawa menurun sampai akhir tahun 1930. Selain itu setelah tahun 1930 Indonesia dinyatakan hutang sebesar 450 milyar gulden selepas Belanda menarik diri dari Indonesia. Padahal jika ditelusuri lebih dalam, data – data keuntungan yang ada berasal dari pendapatan publik dan pendapatan pribadi orang Belanda dan investor asing. Sedikitnya penelitian yang menulis mengenai surplus keuntungan kolonial Belanda, serta adanya perbedaan antara realitas empiris dan realitas teoritis tersebut membuat penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai “Surplus Keuntungan Kolonial Belanda di Indonesia Tahun 1878 – 1941”.

1.2 Penegasan Judul

Guna menghindari perbedaan antara penulis dan pembaca, maka penulis perlu memberikan batasan pengertian terkait dengan judul “Surplus Keuntungan Kolonial Belanda di Indonesia Tahun 1878 – 1941”.

Pengertian Surplus Keuntungan menurut Alec Gordon (2010) adalah pendapatan yang didapat suatu negara dari negara jajahan yang berasal dari aktivitas perdagangan berupa ekspor impor, pertukaran mata uang, yang semuanya tidak lepas dari prinsip imperialisme. Imperialisme menurut Hobson dalam bukunya “Imperialism A Study” (1980) menjelaskan bahwa (1) Imperialisme menjadi “Drain of Wealth”,

pengurusan kekayaan suatu negara jajahan, yang memiskinkan masyarakatnya, dengan mengambil keuntungan pribadi, (2) imperialisme merupakan keadaan “under-consumption”, yakni barang yang dihasilkan hanya dijual kepada kolonial. Setelah barang dijual kepada penjajah, barang akan diproses melalui *quality control* yang ketat dan di-*branding* oleh perusahaan besar di Belanda, kemudian dijual kembali menjadi barang konsumsi di tanah jajahan. Seperti yang terjadi di *East Indies* (Indonesia) dan India, berakibat pada ruginya pengusaha – penguasaha pribumi, sehingga hidupnya bergantung pada tindakan negeri penjajah. Sehingga Imperialisme menjadi sebab terjadinya pembentukan surplus keuntungan Belanda di Indonesia.

Pengertian Kolonial menurut Michael Sommer (2014) dalam tulisan “Colonies ; Colonisation – Colonialism : A Typological Reappraisal”, berasal dari kata “Koloni”, merupakan negeri, tanah jajahan yang dikuasai oleh sebuah kekuasaan asing. Koloni adalah satu kawasan diluar wilayah negara asal atau induk. Tujuan utama kolonialisme adalah kepentingan ekonomi. Kebanyakan koloni yang dijajah adalah wilayah yang kaya akan bahan mentah, keperluan untuk mendapatkan bahan mentah seperti dampak terjadinya Revolusi Industri di Inggris.

Berdasarkan pengertian diatas, maka penulis menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Surplus Keuntungan Kolonial Belanda di Indonesia Tahun 1878 – 1941” adalah surplus keuntungan yang didapat dari pelaksanaan *colonial drain* (eksploitasi) besar – besaran yang mengakibatkan pengurusan kekayaan negara yang dijajah sehingga terjadi penurunan kesejahteraan pada masyarakat Indonesia terutama selama periode pelaksanaan sistem ekonomi liberal 1870 sampai awal penjajahan Jepang tahun 1941.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penentuan ruang lingkup penelitian sangat penting ditentukan dengan maksud untuk membatasi dan memfokuskan permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Pembatasan ruang lingkup penelitian ini meliputi waktu, tempat, dan materi.

Ruang lingkup waktu (temporal) penelitian ini adalah tahun 1878 – 1941. Tahun 1878 dijadikan sebagai batas awal penelitian karena tahun 1878 merupakan pelaksanaan secara resmi Politik Ekonomi Liberal dengan Undang Undang Agraria 1870 sebagai pedoman pelaksanaan sistem ekonomi yang bebas. Keuntungan yang didapat di tahun tersebut mendapat dukungan penuh dari Partai Liberal Eropa, pengaruhnya adalah *capital flight* dari Hindia Belanda ke Eropa dapat dengan mudahnya memenuhi pasar Eropa. Ini memudahkan peneliti untuk menganalisis faktor – faktor pembentuk dan kondisi yang mempengaruhi terbentuknya surplus keuntungan kolonial. Tahun 1941 sebagai batas akhir penelitian karena peristiwa pemboman Pearl Harbour oleh Jepang di Amerika, membawa dampak yang sangat besar terhadap Eropa termasuk Belanda. Sehingga Hindia – Belanda harus diserahkan beserta modal dan buruh kepada Jepang. Surplus keuntungan mengalami stagnansi di tahun 1941.

Ruang lingkup tempat (spasial) dalam penelitian ini adalah Hindia – Belanda atau Indonesia sekarang melalui kajian pustaka. Hal ini dimaksudkan karena diawal tahun 1600 sampai 1830, Belanda memfokuskan pembangunan di wilayah Jawa sebagai pusat perdagangan dengan sistem ekonomi merkantilisme. Sedangkan tahun 1870 hingga 1939, Belanda meluaskan wilayah eksploitasi sampai ke luar Jawa (outer Java) termasuk Irian Jawa. Sehingga konteks spasial secara bertahap diteliti sampai seluruh wilayah Indonesia, karena berpengaruh terhadap pembentukan surplus keuntungan Belanda.

Konteks yang diteliti oleh penulis adalah mengenai faktor - faktor pembentukan surplus keuntungan kolonial Belanda di Indonesia, total keuntungan dalam bentuk nominal, serta dampaknya pada masyarakat Indonesia.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, surplus kolonial adalah hasil eksploitasi negara induk terhadap tanah jajahan. Colonial Drain berakibat erakibat pada meruginya pedagang pribumi dan jatuhnya harga saing, sehingga terjadi deindustrialisasi. Van der Eeng (2002) menilai penjajahan adalah sesuatu yang natural. Peneliti mencoba meluruskan hal ini bahwa hak atas pribumi dipaksakan. Surplus kolonial berasal dari hubungan koloni dengan metropolis (kekuatan kolonial) yang menghasilkan keuntungan dari pemaksaan kepemilikan hak atas tanah, (2) perusahaan privat (3) perdagangan internasional. Maka pertanyaan yang mendasari peneliti adalah sebagai berikut :

1. Faktor – faktor apakah yang menyebabkan pemerintah kolonial memperoleh “surplus”?
2. Seberapa besar keuntungan yang diperoleh Belanda selama menjajah Indonesia dalam kurun waktu 1878 – 1941 terutama dalam bidang pertambangan dan pertanian?
3. Bagaimana pengaruh pembentukan surplus keuntungan kolonial terhadap kondisi masyarakat indonesia?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang dapat dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. mendeskripsikan perkembangan sejarah di awal tahun 1878 dan faktor – faktor penyebab keuntungan Belanda terhadap Indonesia.
2. menganalisis keuntungan Belanda terhadap Indonesia dari tahun 1878 – 1942.
3. pengaruh pembentukan surplus keuntungan kolonial terhadap kondisi masyarakat indonesia.

1.6 Manfaat Penulisan

1. Bagi mahasiswa, agar dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dan memberi wawasan pengetahuan untuk memperkaya materi sejarah;
2. Bagi almamater, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam rangka pengembangan Ilmu Pengetahuan sebagai wujud nyata pelaksanaan Tri Dharma Pendidikan
3. Bagi pembaca, agar penulisan keuntungan Belanda terhadap Indonesia dari tahun 1878 – 1942 dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai sejarah kolonial.
4. Bagi peneliti lain, sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian yang sejenis dan sekaligus pengembangannya.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka ini mengemukakan tentang berbagai pendapat para ahli dan sumber primer berhubungan dengan masalah yang akan dibahas yaitu mengenai “Surplus Keuntungan Kolonial Belanda di Indonesia Tahun 1878 – 1941”, baik yang diterbitkan dalam bentuk buku, laporan penelitian, jurnal nasional dan internasional, maupun arsip.

Periode 1878 – 1941 merupakan periode yang penting dan banyak dikaji dari berbagai sudut pandang. Dalam pandangan historisisme modern, surplus keuntungan kolonial terbentuk selain karena kebijakan politik dari kolonial Belanda, faktor perubahan struktur sosial masyarakat sangat mempengaruhi perpindahan modal (capital flight) yang dihasilkan Belanda di Indonesia dan sebagian besar dibawa untuk pembangunan negara induk (Belanda). Tulisan yang mengkaji tentang surplus keuntungan kolonial Belanda dapat dilihat dari beberapa rujukan diantaranya;

Vickers (2013) dalam bukunya berjudul “A History of Modern Indonesia”, menyampaikan tentang hubungan antara koloni (tanah jajahan) dengan metropolis (kekuatan kolonial). Surplus kolonial berfungsi untuk mengukur keuntungan penjajah dari sektor bisnis, aktivitas warga negaranya, dan pemerintahan metropolis, termasuk perdagangan internasional (international trading) dan kerjasama berbagai perusahaan nasional dan internasional, dan perusahaan privat (private company) yang beroperasi di wilayah jajahan. Secara tidak terduga, keuntungan kolonial sering absen dari penulisan sejarah dalam teks pelajaran, dan publikasi akademisi. Keuntungan kebanyakan diperoleh dari perdagangan, diantaranya pajak dari pengiriman barang, biaya pensiun, dan pembelanjaan negara.

Alec Gordon (2010) dalam laporan penelitiannya yang berjudul “How Big was Indonesia’s Colonial Surplus” menganalisis tentang pertumbuhan ekonomi Belanda yang mencapai “surplus” dari awal kedatangannya untuk mendirikan sebuah perusahaan besar. Jika perusahaan *Royal Dutch Shell*, sebuah perusahaan Belanda yang bergerak di bidang pertambangan minyak, dengan 50% saham dari Inggris

sampai saat ini menjadi 10 perusahaan terkaya di dunia, maka sebenarnya sudah lama Belanda membentuk sebuah Kerajaan Kekayaan. *Royal Dutch Shell* menjadi induk dari perusahaan minyak yang bahan dan tenaga kerjanya berasal dari tanah jajahan. Tidak hanya itu, perusahaan publik seperti: *maatschapajj* (perkebunan), pertambangan, perdagangan internasional, dan perusahaan privat (milik perorangan atau swasta) juga cukup memberikan untung besar bagi kolonial. Drainase finansial yang menjadi isu kekinian karena protes keras dari bangsa eks – kolonial, pada kenyatannya mendorong Indonesia menjadi negara dunia ketiga di masa depan. Alec menjelaskan bahwa sebenarnya Belanda tidak akan ada tanpa Indonesia. Pembentukan kongsi dagang VOC dan WIC hanya menjadi narasi pembuka dari pembentukan negara kolonial. Meski diterpa krisis ekonomi di akhir abad 20 dan biaya perang untuk melawan pribumi seperti: Perang Jawa dan Aceh cukup menguras kekayaan Belanda. Namun pada faktanya, Belanda dengan cepatnya mampu membangun infrastruktur senilai triliyun gulden di negeri Belanda. Penjajahan adalah pengerukan sumberdaya manusia dan alam tanpa seijin masyarakat pribumi selama berabad – abad. Seleama berkuasa, Belanda menerapkan sistem dualisme: Merkantilisme dan Liberalisme, yang bukan saja membuat rakyat menjadi umpan bagi Belanda, lambat laun para pekerja pribumi dilemparkan kepada ‘teman – teman Eropa-nya’. Sehingga kondisi pribumi mengalami de-industrialisasi, jatuhnya perekonomian lokal. Lenin menyebut sebagai ‘immoral’ dan Gordon menyebut “The Real Surplus”. Surplus yang sesungguhnya berasal dari modal awal Belanda di tahun 1870 senilai *f* 500,000, dan profit menjadi *f* 5,25 milyar. Proses surplus dijelaskan beberapa sejarawan bahwa investasi Belanda di Indonesia menghasilkan pengembalian super normal hingga 200 persen dan inilah bagian dari imperialisme dan eksploitasi.

Van Der Eeng (2002) dalam bukunya berjudul “Indonesia Growth Experience in The 20th Century : evidence, queries, guesses”, pada bab pertama menjelaskan pentingnya penelitian tentang imperialisme dan kolonialisme untuk membantu menganalisis total surplus keuntungan selama hampir 66 tahun dari tahun 1878 –

1941. Pada bagian awal, Eeng menjabarkan beberapa bukti, sebuah ringkasan kemajuan ekonomi di Indonesia sejak tahun 1880. Terdapat penemuan bahwa ekonomi Indonesia mengalami akselerasi di tahun 1900 – 1930. Selama 30 tahun mengalami peningkatan yang sangat tinggi dibandingkan tahun – tahun sebelumnya yang pernah ada selama berlangsungnya sistem ekonomi bebas. Eeng mencatat kemajuan ekonomi berbanding terbalik dengan tingkat kelahiran penduduk. Mortalitas tertinggi jatuh di tahun 1930. Kemajuan ekonomi Indonesia berlangsung secara signifikan sampai pada tahun 1941, setelah itu mengalami penurunan selama penjajahan Jepang. Di awal tahun 1942, Belanda kembali dengan para investor asing untuk memperbaharui ekonomi, sampai di akhir tahun 1950 ekonomi berlangsung stagnan, dan berada pada kondisi negatif pada tahun 1960 – an. Pertanyaan ini dapat dijawab Eeng dengan data terbatas yang dapat diakses dalam arsip – arsip Belanda. Eeng menjelaskan, kemajuan perekonomian Indonesia didukung adanya kegiatan ekspor – impor yang berlangsung sejak tahun 1830. Perbedaannya, sebelum tahun 1870, pemerintah ikut menentukan ‘kepada siapa’ barang akan dijual. Di masa sistem ekonomi yang bebas, rakyat diperbolehkan memilih konsumennya terutama setelah sekolah – sekolah mulai didirikan di masa politik etis. Rakyat memiliki akses pendidikan sehingga memiliki keberdayaan untuk memilih pekerjaan yang lebih luas. Karena berdasarkan catatan Polak, yang menjadi rujukan Eeng, kondisi rakyat sampai akhir tahun 1900, belum menggunakan aktivitas perdagangan sebagai mata pencaharian utama. Rakyat masih memiliki kecenderungan melakukan aktivitas ekonomi untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian, perkembangan ekonomi selanjutnya menurut penelitian Eeng, tidak terlepas dari modal dan teknologi dari Belanda, karena kondisi Indonesia yang belum memiliki infrastruktur dan teknologi yang memadai untuk dilakukan perdagangan bebas. Tahun 1930, peningkatan terjadi karena adanya peningkatan di bidang agrikultur, pelayanan, dan industri (Lampiran Figure 5. Van der Eeng hal. 22). Adapun ekonomi yang mengalami penurunan selama penjajahan Jepang disebabkan karena aktivitas impor yang tetap berlangsung, yakni

barang – barang dari Eropa yang masuk cenderung banyak dikonsumsi oleh orang Jawa sebesar hampir 50 – 60%.

Ulbe Bosma (2014) berjudul “The Economic Historiography of Dutch Colonial Empire” menegaskan dari tulisan Van der Eeng bahwa keuntungan kolonial selain bernilai surplus bagi penjajah, seharusnya juga bernilai sama bagi negara jajahan (koloni). Belanda memperoleh keuntungan paling tinggi dengan percepatan ekonomi yang juga tinggi dibandingkan Eropa tahun 1500 – 1913, dan lebih baik dari seluruh wilayah Asia kecuali Jepang, dari tahun 1870 – 1930. Sedangkan orang – orang pribumi mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit, tanah jajahan hanya menjadi lahan produksi yang dikirimkan ke Belanda dan negara lain di Eropa, sehingga masyarakat jajahan lebih banyak menikmati hasil impor daripada hasil ekspor sekitar 80% - 85% sampai setelah tahun 1930.

Hobson (2009) dalam bukunya yang berjudul “Imperialism A Study”, menjelaskan bahwa penyebab terbentuknya surplus keuntungan kolonial adalah imperialisme. Imperialisme adalah studi tentang : (1) pengurasan kekayaan suatu negara jajahan, yang memiskinkan masyarakatnya, dengan mengambil keuntungan pribadi atau drain of wealth, (2) suatu keadaan yang dapat membuat masyarakat di tanah jajahan mengalami “under-consumption”, yakni barang yang dihasilkan hanya dijual kepada kolonial. Setelah barang dijual kepada penjajah, barang akan diproses melalui *quality control* yang ketat dan *di-branding* oleh perusahaan besar di Belanda, kemudian dijual kembali menjadi barang konsumsi di tanah jajahan, seperti yang terjadi di Indonesia dan India. Akibatnya adalah pengusaha pribumi mengalami kerugian dan akan bergantung pada kebijakan kolonial, (3) de – Industrialisasi, suatu keadaan dimana tanah jajahan hanya sebagai penghasil bahan mentah. Sehingga, sebagian besar “Land of Farmer”, wilayah pertanian menjadi lahan produksi untuk keuntungan penjajah. Perekonomian wilayah jajahan mengalami defisit bahkan stagnansi. Bahkan terobosan yang diberlakukan Thomas Stamford Raffles pada 1811 – 1815 dalam artikel Abdul Wahid “Dualisme Pajak di Jawa : Administrasi Pajak Tanah di Wilayah Vorstenlanden pada Masa Kolonial, 1915 – 1942”, untuk

memperkenalkan sistem sewa tanah (Landrent) kepada penduduk pribumi, untuk melepaskan sistem dualisme tanah yang merugikan petani asli. Pemerintah kolonial memberlakukan penanaman 1 / 5 tanah rakyat untuk tanaman Indigo, perkebunan, kemudian pajak hasil penjualannya sebesar 10% diserahkan pada pemerintah Inggris. Sisanya dapat diambil oleh rakyat. Bentuk akhir dari pajak tanah itu menurut Raffles, didasarkan pada prinsip kepemilikan tanah yang bersifat individual. Sayangnya, sedikitnya referensi mengenai data kesuburan tanah dan detail dari pajak tanah serta desakan dari Eropa untuk memberlakukan sistem ekonomi liberal pada 1870, membuat sistem ini tidak menemui keberlanjutan. De – Industrialisasi yang dimulai sejak 1870 ini membuat dampak yang sangat panjang pada perekonomian Indonesia terutama di tahun 1945 – 1966, dan perekonomian Indonesia mengalami penurunan di tahun 1998 – 2001.

Ditegaskan oleh Van Der Eeng (2010) dalam bukunya berjudul “Economic Benefits from Colonial Assets : The Case of The Netherlands and Indonesia 1870 – 1958”, bahwa imperialisme adalah fenomena natural yang terjadi di tanah jajahan. Sanggahan peneliti atas konsep ini adalah “natural” dapat berarti paksaan atas hak, hak untuk mencari penghidupan, hak atas kebebasan, hak atas mencintai tanah airnya sendiri. Jika dalam imperialisme dikatakan jajahan itu adalah “Natural”, maka yang terjadi, hak atas pribumi dipaksakan, sehingga mau tidak mau terjadi eksploitasi. Hingga menghasilkan berjuta – juta gulden dalam kurun waktu 1878 – 1941. Ini merupakan pendirian pemerintahan dari kekuatan asing yang mengontrol bangsa lain.

Untuk memahami sistem perdagangan yang diterapkan Belanda. Perubahan kebijakan dari konsep imperialisme klasik ke imperialisme modern. Terdapat beberapa rujukan diantaranya : (1) Adam Smith (1776) dan David Ricardo (1890).

Adam Smith (1776) dalam bukunya “Wealth of Nation” menulis tentang sistem kebebasan alamiah dengan kepentingan pribadi sebagai kekuatan pendorong ekonomi, dan itu berfungsi ketika pasar bebas tanpa campur tangan pemerintah. Pasar digerakkan oleh kekuatan yang tidak tampak (invisible hand), yang lebih dikenal dengan ideologi persaingan bebas (laissez-faire). Adam Smith memperkenalkan

keunggulan absolut, sedangkan teori keunggulan komparatif dikemukakan oleh David Ricardo (1890), di mana hukum keunggulan komparatif (the law of comparative advantage) disampaikan. Meskipun demikian, sebenarnya keunggulan komparatif pertama kali dikembangkan oleh Robert Torrens pada tahun 1815 dalam karya esainya tentang *The Corn Laws*, yang menyatakan bahwa tanaman impor ditujukan untuk melindungi harga jagung di Inggris dan Irlandia dan persaingan dengan negara-negara penghasil jagung yang lebih murah (Verdoorn, 1960). Kegiatan impor yang dilaksanakan selama tahun 1870, memanfaatkan pedagang Cina sebagai pemasok terbesar komoditi kopi dan candu, sehingga harga yang didapatkan menjadi lebih murah.

David Ricardo (1890) dalam bukunya “On Principles and Political Economy and Taxation” juga mengemukakan bahwa penjajahan yang dilakukan di tahun 1870 mendasarkan pada prinsip perdagangan bebas. Di tahun 1870, pemerintah kolonial (Belanda) memposisikan dirinya sebagai penyedia lahan untuk dieksploitasi. Selain itu, pemerintah yang menjalan sistem ekonomi liberal menerapkan konsep “Buy Low Sell High” atau beli murah dan jualah mahal. Dalam artian, keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya. Sederhana saja Belanda melakukan kegiatan eksploitasi di wilayah luar Jawa untuk mendapatkan bahan mentah yang harganya jauh lebih murah untuk memenuhi pasar Eropa. Penjualan komoditi seperti: kopi, lada, indigo, tembakau, dan lainnya, diproduksi di Indonesia dengan pabrik – pabrik di berbagai daerah di Jawa dan Sumatera bernama “maatschappij”. Perusahaan – perusahaan ini dikendalikan langsung oleh kontrolir dibawah *governor* untuk kemudian masuk dalam *quality control* di perusahaan induk bernama *Nederlandsche Handel-Maatschappij* (Perusahaan Dagang Hindia – Belanda). Penjualan di Eropa pada kenyataannya berubah dari harga 4f per kilo atau 5f per box menjadi 23 f atau sekitar 2 gram guilder, dan keuntungan Belanda sekitar 45 juta gulden pada tahun 1870 – 1930.

Ditegaskan pula oleh Jan Luiten van Zanden (2017) dalam laporan penelitiannya untuk Leiden University berjudul “Colonial State Formation and Pattern of Economic Development in Java 1800 – 1913”, bahwa pemerintah di tahun 1870 – 1941 tidak lagi bertindak sebagai produsen dan terikat dengan aturan pasar, tetapi lebih pada penyedia jasa dan memfokuskan diri pada aspek keamanan dan hukum. Zanden melalui majalah “De Bussy” (1888) menjelaskan bahwa alat perdagangan internasional yang digunakan terutama periode 1870 – 1941 adalah *Nederlandsche Handel-Maatschappij* (Perusahaan Dagang Hindia – Belanda) yang didalamnya terdapat anak cabang perusahaan seperti: *Deli Maatschappij*, *Bezoeken Maatschappij*, *Bataafsche Petroleum*, dan 50 perusahaan lainnya yang mengalami perluasan dari Jawa ke Sumatera hingga Kalimantan, menghasilkan keuntungan besar yang hanya menguntungkan kolonial sampai tahun 1941. Anak perusahaan ini dikendalikan langsung dibawah kontrolir yang menghasilkan pengaruh sosial ekonomi besar terhadap bentuk pekerja, dari semula penggarap tanah menjadi buruh industri.

Menurut Giddens (1999) dalam bukunya berjudul “Runaway Worlds : How Globalization is Reshaping Our Lives” menjabarkan tentang globalisasi di masa kini yang penuh dengan ketidakpastian. Dalam tataran historis, terjadi perubahan paradigma tatanan perdagangan internasional dari perdagangan yang menakutkan (fear trade) ke perdagangan bebas (free trade) dan semestinya perdagangan yang adil (fair trade). Namun, pranata *fair trade* gagal karena kepentingan domestik negara - negara besar. Merkantilisme yang merebakkan kolonialisme Eropa telah menciptakan paradigma perdagangan internasional karena rasa takut (fear trade). Dalam konteks sejarah, Indonesia berdagang rempah-rempah dengan Belanda karena rasa takut, konstelasi hubungan berubah dari perdagangan ke monopoli sampai akhirnya berakhir pada *colonial drain*, yang menghasilkan *batig slot*.

Penelitian sejenis mengenai surplus keuntungan kolonial selanjutnya adalah milik Korthals Altes (1987) berjudul “*Changing Economy in Indonesia*”. Altes mencatat penghitungan mengenai “Colonial Surplus” diperoleh melalui penjualan

surplus ekspor, dengan mengurangi jumlah impor dari ekspor. Sebagai contoh pada tahun 1822 – 1839, tersimpan surplus ekspor East Indies sebesar 12.285 juta gulden, dari total keuntungan seluruhnya 14. 5556 juta gulden. Ini artinya ada sekitar 400.000 gulden yang dapat dikatakan sebagai keuntungan pribadi (private surplus) dari oknum pemerintah kolonial. Termasuk keuntungan dari para pedagang Non – Belanda yang mendirikan usahanya di Indonesia. Namun sayangnya, sanggahan peneliti adalah hal ini tidak dapat dipercaya sepenuhnya karena Historiografi Belanda sendiri tidak memiliki catatan tentang keuntungan pribadi yang dilakukan oleh orang – orang non – Belanda seperti misalnya Arab dan Cina yang berdiam di Indonesia. Diluar prediksi, “private profits” menjadi komoditi terbesar dalam penghitungan surplus kolonial. Korthals Altes mencatat sekitar tahun 1910 – 1926 yang mengklaim bahwa keuntungan meningkat dari 25,7% ke 33% pada tahun 1928 – 1939, atau sekitar 2,9 milyar gulden pada 1878 – 1939. Untuk mendapatkan data yang lebih detail, dapat dilihat dari penelitian Polak *The National Income of The Netherlands Indies, 1921 – 1939 ; Changing Economy in Indonesia*, Tercatat, kekayaan kerajaan Belanda (Royal Dutch) yang didapat dari perdagangan Internasional dan pengiriman barang ke Eropa berkisar 2,9 milyar gulden pada 1878 – 1939. Altes menjelaskan keuntungan tersebut berasal dari biaya manajemen perdagangan, pelayanan, jasa, pengiriman internasional untuk dan dari Indonesia, ekspor Belanda untuk Indonesia sekitar 75% dari 2,9 Milyar gulden, dan perdagangan produk tropis, dan lain sebagainya.

N. P. Van Den Berg (1907) dalam laporan penelitian yang disimpan dalam arsip Leiden University berjudul “Munt – Crediet – En Bankwezen, Handel En Scheepvaart in Nederlandsch Statistische Bijdragen” menyatakan bahwa eksploitasi finansial yang terjadi di wilayah Asia terutama di *East Indies* (Indonesia) berawal dari eksploitasi Inggris terhadap India yang menghasilkan konsep memberikan keuntungan kepada “mother country” atau negara induk dan, termasuk penjajahan di Indonesia mengakibatkan protes keras dari masyarakat sipil Eropa. Seorang Presiden *De Javanische Bank* (1891 – 1912) mempublikasikan belasan artikel ekonomi dan

sejarah Nederlands Indies tentang eksploitasi Inggris terhadap India dan Belanda terhadap Indonesia.

Pierre Van der Eeeng (1992) dengan penelitiannya berjudul “*The Real Domestic Product of Indonesia, 1880–1987*”. Penelitian Van der Eeeng lebih berfokus pada penghitungan jumlah keuntungan kolonial. Berdasarkan *Gross National Product* (GDP) per kapitas sebagai indikator perubahan ekonomi, Indonesia mengalami kenaikan yang cepat daripada jumlah populasi saat itu di tahun 1900 – 1930. Gambaran dari perekonomian Indonesia sampai pada tahun 1970 terfokus pada agrikultur, akibat proyek kultivasi Belanda dan komersialisasi sepanjang 1900 – 1930. Perkembangan industri termasuk manufaktur, pertambangan, komoditi primer, dan bidang konstruksi, mengalami peningkatan di akhir 1930 sebagai konsekuensi dari pertumbuhan manufaktur. Ini karena kebijakan untuk mempertinggi jumlah impor menggantikan industrialisasi, berakibat pada de – Industrialisasi yang sempit karena adanya monopoli industri. Sampai pertengahan tahun 1980, Indonesia berada pada orientasi impor yang tinggi. Cara lain untuk melacak keadaan perekonomian Indonesia berdasar pada *Historical Thinking* (past – present – future) adalah proses produksi. Sumber daya paling utama negara adalah pekerja dan alat – alat produksi. Ketidakketersediaan “capital stock” di tahun 1940 cukup menjelaskan rendahnya pertumbuhan GDP Indonesia sampai tahun 1967 – 1997, GDP mengalami peningkatan sekitar 60% karena adanya ekspansi tenaga kerja dan “capital stock” sebesar 40%. Dapat diartikan, ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan produktivitas.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian terdahulu berfokus pada pembahasan sistem kebijakan yang diterapkan Belanda di Indonesia. penghitungan mengenai surplus keuntungan kolonial terutama di Indonesia masih sangat sedikit, bahkan belum memfokuskan pada tahun yang lebih spesifik dari tahun 1870 sampai 1941. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti faktor – faktor apa saja saja yang membentuk surplus keuntungan kolonial, jumlah surplus keuntungan

kolonial, dan dampak surplus keuntungan terhadap kondisi masyarakat saat itu terutama tahun 1870 – 1941.

Dari beberapa teori diatas, maka penulis menggunakan pendekatan sejarah ekonomi untuk mempelajari tentang hubungan antara kebijakan perekonomian yang diterapkan pemerintah Belanda dengan pembentukan surplus terutama di tahun 1870 – 1941. Selain itu, dinamika perubahan sosial di masyarakat saat itu juga menjadi kajian dalam penelitian ini untuk menganalisis pola sosial masyarakat menghadapi perubahan ekonomi saat itu. Menurut Purwanto (2001 : 23), kemajuan masyarakat di bidang ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kondisi internal masyarakat saat itu.

Historisisme modern adalah pandangan sejarah yang menganggap bahwa sejarah tidak hanya diperankan oleh tokoh dan kejadian besar, melainkan berubah menjadi sejarah kehidupan sehari – hari (sejarah mikro). Pendekatan sejarah ekonomi digunakan untuk menganalisis hasil surplus keuntungan kolonial terkait dengan perubahan kebijakan ekonomi dalam sejarah kolonial.

Guna mempertajam hasil analisis dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori perdagangan internasional yang dikemukakan oleh David Ricardo. Teori perdagangan internasional sebagai dasar dalam pemecahan masalah yang diteliti. Teori perdagangan internasional berdasarkan pemikiran keunggulan komparatif dan daya saing yang berbeda antara negara satu dengan yang lain. Jika negara-negara memproduksi dan berdagang dengan mengacu pada keunggulan komparatif dan persaingan, maka diyakini akan meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya yang langka sehingga tercapai tingkat kesejahteraan dunia yang lebih baik.

Penerapan teori perdagangan internasional dalam penelitian ini memperhatikan beberapa tahap diantaranya sebagai berikut :

1. Teori perdagangan internasional adalah teori yang digunakan selama 450 tahun sejak tahun 1779 untuk menganalisis sumberdaya alam setiap negara yang dispesialisasi di setiap daerah dalam negara tersebut, bertujuan untuk mengetahui potensi masing – masing wilayah.

2. Perdagangan internasional yang dicetuskan David Ricardo adalah perdagangan yang didasarkan pada penghitungan barang yang dijual oleh masing – masing negara untuk mendapatkan kestabilan harga
3. Perdagangan internasional mencakup kebijakan ekonomi pemerintah dalam ekonomi makro yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Konsep perdagangan internasional terutama yang dicetuskan oleh David Ricardo sangat penting untuk memahami komoditi yang dijual oleh masyarakat di wilayah kekuasaan Belanda. Meski dengan data – data yang terbatas, surplus keuntungan dapat dianalisis sebagian besar dengan melihat keluar masuknya barang yang diperdagangkan.

Dalam tiga tahap yang disebutkan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut : (1) pertama, pada langkah pertama ini, teori perdagangan internasional menurut David Ricardo, menggunakan analisis komoditi yang dijual dari masing – masing wilayah.

Tabel 2.1 Komoditi yang Dijual Pemerintah Belanda ke Eropa

<i>Kolonies</i> (wilayah jajahan)	<i>Goederen verkocht</i> (komoditi)
Timur Jawa	Kopi, tembakau, nila, jarak, candu
<i>Vorstenlanden</i> (Yogyakarta dan Surakarta)	Indigo, beras, jagung, peternakan, perdagangan perahu, burung, candu.
Jawa Tengah	Indigo, beras.
Sumatera	Kelapa sawit, pertambangan minyak.
Kalimantan	Permata, pertambangan emas, minyak, berlian
Sulawesi	Emas, minyak.
Irian Jaya	Emas, berlian.

Sumber : E. de Wall, vol. III dan IV, 1870

Menurut sumber E. de Wall, vol. III dan IV tahun 1870, komoditi utama yang dijual kepada pemerintah Belanda dari rakyat. Sebenarnya komoditi itu sebagian besar adalah hasil pembayaran pajak oleh masyarakat kepada pemerintah. Beberapa komoditi di atas yang sudah dipetakan berdasarkan daerah masing – masing, kemudian dijual kepada agen – agen swasta atau investor asing. Pemerintah di tahun 1870, dengan menggunakan teori perdagangan internasional, berperan sebagai agen ekonomi yang menyediakan infrastruktur dan pengamanan hukum.

Kedua, teori perdagangan internasional menggunakan sistem *quality control* untuk menyesuaikan kualitas barang dengan standar internasional. Dalam catatan Gordon (2010), Belanda menggunakan hak pelabelan (branding) dalam setiap produk yang dikeluarkannya dari beberapa wilayah di Indonesia. Komoditi tembakau dan kopi yang banyak dihasilkan \daerah timur Jawa (Java Oosthoek) misalnya, dipelihara oleh tenaga upahan pribumi. Setelah panen, komoditi diserahkan kepada kontrolir yang biasanya dikepalai oleh orang Belanda. Komoditi kemudian diberi label (branding) dan disesuaikan dengan standar internasional. Dalam perdagangan tembakau dan kopi, kompetitor Belanda adalah negara Karibia yang menjadi kekuasaan Inggris. Adanya kompetitor berdasarkan teori perdagangan internasional Ricardo, dapat menstabilkan harga komoditi yang dijual di pasar internasional.

Ketiga, kebijakan yang diterapkan Belanda di tahun 1870 dengan sistem ekonomi yang bebas menimbulkan ketidaksiapan di kalangan masyarakat kolonial. Antara sistem pra-kapitalis dengan sistem kapitalis tingkat tinggi. Perdagangan internasional dapat menganalisis dampak pembentukan surplus keuntungan kolonial Belanda terhadap masyarakat Indonesia saat itu.

BAB 3. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang “Surplus Keuntungan Kolonial Belanda di Indonesia 1878 – 1941” menggunakan interpretasi Sejarah Kritis *Annales School* yang menangani pengembangan penelitian sejarah yang tidak lagi bersifat naratif, melainkan kritis. Teori Sosial menjadi konsep dasar bagi para peneliti untuk menemukan pisau analisis kejadian sejarah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian sejarah akan tergambar dari historiografi yang dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah ekonomi dan teori perdagangan internasional untuk melakukan eksplanasi terhadap sumber-sumber sejarah.

Penulis dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dikarenakan data – data yang dipergunakan adalah sejarah mengenai surplus keuntungan kolonial Belanda di Indonesia 1878 – 1941. Metode penelitian sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau berdasarkan rekonstruksi yang imajinatif (Gottschalk, 1985 : 32). Penelitian “Surplus Keuntungan Kolonial Belanda di Indonesia 1878 – 1941” menggunakan penelitian sejarah dengan tahapan : (1) Heuristik dengan meneliti data dari sumber primer, dan sekunder, (2) Kritik sejarah, internal dan eksternal, (3) Mempresentasikan fakta yang reliabel dari analisis masalah, komposisi, eksposisi, dan interpretasi, (4) Historiografi, penulisan sejarah menggunakan pendekatan sejarah ekonomi, dan teori perdagangan internasional untuk menganalisis Imperialisme yang dilakukan Belanda di Indonesia, dan surplus keuntungan.

Langkah pertama dalam melakukan penelitian ini adalah heuristik. Dalam langkah heuristik, penulis melakukan kegiatan untuk mendapatkan sumber – sumber yang diperlukan dalam penelitian dan penulisan sejarah. Maka, kajian ini menggunakan menggunakan sumber dari kajian pustaka, artikel, buku, laporan penelitian, dan majalah yang terkait dengan surplus keuntungan kolonial Belanda di Indonesia tahun 1878 – 1941. Penelitian ini menggunakan sumber – sumber sejarah yang diperoleh dari Perpustakaan Online Leiden University, arsip yang berasal dari

Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) lembaga ilmiah Belanda yang didirikan pada tahun 1851. Tujuan utamanya ialah penelitian ilmu antropologi, ilmu bahasa, ilmu sosial, dan ilmu sejarah wilayah Asia Tenggara, Oseania dan Karibia, Perpustakaan Universitas Jember, dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, serta buku referensi, dan koleksi pribadi penulis. Sumber yang berhasil dikumpulkan berupa sumber tertulis baik berupa buku, dokumen, dan penelitian terdahulu. Sumber data yang berhasil dikumpulkan kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: (1) data “*Handboek Voor Cultuur-en Handelsondernemingen in Netherlands – Indie* (Amsterdam : De Bussy 1888 – 1940)” yang menjelaskan secara detail mengenai investasi Belanda di Indonesia tahun 1910 – 1939. Data yang dipublikasikan Amsterdam University pada 1925 sangat reliabel memberikan informasi tentang jumlah investasi Belanda dalam miliaran gulden, jumlah perusahaan privat dan publik di Indonesia sampai tahun 1925, peran investasi Inggris di perusahaan Belanda, jenis sektor keuntungan Belanda termasuk: *Trading, Mining, Agriculture, Finance*, dan lainnya. Sehingga, handbook ini dapat digunakan sebagai sumber primer karena sangat membantu menggambarkan perkembangan bisnis Belanda, menjadi jalan perkembangan sosial – ekonomi Indonesia. NCSS membantu penelitian ini untuk melihat keberlanjutan sejarah sebagai edukasi sekolah dan sektor edukasi lainnya, (2) Sumber kedua diambil dari tulisan Linbald, dipublikasikan oleh *Leiden University* pada tahun 2013. Publikasi ini merupakan bagian dari projek penelitian *Leiden University* didukung oleh *Netherlands Organization for Scientific Research* (NWO), untuk meneliti investasi langsung Indonesia dibawah kolonialisme, (3) arsip rekaman *Verenigde Delo Maatschappij* (VDM) yang disimpan arsip nasional Hague, berisi tentang investasi negara – negara Eropa : Inggris, Perancis, Belanda. Inggris dan Perancis sebagai investor pertama di Asia dan Afrika. Koloni atas Indonesia sebagai yang terbesar 70% keuntungan dari total keseluruhan. Arsip rekaman ini cukup memberitahu peneliti mengenai “private capital investment”, investasi modal pribadi

Belanda sejak dimulainya Sistem kultivasi di Jawa tahun 1870. Digolongkan sebagai sumber primer karena ini merupakan penelitian pertama yang didukung oleh NWO, dimana penelitian tentang Keuntungan Belanda di Indonesia sangat terbatas di Kurikulum Sekolah di Belanda, termasuk di Universitas Leiden. Rekaman ini menunjukkan sistem perdagangan bersifat multimodal dan metropolis, diatas masyarakat jajahan. Dapat dikatakan, ini merupakan sumber primer yang reliabel. (4) Surat – surat Belanda. Korespondensi yang dilakukan Belanda dari negara induk ke negara jajahan terangkum dalam sebuah Manuskrip berjudul “Corresponcence” yang diterbitkan oleh Pemerintah Belanda pada 1954. Surat – surat ini berisi tentang awal kedatangan Belanda di Indonesia melalui foto yang diambil Adriaen Van Der Donck, *map of New Netherland* tahun 1656. Manuskrip ini membantu peneliti untuk menjelaskan bagaimana pembangunan kapitalisme di dekade I yang diawali oleh West India Compagnie (WIC) tahun 1654. Manuskrip yang terdiri dari 12 jilid ini menjadi sumber primer sejarawan yang ingin meneliti terbentuknya multimodal di tanah jajahan. Surat yang dikirim diantaranya oleh Direktur Amsterdam kepada Direktur Jenderal dan Negara di tanah jajahan berisi tentang pengangkutan hasil pertanian, perkebunan melalui Kapal Vaerwel dari 14 September 1870 – 2 Januari 1871, dari perairan Sunda ke Belanda, yang digunakan sebagai sumber primer penelitian dengan penjelasan yang otentik. Alasan penulis menjadikan 4 arsip tersebut sebagai sumber primer dikarenakan memiliki keobjektifan dalam menguraikan fakta – fakta awal pembentukan keuntungan yang dilakukan Belanda. Fakta – fakta tersebut juga didukung dengan sumber lainnya yang memiliki kesamaan, seperti sumber artikel, dan laporan penelitian.

Sumber sekunder yang digunakan penulis dalam penelitian ini berupa buku – buku dan laporan penelitian yang terkait dengan judul penelitian tesis ini. Sumber sekunder yang digunakan diantaranya : (1) Knight (1996) “The Idea of Colonialism Studies” terbitan Australia University, Singkatnya, teori Neo – Marxist ini melihat bahwa imperialisme tidak ubahnya dari bagian penindasan kapitalis, yang digerakkan oleh kekuatan ekonomi. Kapitalis berusaha membangun investasi dari perdagangan

luar negeri dan membawanya ke Eropa. Bagi kaum marxisme seperti Lenin, kapitalisme berarti kekuatan untuk memonopoli keuntungan, profit ataupun superprofit, kebanyakan dari perusahaan akan kehilangan peluang untuk memperoleh keuntungan karena didominasi “Brand Industries” atau perusahaan yang menjadi ikon. Hobson, yang terinspirasi dari tulisan Lenin dalam karyanya “Imperialism A Study”, menyebut kapitalisme sebagai sesuatu yang ‘immoral’, bahkan berdampak pada ‘de – industrialisasi’ tanah jajahan, (2) Vickers (2013) berjudul *A History of Modern Indonesia*, Surplus kolonial berfungsi untuk mengukur keuntungan penjajah dari sektor bisnis, aktivitas warga negaranya, dan pemerintahan metropolis, termasuk perdagangan internasional (international trading) dan kerjasama berbagai perusahaan nasional dan internasional, dan perusahaan privat (private company) yang beroperasi di wilayah jajahan. Secara tidak terduga, keuntungan kolonial sering absen dari penulisan sejarah dalam teks pelajaran, dan publikasi akademisi. Keuntungan kebanyakan diperoleh dari perdagangan, diantaranya pajak dari pengiriman barang, biaya pensiun, dan pembelanjaan negara, (3) Korthals Altes (1987) “Colonial Surplus in Indies Balance of Payments Current Account, 1878 – 1939” Tercatat, kekayaan kerajaan Belanda (Royal Dutch) yang didapat dari perdagangan Internasional dan pengiriman barang ke Eropa berkisar 2,9 miliar gulden pada 1878 – 1939, (4) Van Der Eeng (2002) “Economic Benefits frm Colonial Assets : The Case of The Netherlands and Indonesia 1870 – 1958”, menjelaskan bahwa imperialisme adalah fenomena natural yang terjadi di tanah jajahan. Dari kata “Natural” ini cukup menjadi perdebatan, (5) Alec Gordon “How Big was Indonesia’s Colonial Surplus in 1939 – 1941”, menjelaskan tentang perkembangan industri termasuk manufaktur, pertambangan, komoditi primer, dan bidang konstruksi, mengalami peningkatan di akhir 1930 sebagai konsekuensi dari pertumbuhan manufaktur. Ini karena kebijakan untuk mempertinggi jumlah impor menggantikan industrialisasi, berakibat pada de – Industrialisasi yang sempit karena adanya monopoli industri. Ini memperlihatkan kuatnya Hegemoni Belanda untuk memperkuat kekayaan melalui perubahan politik

merkantilisme ke Liberal, dengan memanfaatkan aset pribumi, pajak, biaya manajemen, dan perdagangan internasional.

Langkah selanjutnya dalam penelitian sejarah setelah melakukan pengumpulan data baik data primer dan sekunder terkait dengan keuntungan surplus kolonial Belanda di Indonesia tahun 1878 – 1941 adalah melakukan kritik sumber. Menurut Gottschalk (1985 : 79), peneliti harus melakukan penilaian terhadap sumber – sumber sejarah dari dua segi yakni ekstern dan intern. Untuk segi ekstern penulis melakukan identitas arsip untuk mengetahui keotentikan sumber – sumber yang ada. Pada tahap ini peneliti melakukan identifikasi dan perbandingan sumber yang didapat agar menghasilkan fakta sejarah yang dapat dibuktikan kebenarannya, sebagai akhir tujuan pelaksanaan kritik. Sebagai contoh, melalui identifikasi arsip, surat – surat Belanda melalui manuskrip yang tersimpan di Arsip Nasional Indonesia, dan *Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde* (Indonesia: "Lembaga Ilmu Bahasa, Negara dan Antropologi Kerajaan Belanda" (KITLV) tentang bentuk dan proses penjajahan Belanda di Indonesia, melalui kritik ekstern, dapat diketahui bahwa surat – surat dan arsip yang dimiliki Belanda otentik dan sezaman dengan masalah yang dibahas.

Kritik Intern yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan alihaksara, pembacaan, dan alihbahasa atau terjemahan. Jika ditemukan dokumen berbahasa Belanda dan Inggris, maka akan dilakukan analisis pemaknaan melalui metode multimodal dan fenomenologi. Hasil analisis akan dilihat lagi dan dieksplanasi berdasarkan perspektif historis. Analisis yang akan dilakukan meliputi : Analisis Fenomenologi, yakni dengan review dokumen dilakukan bertujuan untuk mengetahui fakta dan data tersimpan dalam bentuk dokumentasi berupa surat-surat, catatan harian, laporan, artefak, foto dari arsip – arsip kolonial, dan penelitian terkait Surplus Keuntungan Belanda di Indonesia 1878 – 1941. Sifat utama data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Melalui tahap kritik intern, sumber yang dikumpulkansudah dikritisi sehingga dikatakan reliabel.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan interpretasi. Menafsirkan fakta sejarah dan merangkai fakta tersebut menjadi satu kesatuan yang harmonis dan masuk akal. Interpretasi dalam sejarah dapat juga diartikan sebagai penafsiran suatu peristiwa atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa

Langkah terakhir adalah historiografi atau penyajian hasil interpretasi fakta dalam bentuk tulisan. Historiografi adalah kegiatan merekonstruksi yang imajinatif dari masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menggunakan metode sejarah. Historiografi yang dilakukan oleh peneliti adalah menuliskan narasi sejarah kritis tentang Surplus Keuntungan Kolonial Belanda di Indonesia Tahun 1878 – 1941 berdasarkan sumber pustaka yang telah dilakukan tahapan interpretasi dengan cara menyusun fakta – fakta sejarah secara analitis, kronologis, dan sistematis.

Agar penelitian ini dapat tersusun dengan sistematis sehingga dapat menjawab pokok-pokok permasalahan yang diangkat, maka diperlukan adanya suatu penyusunan sistematika penulisan. Penyajian tulisan dalam bentuk karya ilmiah tesis ini tersusun dalam enam bab. Bab I. menyangkut tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, penegasan judul, ruang lingkup penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2, berisi tinjauan pustaka yang memuat pendapat – pendapat, buku – buku, serta sumber sejarah lainnya mengenai Surplus Keuntungan Kolonial Belanda di Indonesia Tahun 1878 – 1941, teori relevan terhadap penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Bab 3 berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menyusun karya ilmiah tesis, yang terdiri dari empat tahap metode penelitian sejarah yaitu : heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Dalam bab ini dipaparkan mengenai cara yang digunakan peneliti dalam hal mengumpulkan data, sumber sejarah, menganalisis data, dan merekonstruksi fakta – fakta sejarah yang utuh, logis, dan rasional. Bab 4 berisi tentang pembahasan latar belakang pembentukan surplus keuntungan kolonial Belanda di Indonesia. Bab 5 berisi tentang surplus keuntungan yang dihasilkan Belanda di Indonesia tahun 1878 – 1941. Bab 6 berisi tentang Penutup berisi

kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban secara ringkas terkait dengan permasalahan yang peneliti ungkapkan terkait dengan pertanyaan yang terdapat pada bab 1. Sedangkan saran, peneliti sampaikan pada pihak – pihak terkait penulisan tesis ini.



BAB 4. Latar Belakang Terbentuknya Surplus Keuntungan Kolonial Belanda di Indonesia

Surplus keuntungan kolonial terbentuk melalui latar belakang penerapan kebijakan Belanda dan kondisi struktur sosial masyarakat di abad – 19. Erick Hobswan (1975 : 2) menyampaikan bahwa penjelasan tentang sejarah makro seperti keuntungan kolonial tidak akan terbentuk tanpa memberikan interpretasi terhadap sejarah mikro yang merupakan bagian integral dari dekonstruksi sejarah. Sejarah mikro dalam penjelasan Purwanto (2001 : 1 – 23) dalam “Historisisme Baru dan Kesadaran Dekonstruktif : Kajian Kritis Terhadap Historiografi Indonesiasentris” menampilkan cerita yang lebih manusiawi, dan tidak hanya terfokus pada penjelasan sejarah yang menampilkan visi politis. Sejarah kolonial yang mengkaji tentang keuntungan Belanda di Indonesia adalah bagian dari narasi besar penerapan kebijakan politik Belanda. Karena surplus keuntungan yang terbentuk berasal dari kebijakan pemerintah dan struktur sosial masyarakat (Gordon, 2010 : 2). Transisi kebijakan ekonomi pemerintah belanda menjadi faktor utama terbentuknya struktur sosial masyarakat yang baru. Dari sistem pra kapitalis, yang hanya melakukan kegiatan ekonomi untuk kebutuhan rumah tangga menjadi sistem kapitalis tingkat tinggi, dibawah sistem ekonomi yang bebas.

Sistem ekonomi liberal sebagai pembentuk keuntungan surplus sebenarnya sudah mulai diterapkan sejak awal tahun 1800, 1830, dan 1870. Meski kebijakan-kebijakan bernada liberal sudah mulai dirintis sejak pertengahan abad XIX, banyak wilayah Jawa yang masih tidak terintegrasikan ke sistem ekonomi yang baru ini hingga menjelang 1930. Meskipun begitu, Belanda tetap menghasilkan surplus keuntungan yang jumlahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan negara Belanda. Latar belakang terbentuknya surplus dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya.

4.1 Struktur Sosial Masyarakat Jawa Abad - 19

Aktivitas perekonomian masyarakat masa kolonialisme Belanda terpusat di wilayah Jawa. P. B Carey (1979 : 46) dalam *Aspect of Javanese History* menjelaskan bahwa Jawa sebagai pusat aktivitas pemerintahan Belanda, yang artinya wilayah diluar Jawa belum sepenuhnya dikelola kolonial. Salah satu hal yang membuat pembentukan keuntungan tumbuh subur di Indonesia adalah struktur sosial masyarakat Jawa, karena kondisi sosial ekonomi yang sudah kompleks (Luitten, 2017 : 3). Pada faktanya terdapat tiga jenis struktur sosial yang eksis di pulau Jawa saat itu diantaranya : (1) struktur tradisional Jawa mencakup : wedhana (bupati), camat, dan petani, (2) mantan pejabat VOC, (3) pedagang Asing seperti: Cina, India, Arab, dan jenis pedagang lainnya yang setara. Interaksi antar struktur sosial ini yang menjadi dasar pembentukan kebijakan ekonomi pemerintah terutama setelah kebangkrutan VOC.

Struktur sosial Jawa ditegaskan oleh Burger (1975) dalam penelitiannya tentang studi klasik sejarah sosial ekonomi Indonesia, bahwa dasar dari struktur sosial Jawa adalah feodalisme. Maka, kebijakan pemerintah Belanda di Indonesia masa feodalisme lebih ditekankan pada penarikan pajak dari tanah non – kultivasi seperti sawah dan pajak peternakan di awal tahun 1804 – 1830. Carey (ibid, 1976) menjelaskan keadaan sosial Jawa mengalami tingkat kelahiran dua kali lipat lebih tinggi seiring dengan pembukaan sawah di area non – kultivasi. Ini sangat berkebalikan dengan kondisi meningkatnya tingkat kematian di akhir tahun 1930 saat penerapan sistem ekonomi liberal, yang mempengaruhi berkurangnya keuntungan kolonial di tahun 1939. Data kelahiran dalam masyarakat Jawa terdapat dalam catatan Raffles (1815 : 49) “History of Java” yang meningkat seiring dengan adanya Perjanjian Giyanti selama Perang Jawa (1825 – 1830) akibat pernikahan dini di masyarakat pedesaan dan pentingnya memiliki anak dalam konsep Jawa. Pertumbuhan populasi di Jawa menjadi sebab khusus dari peningkatan perekonomian di Jawa sampai tahun 1830.

4.1.1 Sistem Feodalisme Jawa

Struktur sosial masyarakat Jawa yang feodal ditandai dengan beberapa karakter diantaranya :

1. Terdapat kegiatan agrikultural terbesar yang non – monetisasi, mayoritas petani sangat patuh terhadap elit lokal seperti: Raja dan keluarganya. Raja dan bawahannya memiliki peran penting dalam pembentukan dan perolehan surplus keuntungan
2. Surplus keuntungan yang ada dalam masyarakat feodal tidak dikategorikan sebagai ‘barang ekonomi’, penggarap tanah adalah masyarakat bawah yang hanya patuh pada perintah Raja sebagai pemilik tanah.
3. Klaim atas hak tanah yang paling besar berada dalam kekuasaan kepala desa, camat, dan gubernur daerah, yang memiliki klaim terhadap penggarap tanah dan hasil produksi tanah.
4. Kontrak atas tanah menggunakan perjanjian lisan, yang beberapa sangat multi-interpretasi dan tanpa ada kontrak tertulis seperti yang berlaku dalam hukum Eropa / Romawi.

Sistem feodalisme yang diterapkan elit Jawa dan didukung oleh elit Belanda tersebut menimbulkan keuntungan yang besar hampir 60% pajak yang diambil menguntungkan elit Belanda, sedangkan sisanya adalah elit lokal (Booth, 2010 : 2). Simbiosis mutualisme yang terjadi antar penguasa lokal dan pemerintah Belanda membuat lapisan terbawah mengalami kerugian, yakni petani pribumi. Selain itu, karakter feodalisme yang membuat kontrak dengan perjanjian lisan menimbulkan hak tanah yang tumpang tindih (overlapping). Keuntungan yang didapat dari hasil pertanian akan mudah sekali berpindah tangan kepada struktur kekuasaan yang lebih tinggi, dan tidak adanya hukum mengenai hak properti di Jawa dan daerah lainnya di Indonesia, berpengaruh terhadap tidak seimbang surplus keuntungan yang diperoleh kolonial dan pribumi.

Selama abad 17 dan 18, VOC tahu cara memanfaatkan sistem feodalisme untuk kepentingan Belanda. Hal ini kemudian menjadi dasar bahwa VOC hanya bentuk ekonomi majemuk dari sistem kapitalis yang dibentuk Belanda pada tahun 1870 dengan memanfaatkan sistem feodalisme (Nagtegaal 1996).

Sistem feodalisme dapat dilihat pada masa kekuasaan kerajaan Mataram. Pada masa kerajaan Mataram Islam yang agraris, kegiatan ekonomi sebagian besar masih dilakukan dengan cara tukar-menukar, upeti yang terdiri dari hasil panen dan tenaga kerja. Meskipun sudah ada organisasi/ lembaga keuangan di pusat kerajaan, akan tetapi belum berfungsi sebagai alat perekonomian kerajaan yang utama. Bagi raja kekayaan adalah alat yang ditimbun dan kadang-kadang digunakan untuk membeli dukungan, sehingga tidak pernah dianggap sebagai alat efisiensi dalam organisasi ekonomi kerajaan.

Dalam konsep kekuasaan Jawa, raja adalah pemilik tanah dengan kekuasaannya yang mutlak. Tanah itu dibagi-bagikan kepada para pejabat birokrasi dan para bangsawan sebagai tanah apanage, dan kemudian diserahkan kepada rakyat untuk dikerjakan. Hasil panen dari tanah-tanah yang dikerjakan rakyat di pedesaan, upeti atau penyerahan wajib lainnya diserahkan oleh para kepala desa (petinggi atau bekel) kepada para atasannya yaitu para *Demang*. Para demang ini kemudian menyerahkan lagi kepada para atasannya yaitu para *Panji*, yang biasanya bergelar *Tumenggung*. Kepala dari para panji adalah Wedana yang selanjutnya bertanggung jawab secara langsung kepada *Patih*.^[xxv] (Schrieke, 1951, part II: 191-194). Agar bisa mengontrol tanah-tanahnya yang dikerjakan oleh rakyat di pedesaan, raja mengangkat petugas-petugas khusus, yaitu apa yang disebut dengan istilah bekel, petinggi dan sebagainya, yang sekaligus berfungsi sebagai pemungut pajak. Mereka ini tentu saja juga diberi imbalan jasa atau semacam gaji, yaitu bagian dari hasil tanah desa di wilayah kerja mereka masing-masing.

Untuk para bekel ini raja memberikan tanah bebas pajak yang luasnya seperlima dari tanah sawah yang ada di wilayah kerja mereka masing-masing. Kemudian separuh dari sisanya, yaitu sebesar 2/5 bagian menjadi hak para petani

penggarap yang mereka nikmati pada setiap panen. Sisanya lagi yang tinggal $\frac{2}{5}$ bagian, harus dipotong lagi $\frac{1}{5}$ bagian untuk bupati sebagai kepala daerah dan $\frac{1}{5}$ lagi menjadi bagian para kepala distrik seperti *Demang* dan *Ngabehi*. Dengan demikian raja tinggal memperoleh bagian $\frac{2}{5} \times 100\% - \frac{2}{5} \times 40\% = 40\% - 16\% = 24\%$ dari seluruh hasil panen di suatu kabupaten. Sistem tanah bebas pajak atau hak guna tanah yang seluas $\frac{1}{5}$ bagian dari seluruh tanah sawah yang ada di wilayah kerja *bekel* atau petinggi (atau jabatan setingkat) itu dinamakan sistem perlimaan.

Sistem satuan tanah di Jawa pada awal abad – 19 adalah “jung” yang arti harafiah atau yang sesungguhnya adalah kaki, yang kira-kira sama dengan 50×50 cengkal = 2.500 roede persegi. Satu jung masih bisa dibagi lagi menjadi 5 *bau* (*bau* = lengan). Pengertian harafiah *bau* atau lengan adalah lengan pekerja seperti petani atau peladang, yang kemudian juga disebut dengan istilah *karya*, yang berarti tugas kerja. Satu bahu luasnya kira-kira sama dengan 500 roede persegi. Akan tetapi dalam administrasi pertanahan Jawa yang masih sederhana tanah - tanah bebas pajak dari para *bekel* tidak pernah diperhitungkan dalam menentukan luas tanah desa. Oleh karena itu dalam daftar pajak yang resmi hanya diperhitungkan 1 jung sama dengan 4 *bau* atau *karya* (G.P. Ruffaer, XXXIV, 1931: 72). Artinya untuk ukuran satu jung yang sesungguhnya masih harus ditambah bagian *bekel* sebesar 1 *bau*, sehingga menjadi 5 *bau*.

Dalam istilah Belanda pajak keluarga disebut dengan istilah *hoofdgelden*, yang merupakan kesatuan penetapan dalam hal pajak untuk tanah milik raja. Oleh karena itu setiap kesatuan tanah yang memberikan nafkah bagi satu orang dan keluarganya, ditarik pajak satu real per tahun, yang langsung menjadi bagian raja. Dengan demikian pengertian luas tanah dalam cacah itu juga berhubungan dengan pengertian pajak satu keluarga dalam real. Para pejabat birokrasi tidak menerima imbalan atas pekerjaan dan kedudukannya, akan tetapi sebagai gantinya mereka memperoleh tanah *gadhuhan* (pinjam) sebagai tanah *lungguh* (jabatan), atau tanah *apanage*. Bagian tanah jabatan atau *apanage* para pejabat birokrasi adalah sebagai berikut:

1. Wedana Lebet : 5.000 karya
2. Wedana Bumija : 6.000 karya
3. Wedana Bumi : 6.000 karya
4. Wedana Siti Ageng Kiwa : 10.000 karya
5. Wedana Siti Ageng : 10.000 karya
6. Penewu : 1.000 karya
7. Penatus : 100 karya
8. Panalawe : 25 karya
9. Panigang Jung : 12 karya
10. Panajung : 4 karya
11. Panakikil : 2 karya

Luas tanah lungguh atau apanage para Wedana Jawi adalah bervariasi, yaitu tergantung dari luasnya daerah yang menjadi wilayah kerja mereka masing-masing. Artinya semakin luas daerah yang menjadi wilayah kerjanya, semakin luas pula tanah jabatan yang bisa dinikmati dan sebaliknya. Yang memperoleh bagian tanah lungguh atau apanage dari raja bukan hanya para pejabat birokrasi kerajaan, akan tetapi juga para bangsawan keluarga raja yang tidak menjadi pejabat birokrasi. Bangsawan keluarga kerajaan memperoleh tanah apanage yang masing-masing besarnya adalah sebagai berikut.

1. Nenek raja (Ratu Eyang) : 1.000 karya
2. Ibu Raja (Ratu Ibu) : 1.000 karya
3. Isteri raja (Ratu Kencana) : 1.000 karya
4. Putra Mahkota (Pangeran Adipati) : 8.000 karya
5. Para Pangeran (putra raja) : 1.000 karya

Besar kecilnya tanah lungguh seorang pejabat birokrasi kerajaan menunjukkan tinggi rendahnya tingkatan pejabat itu dalam struktur birokrasi kerajaan, sedangkan bagi para bangsawan menunjukkan tinggi rendahnya derajat kebangsawan (*keningratan*) mereka masing-masing. Bagi para pejabat birokrasi kerajaan, tanah lungguh atau apanage itu tidak bisa diwariskan kepada keturunannya.

Artinya tanah itu hanya bisa dinikmati selama seseorang masih berstatus sebagai pejabat birokrasi kerajaan. Apabila sudah berhenti dari jabatannya dengan berbagai alasan, tanah tersebut otomatis kembali kepada pemiliknya yaitu raja, yang kemudian akan diberikan kembali kepada penggantinya. Sebaliknya, meskipun tidak untuk selamanya, tanah *apanage* para bangsawan kerajaan bisa diwariskan kepada keturunannya. Hanya saja luasnya biasanya semakin menyusut sejalan dengan menurunnya derajat kebangsawanan seseorang. Dalam sistem kebangsawanan Jawa, derajat kebangsawanan seorang raja semakin menurun sampai derajat kelima (terbawah). Di bawah itu keturunan seorang raja bisa dianggap sebagai orang biasa atau kebanyakan.

Struktur sosial feodalisme masyarakat Jawa berlangsung hingga tahun 1830, setelahnya hak – hak pribumi berada dalam kekuasaan Belanda. Dalam catatan Carey (2011 : 297 – 315) *Revolutionary Europe And The Destruction Of Java's Old Order, 1808-1830*, Belanda mendapatkan keuntungan sekitar 400 juta gulden (f) hasil pendekatannya kepada elite pribumi. Belanda berperan sebagai agen ekonomi yang menawarkan kesepakatan dengan raja – raja. Tanah yang diberikan oleh Raja kepada para bangsawan menggunakan kontrak lisan yang dimanfaatkan pemerintah untuk memindahkan tanah dari pribumi menjadi milik kolonial. Struktur feodalisme digantikan oleh sistem sosial ‘priyayi’ yang muncul di tahun 1830 – an sampai tahun 1941, adalah istilah yang dipergunakan Belanda untuk mengambil kepercayaan elite pribumi.

4.1.2 Kaum Priyayi

Pemerintah Belanda memiliki strategi penguasaan *indirect rule* (sistem penguasaan tidak langsung) melalui elit lokal (kepala desa) dan bawahannya, dan kaum pribumi bukanlah objek dari hukum Eropa, tetapi adat tetap dipertahankan dalam sistem kekuasaan Belanda. Tradisi dan hukum adat termasuk sistem pertanahan dan struktur sosial Jawa tetap berlaku selama sistem pemerintahan Belanda. Alasan Jawa sebagai pusat administrasi kolonial adalah karena sebanyak

80% orang kulit putih Belanda baik bagian dari pemerintah maupun independen, bertempat tinggal di Jawa (Meerkerk, 2017 : 38). Hubungan antara *netherland* dan kaum pribumi menghasilkan ikatan sosial dan ekonomi yang intensif dalam sejarah kolonial.

Struktur sosial masyarakat pribumi terutama Jawa tertuang dalam regulasi pemerintah (Regeringsreglement) tahun 1854 bahwa adat dan sistem priyayi mendapat tempat selama berlangsungnya pemerintahan Belanda. Menurut Geertz (1981 : 307), dalam bukunya “Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa”, bahwa priyayi adalah kaum Aristokrat. Kaum priyayi pada umumnya banyak yang bertempat tinggal di kota-kota. Priyayi menurut istilah aslinya menunjuk kepada orang yang bisa menelusuri asal-usul keturunannya sampai kepada raja-raja besar Jawa jaman sebelum penjajahan. Namun sejak Belanda memerintah Jawa, Belanda mempekerjakan kaum ini sebagai instrumen administrasi kekuasaannya sehingga pengertian priyayi meluas termasuk orang kebanyakan yang ditarik ke dalam birokrasi.

Sistem kultivasi yang diterapkan Van den Bosch dilanjutkan oleh Daendels, dan Van der Capellen pada prakteknya tetap menggunakan kaum priyayi sebagai perantara antara *netherland* dan pribumi. Dibalik meningkatnya pendapatan Belanda sebesar 236 juta f selama tahun 1840 – 1860, pemerintah tetap memakai cara – cara lama dengan menggunakan kaum priyayi untuk menghasilkan keuntungan. Kaum priyayi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan ekspor hasil agraria bagi pemerintah Belanda dalam mengekspor gula, kopi, teh, dan lain-lain.

Di Banten, kaum priyayi masuk dalam sistem keluarga kaya yang mewariskan kekayaannya kepada puteranya. Orang – orang kaya pribumi dapat memasuki sistem pemerintah sebagai orang kepercayaan gubernur jenderal. Keberadaan priyayi lambat laun mengalami aliansi sejak diterapkannya politik etis tahun 1900. Meski sebenarnya kaum priyayi masih memegang peranan besar dalam keberlangsungan kehidupan sosial ekonomi pedesaan, namun perannya sering dibatasi, terutama

setelah banyaknya pengusaha swasta yang bertempat tinggal di Indonesia sejak pertengahan tahun 1880.

Elite priyayi lambat laun berubah statusnya dari pemimpin masyarakat tradisional menjadi pembantu pemerintah kolonial yang kekuasaannya sangat dibatasi. Selama perang Jawa misalnya, kaum priyayi hanya berfungsi sebagai penengah yang diperintah Belanda agar masyarakat tidak melakukan perlawanan. Dalam istilah Carey (1989 : 83), bupati dan priyayi adalah pembantu paling terpercaya dalam membangun kemajuan pemerintah. Priyayi termasuk bupati, camat, dan kepala desa berkontribusi dalam pembangunan pabrik – pabrik gula di Jawa. Di Kalimantan dan Sulawesi, priyayi selain bertugas sebagai penyedia tenaga kerja di desa – desa, mereka juga bertugas untuk mempermosikan wilayahnya kepada para pengusaha swasta, terutama selama berlangsungnya sistem ekonomi liberal sampai tahun 1941.

Latar belakang struktur sosial masyarakat adalah hal penting untuk menelusuri faktor yang sangat berpengaruh dalam membentuk surplus keuntungan kolonial Belanda di Indonesia. Bahasan selanjutnya tentang sistem kebijakan pemerintah Belanda sebagai faktor lainnya yang menentukan besarnya surplus keuntungan yang diperoleh Belanda selama masa transisi politik ekonomi merkantilisme menuju penerapan sistem ekonomi liberal.

4.2 Transisi Kebijakan Ekonomi Pemerintah Belanda

Historiografi antara Belanda – Indonesia memiliki hubungan erat yang menandai “transisi krusial” antara tahun 1800 dan 1870. Kata “transisi” menunjukkan perubahan rezim dan politik ekonomi Belanda setelah kebangkrutan *Dutch India Company* (VOC) tahun 1799, yang menandai pendirian *Nederland- India* dibawah administrasi Belanda dan Inggris langsung sejak tahun 1817. Menurut perspektif global, perubahan kebijakan yang terjadi di Hindia Belanda sejak 1800, 1870, dan 1941 memiliki hubungan dengan peristiwa besar lainnya di Eropa Barat berpengaruh terhadap sejarah global dan tatanan sosial ekonomi Eropa. Bagi orang – orang Belanda di luar negeri hal ini tidak berpengaruh, tetapi bagi mereka yang ada di Asia

terutama Hindia – Belanda akan berpengaruh pada aktivitas komersial. Secara partikular, Inggris harus berhadapan dengan Perancis dalam tatanan posisi terkuat di Eropa.

Peristiwa Revolusi Perancis (1789 – 1795), Perang Napoleon, dan Revolusi Industri mengubah tatanan sosial – ekonomi Eropa yang sebelumnya sudah mapan. Ini menjadi lebih nyata setelah Raja Napoleon menginvasi “Low Countries” pada tahun 1795, dan menempatkan Belanda di bawah protektorat dan kepemimpinan Louis Napoleon (Lodewijk in Dutch) yang dimahkotai sebagai Raja Belanda di Indonesia tahun 1806. Salah satu konsekuensinya adalah bahwa Belanda harus terlibat dalam Perang Napoleon (1803- 1813) melawan Inggris, termasuk di koloni Asia, dan juga terlibat dalam pengenalan Gagasan Napoleon untuk koloni-koloni di Asia. Ini sangat bertentangan dengan prinsip Belanda sebagai sekutu dari Inggris.

Sebagai pusat kerajaan kolonial Belanda sejak abad ke-17, Jawa adalah tempat pertama dimana perubahan global akibat perseteruan Inggris dan Perancis terlihat sangat jelas. Perjuangan kerajaan, perang, dan perubahan global sampai pada tingkatan perdagangan antar negara, Jawa menjadi tempat menarik untuk dikaji secara historis. Selama periode 1800 sampai 1890-an, empat rezim telah terjadi di Jawa diantaranya: sistem perusahaan VOC, pemerintahan Perancis – Belanda, Peralihan kekuasaan Inggris, dan negara kolonial Belanda. Jelaslah bahwa pergantian rezim secara dimensional di Jawa berdampak pada pulau – pulau di Nusantara.

Jawa dikenal penghasil berbagai sumber komoditi bagi pasar Eropa. Berger (1966 : 10) melihat struktur sosial dan ekonomi Jawa yang feodal, turut mendukung terlaksananya berbagai kebijakan terapan Belanda. Sewaktu masa peralihan antara kekuasaan Belanda, Perancis – Belanda, Inggris, Jawa menjadi saksi atas berubahnya konsep Hindia – Belanda dari feodal ke negara kolonial. Tidak ada yang mengerti dengan tepat bagaimana perubahan kebijakan politik di Eropa mengubah total tatanan yang ada di negara jajahan. Masyarakat yang semula mendapat keuntungan dari sistem feodalisme kerajaan, berubah statusnya sebagai pekerja (labours). Dalam konsep kepemimpinan Daendels, seorang residen dibayar dengan gaji 125 ribu

Spanish rix-dollars (Srd) atau *Rijksdaalders (Rsd)*, untuk menggantikan sistem upeti, dan penarikan keuntungan lainnya di masa feodal.

Keuntungan dapat dikatakan surplus ketika itu melebihi capaian target. Ini adalah konsekuensi dari proses perubahan : politik, ekonomi, budaya, dan yudisial. Perubahan ini diikuti dengan adanya kronologi dari kerusakan institusional, rekonstruksi, habituasi, dan konsolidasi. Blussé (1998 : 6 – 8) menjabarkan kondisi Jawa yang harus mengalami perbaikan ekonomi, re-organisasi sistem keuangan, pengaturan kebijakan fiskal, dan pasar gelap dapat mempengaruhi surplus keuntungan. Untuk menganalisis awal dari terbentuknya surplus keuntungan di Hindia – Belanda terutama dalam historis Jawa, terdapat dua tahapan : (1) keuntungan dalam konsep dan historikal, dan (2) keuntungan dan pergantian rezim. Analisis awal menggunakan pendekatan sejarah institusional untuk memahami perubahan sejarah dalam tataran politik, dan sosial ekonomi.

4.2.1 Kebijakan Sistem Merkantilisme

Merkantilisme sebagai pembentuk surplus kolonial Belanda memiliki pola yang sama dengan penjajahan Inggris di Afrika. Kuitenbrouwer yang pernah melakukan penelitian kolonisasi Belanda menyebutkan kebijakan di tanah jajahan baru diterapkan penuh untuk mengambil keuntungan setelah adanya Perang Lombok 1894 (1985 : 202 – 225). Belanda melihat Indonesia sebagai tanah yang diserahkan oleh Inggris untuk pemenuhan surplus keuntungan. Aneksasi yang dilakukan Inggris memposisikan Indonesia sebagai negara kolonial.

Fasseur mendefinisikan ekspansi Belanda diluar Jawa antara tahun 1830 dan 1870 sebagai “merkantilisme perbatasan” (frontier merchantilism) untuk memperluas keuntungan. Dalam catatan beberapa sejarawan seperti Wesseling (1986 : 559 – 777), tidak ada ‘penjajahan Belanda’ setelah Belanda melegalkan kedaulatan atas Indonesia setelah penggantian kebijakan *Dutch India Company (VOC)* tahun 1816 dibawah administrasi Belanda dan Inggris. Ini artinya, surplus yang semula terpusat pada negara induk secara bertahap mengalami perkembangan pada keuntungan privat.

Banyaknya perusahaan swasta di tahun 1870 menandai transisi sistem merkantilisme ke sistem liberalisme.

Historiografi Belanda yang menulis tentang keuntungan / surplus diantaranya : Van der Eeng (2002) “Indonesia growth experince in 20th century”, Wotlers (2006) “Managing Multiple Currencies Netherlands Indies 1600 – 1800”, Alex Gordon (2010) “How Real Surplus Dutch Colonial”, Ulbe Bosma “The Economic history of Dutch Colonial Empire”, dan “The Development of Indonesia Society” Queensland University, menginterpretasikan keuntungan Belanda sebatas pada skala penjajahan klasik sampai tahun 1800, yang dilanjutkan politik Merkantilisme menuju Liberalisme tahun 1870.

Dalam konteks post kolonial, penjajahan Belanda selama berabad – abad merupakan bagian dari usaha mencari tanah untuk memperoleh keuntungan yang sebesar – besarnya. Sebagian orang tidak mengetahui bagaimana reaksi masyarakat eks - kolonial kemudian memandang tindakan Belanda sebagai akibat dari segala sesuatu yang terjadi pada masyarakat. Kemiskinan dan ketertinggalan yang menerpa suatu bangsa eks-kolonial bukan sepenuhnya kesalahan kolonial. Linbald (1989 : 1 - 23) meneliti perekonomian Indonesia selama 40 tahun sejak tahun 1950, menjelaskan dinamika perkembangan sosial ekonomi sangat bergantung kegiatan ekspor – impor yang terjadi sejak tahun 1870. Bagaimana masyarakat jajahan di era ini mampu melakukan kegiatan ekspor – impor tidak terlepas dari modal dan teknologi Barat.

Dapat dikatakan selama akhir abad – 20, tidak ada Belanda dalam penjajahan Indonesia, sebabnya : (1) Belanda menggunakan politik *Leize Freire* sejak dibukanya tanah kolonial untuk swasta di tahun 1870, (2) berdasarkan perundingan London 1824, Belanda menerima Indonesia sebagai warisan dari Inggris. Ketika Belanda menganut sistem *Leize Freire*, tugas Belanda tidak lebih dari sekedar agen ekonomi yang mencari konsumen untuk menyewa tanahnya. Hal ini sering diabaikan dalam penelitian sejarah. Terdapat pendekatan sejarah institusional untuk menjelaskan sudut pandang yang lebih luas mengenai penjajahan

Usaha Belanda untuk menghasilkan surplus dilakukan dengan jalan mengubah secara radikal kebijakan ekonomi. Perundingan antara perkumpulan pemegang saham di Eropa menyetujui untuk menutup kerugian yang dihasilkan akibat dari pengeluaran tidak terduga (seperti : perang Jawa dan perang Paderi) selepas VOC bangkrut, dengan cara memperluas daerah ekspansi di luar Jawa. Proses pembentukan negara kolonial secara umum, harus ada keterhubungan antara ‘pulau luar’ dengan ‘pusat’ (Jawa). Ada tiga tipe untuk membentuk keterhubungan : penetrasi pulau luar melalui pusat, standarisasi kota yang dibangun berdasar arsitektur Eropa di pulau luar sebagaimana kondisi di pusat, dan meningkatkan partisipasi dari pulau luar ke pusat. Cara yang dilakukan ini tepatnya seperti pemerataan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Pemerintah (Belanda) menggunakan beberapa cara untuk memperluas kekuasaan dari Jawa ke Luar Provinsi : Pertama, orang – orang di militer dan para administrator dikirim dari Jawa ke pulau lainnya untuk bertugas. Kedua, kebijakan penetrasi budaya untuk menundukkan wilayah yang diekspansi seperti misalnya : Bali, Nusa Tenggara, dan Kalimantan untuk memperluas kekuasaan, agar akhirnya mencapai satu entitas yang homogen. Ketiga, pembukaan Provinsi Luar untuk perdagangan dunia. Cara – cara ini yang kemudian mengundang reaksi perlawanan dari penduduk lokal dan tidak jarang terjadi peperangan. Puputan Margana Bali, perang di Lombok adalah bagian dari politik Belanda untuk memperluas ekspansi ekonomi. Ekspansi ekonomi pemerintah seringkali melibatkan penguasa lokal untuk membuat kesepakatan antara tanah yang masuk kekuasaan pemerintah dan timbal balik keuntungan. Politik ekonomi liberal di tahun 1870 turut mendukung pengusaha – pengusaha asing untuk ikut berpartisipasi mendirikan perusahaannya di Hindia – Belanda. Salah satu pemegang saham yang paling dipercaya Belanda adalah Cina (Dick, 1993 : 5).

Ekspansi pemerintah dilakukan dalam skala ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dalam rangka meneruskan kekuasaan kolonial Belanda di tingkat lokal di Indonesia, daerah – daerah di luar Jawa didominasi oleh pengusaha swasta dan

pegawai negeri sipil. Survei representatif yang dilakukan Linbald mengidentifikasi kasus – kasus dimana kepentingan modal swasta mendominasi perdagangan di luar pulau Jawa, dan berusaha ditekan oleh kebijakan publik pemerintah. kasus seperti ini dapat docontohkan pada “coolie ordonantie” yang dibuat tahun 1880 disalahgunakan oleh pihak swasta. Pengiriman imigran Cina dari Singapura oleh pengusaha swasta Inggris cukup membuat pemerintah Belanda malu karena seringnya kekerasan yang dilakukan kepada pekerja.

Para elitis di luar Jawa pada umumnya memiliki keinginan yang besar terhadap penanaman modal oleh pihak swasta. Di satu sisi, penguasa lokal berusaha menarik perhatian pengusaha swasta untuk menanam modalnya melalui kerjasama dengan pemerintah. Sisi lain, penguasa lokal tidak dapat menjamin keuntungan besar yang didapat dengan menanamkan modal di provinsi luar atau wilayah diluar pulau Jawa. Sultan Siak di Riau memiliki ketertarikan sama kepada para investor dan kaum birokrat antara tahun 1870 dan 1880. Tahun 1858, sebuah perjanjian dibuat antara Sultan dan kedaulatan Belanda. Sultan khawatir para pedagang dari Selat Malaka akan menguasai daerah Siak. Rumor beredar bahwa Sultan juga memiliki aset kepemilikan timah, selain tembakau. Namun dinamika ekonomi yang terjadi di Siak tidak terlalu baik. Tanah yang buruk mempengaruhi penanaman tembakau dan eksploitasi timah tidak menguntungkan, sehingga Siak harus rugi besar. Dampak politis dari gagalnya perkomian berpengaruh pada pemindahan ibukota Sumatera Timur ke Deli. Kegagalan bagi elit lokal, namun tidak untuk pemerintah. Jalur perekonomian pemerintah Belanda telah terbentuk di Sumatera.

Surplus keuntungan makro diperluas ke Kalimantan Utara. Kawasan utara yang didominasi oleh *British North Borneo Company* yang berkuasa atas Malaysia dan utara Kalimantan tahun 1881. Tahun 1885 pemerintah Belanda dengan penguasa lokal, Sultan Sambaliung, Gunung Tabur, dan Bulungan telah memiliki akses untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi daerah setempat. Adanya perusahaan Inggris mendorong Belanda untuk bekerjasama agar dapat mendirikan stasiun angkutan laut.

Tetapi reaksi politik masyarakat terhadap perusahaan Inggris membangkitkan minat Investor Belanda.

Penguasa lokal menilai perlindungan pemerintah dianggap tidak memuaskan. Sehingga terdapat pemindahan petugas Belanda dari Tawau ke ibukota Bulungan pada tahun 1889 menandai pergeseran prioritas Pemerintah, yang semula melindungi penguasa lokal dari pengusaha swasta, sikap sultan membuat pemerintah harus mengontrol wilayah secara permanen, tanpa bantuan Sultan. Antara tahun 1893 dan 1897 tiga penguasa lokal dipaksa untuk melepaskan sebagian besar otoritas mereka khususnya, sehubungan dengan kegiatan ekonomi seperti pemberian konsesi dan pengumpulan bea cukai. Penambangan batu bara di Sambaliung, Kalimantan Utara kemudian mengubah perekonomian masyarakat lokal. Surplus keuntungan mulai terbentuk di Kalimantan.

Perhatian dari para investor perusahaan asing menjadi katalis dari politik seorang Raja di Gorontalo. Tahun 1885, permintaan dari firma *Bauremann & Parmentier* untuk mencari emas di Gorontalo membuat insinyur pertambangan Van Schelle mensurvei cadangan emas di Gorontalo, dan Asisten residen, Scherer, yang bertugas menjaga ketertiban politik yang sedang berada dalam kekacauan sejak raja terakhir Gorontalo. Kedua orang ini membawa pengaruh besar bagi investor swasta yang membuat kedudukan Pemerintah Belanda semakin nyata. Pada tahun 1889 Gorontalo berada di bawah pemerintahan kolonial langsung (tidak lagi berada dalam pemerintahan tidak langsung melalui pangeran Melayu). Di akhir tahun 1890, Gorontalo resmi berada dibawa kontrol pemerintahan Belanda. Gorontalo menghasilkan komoditi emas yang menunjang peta eksploitasi dan keuntungan Belanda.

Untuk hubungan selanjutnya antara kepentingan modal swasta dan ekspansionis, kebijakan publik pemerintah lebih difokuskan ke wilayah Sumatera, lebih khusus ke Aceh dan Jambi. Di kedua wilayah itu terdapat industri minyak yang kepentingan industrinya berkembang di Indonesia dan sangat menentukan posisi Belanda sebagai agen ekonomi dalam ekspansi ekonomi mikro.

Secara makro, pembentukan surplus dibentuk di beberapa daerah di provinsi luar Indonesia memanfaatkan pergolakan politik yang terjadi di wilayah tersebut. Perang Aceh yang terjadi sejak tahun 1873 merupakan perang paling kronik dan mengerikan dalam sejarah perlawanan kolonial. Selain harus membagi modal dengan Inggris, wilayah Tamiang dan Perlak di pantai utara berada dalam zona perang dan tidak memungkinkan untuk melakukan eksploitasi oleh perusahaan swasta. Jukstaposisi beberapa kejadian membuat pemerintah Belanda mengubah kebijakan politiknya. Belum lagi permasalahan pembelot yang dilakukan Teuku Umar membuat Belanda lebih frustrasi. Singkatnya, Kerajaan Belanda meminta kepada Kesultanan Aceh untuk mengakses ladang minyak di Timur Sumatera dengan melakukan pengeringan (*drying up*). Dibawah komando Van Heutz di tahun 1898, pasifikasi Belanda dengan Aceh membuka wilayah Tamiang dan Perlak sebagai wilayah eksploitasi minyak untuk para investor swasta. Selama perang berlangsung, eksploitasi ini dijaga ketat oleh tentara kolonial.

Di Jambi, Belanda memanfaatkan perebutan politik dengan menggulingkan Sultan Taha dan menggantikannya dengan pamannya dilindungi oleh garnisun Belanda di ibukota. Faktanya, selama beberapa dekade kekuasaan Belanda hanya berkisar pada sekitar Ibukota Jambi. Komoditi yang dapat menambah surplus swasta dan pemerintah di wilayah ini diantaranya pasokan minyak. Ada banyak investor yang berminat melakukan ekspedisi ilmiah untuk meneliti dan mengebor kedalaman minyak di daerah Jambi sekitar 1880. Sayangnya, pengeboran minyak baru dilakukan selepas tahun 1900, setelah pemerintah mengubah kebijakan karena persaingan antara pengusaha swasta, antara Kerajaan Belanda dan perusahaan *Standard Oil* yang monopoli pasokan minyak di Indonesia. Di tahun 1903 saja ada lebih dari 2.000 permintaan untuk pengeboran di Jambi, diduga penyadapan minyak dilakukan oleh Standart Oil. Pada tahun itu juga militer Belanda melakukan ekspedisi untuk menepati janjinya pada penerus Jambi dengan membunuh Sultan Taha pada tahun 1904. Kematian sultan menandai kekuasaan Jambi berada dibawah pemerintah Belanda.

Dalam beberapa kasus, ekspansi yang dilakukan Belanda di Siak, Kalimantan timur laut, Sulawesi Utara, Flores, Aceh, Jambi didorong oleh adanya kepentingan masuknya modal swasta di daerah – daerah terpencil di Indonesia, untuk mendapat untung besar. Seringkali Belanda sebagai agen ekonomi menjanjikan yang penuh optimistik bahwa keuntungan besar akan didapat swasta asing, meski dalam kasus – kasus tertentu Belanda harus menelan kerugian karena faktor geografis dan akibat reaksi politis. Seringkali pemerintah bersikap ambigu terhadap calon pioner yang prospektif karena takut akan mengotori wilayah yang akan dieksplorasi, juga karena kurangnya fasilitas umum yang memadai seperti: jalan beraspal, dan sebagainya. Pemerintah memberikan konsesi kepada calon – calon penanam modal dengan syarat perusahaan atau pemohon individu setuju untuk membiayai pengeluaran tambahan apa pun saat melakukan eksploitasi di wilayah yang dituju. Sebagai imbalannya, pemodal swasta asing berada dalam proteksi Eropa.

Di era merkantilisme awal abad – 19, keuntungan menitikberatkan pada penghasilan tanah yang dikuasai melalui struktur kebijakan politik VOC seperti: *Verplichte Leverantai*, *Contingenten*, dan lainnya. Kebijakan politik kerja paksa karena berada dibawah pimpinan Perancis Napoleon Bonaparte. Pajak tanah dan sebagainya, merupakan ciri – ciri dari sistem merkantilisme.

Setelah tahun 1870, konsep surplus keuntungan tetap dipengaruhi oleh kondisi perpolitikan Eropa yang menginginkan Belanda melakukan percepatan (akselerasi) ekonomi diantaranya dengan cara membuka lahan bagi pemodal swasta asing, yang dinilai dapat menghemat anggaran pengeluaran dan memperbesar keuntungan. Selain untuk menutup kerugian atas runtuhnya VOC, cara – cara ekspansi dan eksploitasi yang dilakukan pemerintah Belanda di pertengahan abad – 19, tepatnya 1870, mengubah tatanan feodal menjadi negara kolonial. Pergantian kebijakan Merkantilisme ke sistem Kultivasi yang mempengaruhi besarnya surplus dapat dianalisis pada sub bab selanjutnya.

4.2.2 Kebijakan Reformasi Ekonomi

Kuartal pertama abad – 19 Furnivall (1994 : 80) menyebut Jawa berada dalam “tahun – tahun ketidakpastian”, merupakan periode perubahan rezim akibat perubahan politik dan ekonomi di Eropa. Reformasi ekonomi Eropa adalah pengaruh dari perubahan rezim di Belanda. Partai liberal di Eropa menuntut Belanda untuk segera menerapkan sistem ekonomi liberal / sistem kapitalis awal di Indonesia.

Reformasi ekonomi dan politik di Jawa secara kronologis dibagi menjadi tiga fase : (1) reformasi yang diprakarsai oleh Gubernur Jenderal Daendels pada 1808-1811, (2) Jawa dibawah administrasi Inggris (1811-1816), di mana Letnan Gubernur Jenderal Raffles memperkenalkan praktek kolonialisme yang berbeda yakni sistem sewa tanah, 3) Belanda melanjutkan reformasi Eropa (1816-1826), dipimpin oleh Gubernur Jenderal Van der Capellen.

Selama pemerintahannya yang singkat, Daendels yang bertugas di bawah naungan pemerintahan Perancis-Belanda dikirim ke Jawa sebagai gubernur jenderal pertama yang menangani tugas-tugas yang sangat besar di pulau ini. Daendels bertugas melindungi Jawa dari invansi Inggris. Daendels juga harus mereformasi administrasi kolonial yang korup akibat warisan VOC sewaktu masih beroperasi. Daendels diperintahkan untuk mendirikan militer di kolonial bahkan tanpa dukungan dari negara metropolis (Belanda). Dalam analisis Mijer (1848 : 210), Daendels memimpin sebuah negara jajahan dengan pasukan tidak lebih dari 3600 terdiri dari orang – orang Cina, dan Moor (orang – orang Portugis dan Spanyol), terdiri dari bagian kavaleri, militer, rumah sakit, teknik, yang bahkan tidak dalam kondisi baik. Serta orang – orang Madura dan Jawa dengan jumlah hanya 2000 orang dengan kondisi keuangan minim.

Untuk tujuan menghindari invansi Inggris, dan membiayai perang, Raja Lodewijk mengeluarkan ‘instruksi Gubernur Jenderal dalam “Asian Possession” (gambar pada lampiran B) pada 9 Februari 1807 untuk digunakan sebagai cetak biru dalam pelaksanaan kepemimpinan Daendels. Instruksi ini terdiri dari 37 artikel, 12 halaman berurusan dengan masalah dan instruksi militer untuk mempertahankan Jawa

dari serangan Inggris. Sisanya, berisi instruksi yang menangani masalah sipil dan ekonomi. Di sektor ekonomi, artikelnya menginstruksikan Daendels untuk mengontrol perdagangan komoditi penting, ekspor dan impor ikan, sayuran, garam, tembakau, kopi, dan sebagainya (Mijer, 1848: 345-46).

Dalam praktiknya, kebijakan fiskal Daendels terdiri dari tiga elemen penting : (1) pengiriman produk dan tenaga kerja paksa, jasa, (2) penjualan tanah dan, (3) monopoli dan pendapatan pertanian, termasuk pengenalan pajak pertanian berupa opium. Untuk mendukung kebijakan fiskalnya, di sektor moneter Daendels mengeluarkan sejumlah besar uang kertas, yang sebagian dikeluarkan dengan sistem kredit untuk merangsang kegiatan ekonomi. Selain itu, kebijakan Daendels juga digunakan untuk merasionalisasi anggaran birokrasi daerah yang dianggap feodal, mengurangi kekuasaan Bupati untuk menghilangkan pelanggaran administratif. Daendels berusaha menekan penyelewengan yang ada dalam “upeti”, atau hadiah yang biasa digunakan masyarakat aristokrat untuk menghadiahi Raja. Daendels mengganti sistem upeti ini dengan sistem ‘gaji’ yang dibayarkan perbulan, serti Residen Pekalongan yang dibayar 125 ribu Rsd atau sekitar 321,5 Guilder.

Ketiga kebijakan yang diterapkan Daendels pada dasarnya dimaksudkan untuk mempertahankan keuntungan dari praktik pendapatan pertanian termasuk monopoli komoditas opium dan garam. Dengan mempertimbangkan terbatasnya jumlah organisasi pemerintah dan orang – orang yang ada didalamnya, maka Daendels bermaksud untuk membatasi pemerintah lokal. Di akhir tahun 1810, *Bataviasche Koloniaal Courant* sebagai satu – satunya koran yang ada saat itu melaporkan bahwa Daendels melakukan pembatasan terhadap kebijakan pemerintah lokal atas lisensi pengambilan pajak dari dua puluh lima komoditi perdagangan (*Bataviasche Koloniaal Courant*, 14 Desember 1810, gambar pada lampiran B). Sisanya komoditi atas eksploitasi hutan, ekspor ikan, sayuran, pajak perdagangan orang Cina, hasil penjagalan hewan ternak, perdagangan tembakau orang Cina, ekspor beras, kegiatan kelautan syahbandar, perjudian, penampilan wayang, ekspor gula,

opium, serta pajak di bidang perhubungan seperti penarikan pajak jalan tol dan jembatan.

Di pesisir pantai utara, keuntungan dari pertanian didapat di daerah Batavia. Sebagai contoh, penjualan minuman beralkohol (arak, tjiuw), penjualan perahu kecil, garam, dan sarang burung walet. Berbagai pajak yang didapat tidak lepas dari pengurangan biaya produksi modal yang dikeluarkan pemerintah. Di Jawa Timur dan daerah *Vorstenlanden* (daerah istimewa seperti Yogyakarta dan Surakarta), jenis bidang pertanian yang sama juga dikembangkan. Perbedaannya, perdagangan di daerah Jawa Timur adalah sistem pertanian ada di tangan orang – orang Tiongkok. Sedangkan di *Vorstenlanden* Kesultanan Yogyakarta dan Sunan Surakarta, keduanya adalah penerima dan manajer dari sistem pertanian (Salmon, 1991: 62-63).

Singkatnya, pendapatan pertanian adalah yang paling sumber pendapatan penting untuk Daendel. Pemerintahan Daendels cenderung memposisikan orang – orang Cina sebagai pemain utama perdagangan, begitupun pada periode selanjutnya. Belanda lebih mempercayai Cina untuk bekerjasama sebagai pengusaha, karena takut adanya korupsi jika mempercayakan pada penguasa lokal (Wahid, 2012 : 256). Daendels berhasil mengumpulkan pendapatan untuk membiayai usahanya administrasi meskipun pada akhirnya gagal mempertahankan Jawa dari pendudukan Inggris.

Setelah Inggris mengambil alih Jawa pada tahun 1811, mereka memperkenalkan beberapa perubahan mendasar dibawah kepemimpinan Letnan Jenderal Thomas Stamford Raffles. Salah satu kebijakan fiskal utama Raffles adalah menggantikan otoritas penguasa lokal yang sebelumnya dikuasai Daendels, digantikan dengan perpajakan tanah (*landrente*). Raffles harus menunggu sampai 1814 untuk menerapkan sistem sewa tanah berdasarkan prinsip properti dan individual. Raffles bermaksud untuk memperkuat status kepemilikan tanah oleh petani dengan menghancurkan otoritas priyayi, karena dinilai kurang adil (Hugenholtz, 1994: 148-49). Ide ini termasuk revolusioner meski pada

perkembangannya Raffles gagal mengoperasikan idenya karena kondisi tanah yang tidak mendukung dan tingginya pengaruh pemerintahan Belanda di Jawa.

Sehubungan dengan adanya praktik pertanian di tanah – tanah Jawa, Raffles tidak mengambil langkah mendasar untuk mengatur ulang sistem yang ada. Penawaran yang dibuat Inggris dalam dua tahun pertama menawarkan ketentuan pendapatan untuk daerah pertanian di Batavia dan sekitarnya. *Java Government Gazette* adalah bentuk iklan yang dibuat Inggris untuk mengumumkan pelelangan pertanian di Jawa. Pelelangan pertanian tersebut termasuk lisesnsi untuk toko – toko sayur, pedagang Tionghoa, penjalagan ternak seperti: babi, kambing, pembuatan lilin, penjualan kapal, tembakau pedagang Cina, pasar beras, pasar ikan, pewayangan, konsumsi, pajak perjalanan kapal, garam, dan eksploitasi ribuan pulau. Semua syarat dan ketentuan peternakan didasarkan pada praktik lama, yakni masing – masing pedagang dan petani harus memiliki lisesnsi penjualan yang berlaku selama waktu satu tahun, dan dalam kurun waktu itu mereka harus membayar kepada pemerintah dengan jumlah uang telah ditentukan, baik dalam bentuk guilden (emas) atau perak, sesuai dengan kontrak. Dengan ini sebenarnya Raffles bermaksud agar pendapatan usaha tani tidak diambil oleh pejabat pemerintah lokal yang korup.

Di Jawa Timur, Inggris kesulitan untuk memonopoli pajak pertanian berupa garam karena masyarakat lokal merasa telah membeli kembali tanah yang dijual dari Cina (De Waal 1865, Vol. 3: 252). Rencana untuk mereformasi pendapatan pertanian mengalami kegagalan akibat kondisi sosial politik yang sudah melekat diterapkan oleh Belanda di tingkat lokal. Salah satunya karena Cina adalah pemegang perdagangan terpenting. Di daerah Vorstenlanden, misalnya, rencana Raffles untuk mengambil alih lahan pertanian di wilayah tersebut ditolak oleh Sultan Yogyakarta.

Ketika Raffles dan pasukannya melakukan ekspedisi ke Yogyakarta pada pertengahan Juni 1812, semua gerbang tol di daerah tersebut dalam kondisi terbakar, yang kemungkinan dibawah instruksi Sultan. Menyadari arti penting dari pajak hasil pertanian sebagai sumber pendapatannya selama bertahun-tahun, Sultan ragu-ragu untuk menyerahkannya kepada Inggris. Dalam tahun-tahun berikutnya, pajak

pertanian menjadi konflik yang berkepanjangan antara Sultan Yogyakarta dan Raffles (Carey, 1984: 22-24).

Untuk alasan kemanusiaan, Raffles juga bermaksud untuk menghilangkan opium dan perjudian dalam sistem pertanian yang dianggapnya sebagai sumber degradasi populasi Jawa. Raffles berhasil menghapus sistem perjudian, tetapi rencananya untuk menghapus perdagangan opium di Jawa mendapat pertentangan dari atasannya di Bengal, India untuk tidak campur tangan terhadap perdagangan opium. Dia diperintahkan untuk tidak menyela sistem pertanian opium yang ada di Jawa dan Indonesia. Satu-satunya yang dia lakukan adalah membatasi dan membatasi konsumsi opium dalam bentuk ‘eceran’ di daerah tertentu, seperti pinggiran Batavia, Semarang, Surabaya, dan daerah *Vorstenlanden*.

Kontinuitas program pemerintah untuk pelelangan bidang pertanian seperti opium dapat ditemukan pada iklan pemerintah di Jawa. Pada 24 April 1813, pemerintah mengirimkan undangan pelalangan ke peternakan sapi yang dialamnya terdapat opium di Batavia, Semarang, dan Surabaya, yang akan diselenggarakan dari 15 Mei 1813 hingga akhir April 1814. Akibatnya, Raffles hampir tidak punya pilihan lain selain menjualnya kepada pedagang yang lebih menjanjikan yakni orang – orang Cina (Baudet, 1983: 156-57). Kebijakan ini menunjukkan tidak ada tindakan yang signifikan untuk mengubah pola sistem pendapatan pertanian yang dilakukan Inggris sampai akhir tahun 1816.

Secara umum, kebijakan pemerintahan Raffles diterapkan dengan tidak menghilangkan kebijakan Belanda sebelumnya. Di Belanda sendiri pada tahun yang sama, 1811 – 1815 sedang mengalami pemulihan kerajaan lama akibat peperangan. Setelah putra Stadhouder William V kembali dari pengasingan, kerajaan Belanda menobatkan raja William I pada 30 November 1813. Di periode tersebut, Kerajaan Belanda berada pada situasi sulit karena perekonomian mengalami stagnansi yang panjang sejak pertengahan abad – 18, dan penurunan keuangan untuk membiayai prajurit. Namun pada saat yang sama, Belanda berada dalam posisi aman karena penghasilan dari tanah Jawa sangat menguntungkan. Karena itu, sejak tahun 1816,

Belanda memutuskan untuk melakukan reformasi dan segera merumuskan ‘cetak biru’ kebijakan kolonial yang baru beserta dasar hukumnya.

Pada 1819, tim hukum Belanda merumuskan serangkaian rincian kebijakan dan prosedur yang diputuskan dalam *Regering Reglement*, yang akan diimplementasikan oleh salah satu anggotanya, Baron van der Capellen, sebagai gubernur jenderal. Pemerintahan Van der Capellen berjalan dengan sedikit hambatan, itu karena Capellen memiliki cara untuk mengatasi warisan kebijakan sebelumnya. Meninjau dari seluruh pemerintahan Capellen, Th. Stevens menyimpulkan bahwa pemerintahan Van der Capellen adalah pemerintahan liberal, terutama kebijakan ekonominya yang sangat banyak sejalan dengan ide-ide liberal.

Di antara kebijakan liberal ini yang paling berbeda dari sebelumnya adalah Van der Capellen memberikan hak kepada orang Jawa untuk memilih komoditas pertanian yang sekiranya menguntungkan di pasar, membatasi perpanjangan privatisasi kepemilikan lahan, mempromosikan keterampilan tenaga kerja di perusahaan, dan sebagainya (Stevens, 1982: 231-34). Namun, kebijakan Capellen pada akhirnya gagal untuk mencapai hasil yang diharapkan. Itu karena ralitas sosial – budaya di Jawa tidak memungkinkan untuk diterapkan kebijakan yang bebas seperti itu. Sebuah situasi yang disadari oleh Van den Bosch empat tahun kemudian ketika dia berhasil memperkenalkan keuntungan baru untuk Belanda dengan sistem eksploitasi kolonial yang baru, yakni Sistem Pertanian Budidaya atau Sistem Kultivasi.

Sejauh menyangkut kebijakan fiskal, pemikiran liberal Van der Capellen tidak muncul dengan metode baru. Bahkan, dia tetap bertahan tetapi bahkan memperluas sebagian besar sumber pendapatan, termasuk pendapatan pertanian. Pertanian pajak opium diperkenalkan pada 1806 diperluas ke seluruh pulau kecuali Priangan, dan sekarang didukung dengan pembebasan tarif impor komoditi. Pembukaan kantor pegadaian pertama kali memiliki perpanjangan hak eksklusif pada tahun 1814 di Batavia, dan diperluas ke distrik – distrik utama Jawa. Aktivitas perjudian Cina (*dobbelspelen*) yang menjadi salah satu komoditas pendapatan pemerintah, notabene

dihentikan selama Pemerintahan Inggris diperkenalkan kembali pada tahun 1817. Perjudian dengan sistem pajak baru yang dimasukkan sebagai bagian dari sistem pertanian setelah tahun 1821.

Para pengusaha Cina akan tetap dominan sebagai pengontrol pendapatan di bidang pertanian, bahkan lebih berkuasa setelah tahun 1819, ketika Van der Capellen mengadopsi gagasan Daendels untuk mengeluarkan plakat yang melarang bupati melakukan perdagangan dan bisnis lainnya, dan mengubahnya menjadi pejabat bawahan dengan gaji tetap tanpa lebih banyak klaim atas tanah, pensiunan, dan hak – hak feodal lainnya. Karena adanya stigma di kalangan pejabat Belanda yang memandang ‘Bupati’ atau pengusaha lokal terlalu ‘korup’ yang dapat mempengaruhi legitimasi Pemerintah Belanda.

Kebijakan Belanda selanjutnya saat pergantian rezim di tahun 1818 adalah menghapuskan beberapa pajak di daerah Tegal, Jawa Tengah. Pajak yang dihapuskan diantaranya : perusahaan persenjataan yang mikro di Gresik, penjualan daun sirih dan denda penjualan kapur, pertunjukkan tari Ronggeng di Banten dan Tegal, Perusahaan Gula di daerah Tuban, penjualan arang di Tegal, dan kayu bakar di Banten, menyusul pajak penjualan lilin dan pasar besar dihapuskan pada tahun 1823 dan 1824. Kapal niaga berhenti untuk dikenakan pajak di Batavia dan Banten tahun 1824 dan 1826. Pajak di bidang perhubungan seperti pintu tol di wilayah Pekalongan, Kedu, Semarang dan Yogyakarta mulai diberlakukan setelah selesai pada tahun 1827. Pembangunan tol yang memanjang dari ujung barat Jawa hingga ujung Timur ini juga menjadi penyebab terjadinya Perang Jawa di daerah Vorstenlanden (De Waal, Vol. V: 301-303). Kesimpulannya dari pandangan historis, dapat dikatakan bahwa selama empat bentuk pemerintahan dari tahun 1795 – 1826 : (1) sistem Merkantilisme, (2) pemerintahan *Lodewijk* (Perancis – Belanda), dan (3) Sistem Kultivasi Belanda selama beberapa dekade, pada akhirnya proses kelembagaan tetap berlangsung di Jawa. Sistem kelembagaan yang eksploitatif dari bentuk merkantilisme hingga transisi menuju liberalisme tetap bertahan dan menghasilkan banyak keuntungan, baik di wilayah Jawa dan diluar pulau Jawa.

BAB 5. Pembentukan Surplus Keuntungan Kolonial Belanda di Indonesia

Pembentukan surplus keuntungan kolonial diawali dengan transisi kebijakan merkantilisme dalam bentuk sistem kultivasi (budidaya) yang berasal dari sistem tanam paksa. Sistem kultivasi adalah sistem yang cukup mewakili kondisi pra kapitalis masyarakat (Boeke, 1953), yang melakukan kegiatan ekonomi sebatas pada pemenuhan kebutuhan sehari – hari. Selama masa pemerintahan Belanda, masyarakat mengalami drainase ekonomi, yang mengharuskan keuntungan hasil pertanian diserahkan kepada bupati, priyayi, ataupun kontrolir Belanda. Keuntungan sistem kultivasi adalah awal dari terbentuknya keuntungan dari sistem ekonomi yang bebas, dimana pemerintah tidak dibatasi haknya dalam hal pengambilan keuntungan. Karena pada masa merkantilisme, pemerintah diharuskan melakukan produksi bahan mentah, dan menanggung kebutuhan infrastruktur, serta pengeluaran untuk perang. Sedangkan di masa penerapan ekonomi liberal di tahun 1870, pemerintah hanya berperan sebagai agen ekonomi, penyedia keamanan, dan sebagian infrastruktur, yang artinya segala pengeluaran diserahkan kepada pihak swasta.

Surplus keuntungan kolonial Belanda mencakup beberapa bidang yang dianggap penting diantaranya : surplus keuntungan di bidang perkebunan (seperti: nila, jarak, kopi, candu, the, dan lainnya), dan surplus keuntungan di bidang pertambangan termasuk minyak bumi. Surplus keuntungan di bidang perkebunan telah mengalami pembudidayaan sejak masa Daendels, yang dilanjutkan oleh Van der Capellen dalam sistem Kultivasi. Sedangkan surplus keuntungan kolonial di bidang pertambangan, eksploitasi baru dilakukan pemerintah Belanda ke wilayah luar Jawa sekitar tahun 1879, dimulai dari Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Belanda melakukan ekspansi melalui elit lokal seperti: Bupati dan priyayi untuk memudahkan perijinan melakukan pengeboran di wilayah – wilayah tersebut.

Total surplus keuntungan Kolonial Belanda selama periode 1870 – 1941 dijelaskan berdasarkan data arsip, dan laporan penelitian. Tentu keuntungan yang

tertera dalam nominal adalah catatan – catatan para pegawai Belanda, atau orang pribumi yang menjadi asisten. Namun data yang ada tidak secara keseluruhan dicatat setiap tahunnya, diantaranya disebabkan oleh :

1. Faktor geografis seperti, gempa bumi di Jawa akibat letusan gunung merapi dan gempa gunung Rinjani di Bali pada 1867 dan 1917 yang mengakibatkan beberapa bangunan hancur dan beberapa arsip mengalami kerusakan atau hilang;
2. Adanya petugas Belanda yang melanggar kesepakatan kerja dengan tidak mencatat laporan pemasukan dan pengeluaran kepada negara induk, seperti pada kasus Daendels yang arsipnya berisi tentang pendapatan masa Daendels hanya di daerah Batavia;
3. Terbatasnya penghitungan surplus keuntungan secara keseluruhan, Keuntungan dari perusahaan swasta yang dihitung oleh majalah *De Bussy* tahun 1925 terbitan *Leiden University*, sebagai satu – satunya sumber koran yang berisi tentang perusahaan – perusahaan Petrolum Belanda di Indonesia.
4. Saham yang didapat oleh perusahaan negara ataupun privat, tidak secara keseluruhan diekspos dalam arsip – arsip Belanda. Saham dapat dideteksi melalui jumlah pendapatan satu perusahaan di beberapa tahun tertentu selama periode 1870, 1890, dan 1930.
5. Pengaruh Perang Dunia I dan Perang Dunia II menyebabkan beberapa kerugian diantaranya penurunan harga, turunnya saham akibat penyerangan blok sentral, berdampak ada hancurnya kota Rotterdam Belanda. selain itu, sengketa antara Inggris dan Perancis berpengaruh terhadap ketakutan investor untuk menanam saham di wilayah kekuasaan Belanda. Namun kekhawatiran ini dapat diatasi kemudian dengan promosi yang dilakukan pemerintah dibantu elit Belanda. Keterbatasan informasi yang masa itu dicatat dan tidak ada pemusnahan kecuali terkena bom ataupun serangan dari penjajah Jepang. Penyerangan Jepang

untuk menguasai salah satu anak perusahaan *Royal Dutch Shell*, yakni *Bataafsche Petroleum Mij* (BPM) di Tarakan, menjadi salah satu sebab catatan keuntungan hanya berhenti di tahun 1907.

Dari beberapa penjelasan diatas, surplus keuntungan kolonial dapat dijelaskan pada pembahasan selanjutnya mencakup transisi keuntungan sistem kultivasi, surplus keuntungan kolonial di bidang perkebunan dan pertambangan dengan data – data yang didapat salah satunya dari buku pegangan Belanda yang dicetak oleh Leiden University, dan laporan penelitian lainnya seperti milik Anne Booth, Alec Gordon, Van der Eeng, J. S Frunivall, Trocki, Soussa, dan lainnya.

5.1 Transisi Keuntungan Sistem Kultivasi

Transformasi terpenting dalam sistem kultivasi adalah masyarakat kolonial mulai diperkenalkan dengan menanam tanaman yang umumnya tidak untuk dikonsumsi sehari-hari oleh masyarakat, seperti kopi dan tanaman indigo. Daerah *frontier* (perbatasan) yang melakukan itu adalah kawasan Priangan di Jawa Barat. Disinilah kemudian, kapitalisme awal di Indonesia menghasilkan wajah dualismenya dimana masyarakat koloni mulai mengenal tanaman untuk konsumsi pribadi dan tanaman yang mampu menghasilkan uang kontan. Di sisi lain, meningkatnya produksi karena disebabkan tingginya peningkatan populasi, dan bukan karena peningkatan intensifikasi teknologi. Sehingga kebutuhan akan buruh murah bahkan tidak bayar tidak jarang terjadi selama berlangsungnya sistem kultivasi.

Kesenjangan antar kelas dan ras diperburuk pada sistem tanam paksa pada pertengahan abad 19 menyebabkan ekonomi masyarakat pribumi semakin tertinggal dibanding kelas menengah Cina dan masyarakat Eropa. Sepanjang tahun 1815 hingga 1830, jumlah aparatus administratif dan jenjang-jenjangnya semakin meningkat, yang bertujuan untuk mengatur administrasi populasi dan pajak (Furnivall, 1939 : 191). Jawa juga mensuplai kuli murah yang dianggap sebagai aset kemajuan ekonomi karena penduduk mereka mempunyai penduduk yang padat dibanding kepulauan lainnya (ibid, 289-290, 349). Di bawah sistem tanam paksa, Jawa mempunyai

peranan signifikan dalam memproduksi produk-produk komoditas global seperti : tembakau, teh, dan tanaman indigo.

Transisi sistem kultivasi membahas mengenai keuntungan sistem sebelumnya terutama masa kepemimpinan Daendels, sebagai dasar pembentukan sistem kultivasi dan sistem politik Ekonomi Liberal

5.1.1 Keuntungan Sistem Tanam Paksa

Secara politis, pajak sebagai instrumen untuk memperkuat kontrol dan legitimasi, dan memodernisasi struktur organisasi atau infrastruktur negara (Ardant, 1975: 166-69). Khusus permasalahan di Jawa, eksploitasi dilakukan berturut – turut oleh transisi rezim untuk menghasilkan pendapatan besar di bidang pertanian, untuk membiayai kebutuhan negara induk. Selama pemerintahan Daendels, pendapatan pertanian menyumbang sejumlah besar keuntungan ke kas pemerintah. Laporan tidak resmi yang diterbitkan tahun 1814, Daendels mengklaim itu sampai 13 Maret 1811 pendapatan pertanian telah menghasilkan total total 5,25 juta koin perak *dollar Spanyol* (Rds) dan 5.07 juta dalam bentuk uang kertas.

Pada tahun pertama menjabat sebagai gubernur, pendapatan pertanian menghasilkan 1,54 juta uang tembaga Spanyol dan dalam bentuk uang kertas dari lima daerah pertanian utama yaitu : Batavia, Cirebon, Banten, Semarang dan Surabaya. Jumlah ini bertambah tiga kali lipat dari tahun sebelumnya yang hanya berkontribusi Rds. 685.167. Jika perhitungan ini tepat, maka pendapatan dari bidang pertanian berkontribusi lebih banyak dari sepertiga total pendapatan pemerintah tahun itu yang berjumlah 5,3 juta dolar Spanyol. Jumlah ini akan jauh lebih besar jika laba dari perdagangan opium dimasukkan dalam perhitungan sebagai hasil pertanian, yang berkisar Rds. 88.246,48. Untuk perhitungan dua tahun berikutnya setelah 1814, sayangnya Raffles tidak merinci jumlah kontribusi pendapatan pertanian dari total pendapatan pemerintah (Daendels 1814, *Bijlagen 2*, tabel no. 64).

Bataviasche Koloniale Courant menyediakan sebuah jurnal pendapatan dari hasil pertanian di Jawa dari tahun menyediakan 1809 hingga 1810. Di Batavia,

misalnya, pendapatan pertanian pada tahun 1810 sebanyak Rds. 889.440, kurang dari tahun sebelumnya jumlahnya Rds. 1.007.552. Tapi mengalami peningkatan pada tahun 1811 berjumlah 1,18 juta *Rijksdaalders* seiring dengan kedatangan lebih banyak kapal asing dan komoditas yang datang ke kota. Dari Banten,

Pemerintahan Daendels pada tahun 1810 memperoleh banyak penerimaan uang dalam bentuk koin perak senilai Rds. 6648. Dari Cirebon, pemerintah menerima pendapatan sebesar Rds. 24390, selisih Rds. 135 daripada pendapatan tahun 1809. Di wilayah timur laut, pendapatan hasil pertanian pada tahun 1810 adalah sebagai berikut: (1) dari Semarang dan sekitarnya sejumlah Rds. 435.405, lebih banyak dari tahun sebelumnya yang hanya Rds. 102.630, (2) di Jawa Timur, terutama dari wilayah Tuban, hasil panen meningkat dari Rds. 61.035 pada tahun 1809 ke Rds. 288.975, (3) di pantai utara, pendapatan meningkat pada tahun 1810 dengan keuntungan sebesar Rds. 724.380, meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak Rds. 163.665.

Tabel 5.1.1.1

Hasil Pendapatan Pertanian di Batavia dan Banten Selama Pemerintahan Daendels
(dalam dollar Spanyol / *Rijksdaalders*)

No	Keuntungan Pertanian	1807	1808	1809	1810	1811
1	Ekspor dan Impor Kenegaraan	33,000	37,800	21,000	17,300	22,200
2	Impor kain Eropa	7,300	6,700	5,200	1,670	3,800
3	Toko dan perdagangan Sayuran	4,500				
4	Pajak Perseorangan Cina	1,850	1,900	1,800	1,670	1,690
5	Pemotongan Ternak	850	900	1,040	1,240	1,540
6	Pemotongan babi, kambing, dan domba	1,450	1,72	1,58	1,56	1,530
7	Tembakau orang – orang Cina	850	1,850	1,040	800	1,230
8	Perdagangan Lilin	300	300	300	320	290
9	Perdagangan dan ekspor beras	230	220	230	240	230
10	Penginapan didalam dan diluar kota	480	550	510	420	370
11	Penghasilan Pertunjukkan Pertarungan	190	220	210	320	430
12	Perjudian Cina	6,300	7,800	6,900	8,350	12,000
13	Pasar Ikan	4,600	6,500	5,900	5,800	7,520
14	Pembelian rumah	2,200	2,700	2,050	1,950	1,740
15	Pertunjukkan Wayang	1,600	1,770	1,670	1,630	1,650
16	Perdagangan Kapal dan Pelayaran	400	400	410	350	310
17	Ekspor gula	-	-	-	-	900
18	Pertanian Banten (<i>Bantamsche pagten</i>)	-	-	2,922.32	4,000	4,000
19	Ekspor – Impor dan Perdagangan Candu	-	-	26,600	22,00	30,600
Jumlah Total		876,000	1,015,560	1,007,552	889,440	1,158,360

Sumber : *Daendels 1814, Bijlagen II, table no. 42. Verpagtingen*

Laporan lengkap diatas merupakan kontribusi dari pendapatan pertanian pada periode pemerintahan Daendels, noatebene hanya wilayah Batavia dan Banten yang terungkap. Sisanya adalah penghitungan lokal yang dibuat pejabat daerah. Tabel 4.1.1 menunjukkan pendapatan pemerintah dari sembilan belas jenis pertanian selama periode 1807-1811. Berkat kebijakan yang tegas, sejak kedatangannya, Daendels berhasil mengumpulkan pendapatan total Rds. 4,946,912, dengan rata – rata kontribusi sebesar Rds. 989.382,4 per tahun, atau Rds. 82,448.46 setiap bulan baik dalam bentuk uang kertas maupun hasil kredit.

Dari Tabel 5.1.1.1 juga dapat dilihat perkembangan ekspor dan bea cukai dari opium sejak tahun 1809 terus meningkat jumlahnya sebagai komoditi terbesar kedua, diikuti oleh impor kain Eropa, dan perjudian Cina. Memang dua hal ini menjadi pendapatan yang sudah lama diterima Belanda sejak periode VOC. Candu khususnya, menurut sebuah penelitian terbaru, sebenarnya menjadi sumber pendapatan perusahaan yang lebih penting dan berkontribusi lebih banyak daripada yang tertulis pada literatur. Souza membuktikan bahwa lebih dari 62% dari total perdagangan VOC, sebanyak 52% berasal dari perdagangan opim (Souza, 2009 : 129-30).

Pada akhir abad – 18, candu adalah komoditi dengan penjualan tertinggi di Jawa yang berkembang menjadi barang mewah. Ini adalah bentuk konsumsi baru dari struktur sosial Jawa. Satu hal penting candu adalah inovasi metode merokok terbaru yang dicampur dengan tembakau secara bersamaan. Menurut Trocki, praktik ini merupakan teknologi yang asli dikonsumsi dari Cina, dimana orang Jawa kemudian mempelajarinya (Trocki, 1999: 35-36).

Selama pemerintahan Raffles, Inggris tidak mampu menghentikan perdagangan yang sangat menguntungkan bagi perdagangan internasional. Sementara komoditi pertanian dari sistem sewa tanah dan pengirim kopi menjadi pendapatan utama, pemerintah secara terus – menerus mendapatkan pemasukan penjualan dari candu. Hal ini dapat dilihat pada nilai impor candu yang meningkat dibawah pemerintahan Raffles menjadi Rds. 73.250 per tahun dari Rds. 54.000 selama periode

1806 – 1811. Meski demikian, usaha Raffles untuk membatasi perdagangan candu dikarenakan berdampak pada kematian tertinggi di pulau Jawa dapat dikatakan mengalami peningkatan, dengan berhasil mengurangi tingkat konsumsi dari 1/84 pon di 1805 ke 1/133 pound per orang di Jawa. Namun juga tidak jarang konsumsi candu ini menjadi ‘kecanduan’ di kalangan orang Jawa di tahun – tahun terakhir sampai 1850 (Baud, 1881: 158-60). Ironisnya hanya sedikit data tentang keberhasilan kinerja Raffles yang tercatat dalam arsip, pendapatan yang dihasilkan selama pemerintahan Raffles mendapat tempat ‘inferior’ dalam sejarah Inggris.

Dari data statistik siatas, dapat disimpulkan bahwa pertanian menjadi sumber terpenting bagi keuangan negara. F.W. Diehl, misalnya, menyajikan laporan kuantitatif pertama yang mengestimasi pendapatan Belanda dari hasil pertanian. Diehl menggabungkan data statistik dari laporan resmi, dia menghitung bahwa dari tahun 1816 - 1825 pendapatan pertanian dari semua daerah bawahan Belanda setelah dikumpulkan mencapai 27,6 juta gulden, hampir setengahnya sekitar 14,8 juta gulden diperoleh dari hasil pertanian opium / candu, sedangkan sisanya 12,8 juta gulden diperoleh dari pajak peternakan, dan pajak lainnya. Secara total, pendapatan pertanian dalam periode ini berkontribusi sekitar 15,3 persen dari total pendapatan yang dikumpulkan di Belanda di Jawa. Dekade berikutnya tahun 1826-1835, kontribusi pendapatan pertanian mencapai dua kali lipat sebesar 51,3 juta gulden atau 19,3 persen dari total pendapatan pemerintah. Sekitar 61 persen dihasilkan dari opium sekitar 31,3 juta gulden, dan sisanya 20 juta gulden berasal dari bidang peternakan lainnya (Diehl, 1993: 199).

Pendapatan skala nasional tidak memberikan informasi mendetail mengenai keuntungan Belanda di bidang pertanian selama sebelum diterapkannya politik Ekonomi Liberal. Komposisi pertanian terutama dari orang – orang yang berada di industri peternakan kecil tidak terdeteksi jumlah pajak yang diberikan kepada pemerintah, atau istilahnya *kleine verpachtingen* (pajak kecil pertanian). Faktanya, menurut De Waal, mantan direktur kolonial keuangan Jawa, hasil pendapatan dari pertanian kecil itu cukup memberikan pengaruh bagi kehidupan sehari – hari

penduduk lokal yang menggabungkan penanaman candu di perkebunannya, dan sering menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah lokal.

Dalam lima tahun pertama dari 1817-1821, pasar pertanian berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar 2,8 juta gulden dari seluruh Jawa, dan meningkat hampir dua kali lipat dalam lima tahun kedua sejumlah 4,9 juta gulden. Dalam artikelnya yang sangat kritis, L. Vitalis menjelaskan sebab mengapa peternakan menjadi komoditi sangat menguntungkan bagi pemerintah, serta bagi petani Cina. Dia mengatakan bahwa semua harus dilakukan dengan sifat eksploitatif untuk memperoleh pajak dari orang Jawa. Vitalis dengan tegas menyebut pertanian ini sebagai *de zwaarste en de kwellendste*, pertanian paling berat dan paling kejam sejak tahun 1821, yang secara terus menerus disalahgunakan oleh para penyewa tanah, orang – orang Belanda dan Cina. Mereka melakukan ‘pemajakan’ bagi petani yang ingin menjual hasil pertaniannya kepada mereka (penyewa). Barang yang dijual kepada penyewa dikenai berbagai pajak seperti: pajak transit, pajak bahan baku industri, dan pajak produk, baik secara tunai atau kredit. Para petani pajak seperti Cina pada akhirnya sering mengekstrasi kembali pajak sampai enam kali dalam beberapa tahun agar sesuai dengan permintaan pemerintah. Dalam jangka panjang, pendapatan di bidang peternakan terhambat dengan adanya perdagangan lokal yang selanjutnya mempengaruhi kegiatan industri kecil dan kerajinan. Baru pada tahun 1850 –an pasar pertanian dihapuskan karena menimbulkan keresahan diantara pedagang Jawa (Vitalis, 1851: 364-67; Diehl, 1993: 220).

Singkatnya, bidang pertanian dan opium memberi kontribusi cukup besar pada keuangan negara induk selama tiga dekade pertama abad – 19. Sistem pengambilan pajak melalui pertanian, dengan Cina sebagai pedagang utama terus dipertahankan pemerintah sebagai formasi dasar pembentuk keuntungan negara, sebagai biaya reformasi politik di Belanda. Para sejarawan setuju jika reformasi anta tahun 1808 dan 1826 berhasil membangun negara Indonesia yang tersentralisasi kepada Belanda. Jawa dibangun diatas birokrasi ‘modern’ yang secara sadar merangkul elit setempat, kemudian memberi kesepakatan keuntungan pertanian yang

harus diberikan kepada pemerintah selama abad – 19. Periode transisi yang terjadi dari merkantilisme menuju terbentuknya negara kolonial (liberal), merupakan fakta bahwa pemerintahan transisi cukup berhasil di Indonesia dengan meningkatnya keuntungan pendapatan pajak pertanian, yang memperkuat kontrol pemerintah atas tanah Jawa. Jawa sebagai daerah eksploitasi negara induk, dengan mengorbankan banyak tenaga kerja dan sumber daya, serta beberapa kesulitan lainnya akibat faktor politis.

Peningkatan keuntungan perpajakan melalui pendapatan sistem pertanian telah membebani penduduk seperti kasus pasar pertanian yang harganya merugikan penduduk dan kasus perdagangan candu. Selain itu, hasil dari pencapaian keuntungan dalam program kebijakan fiskal dialokasikan kurang menguntungkan bagi investasi jangka panjang yang produktif, sedangkan birokrasi belum memberikan hukum yang cukup melindungi pedagang besar. Akibatnya, pengeluaran negara berkembang lebih cepat daripada pendapatan negara, terutama di masa perang Napoleon, juga karena invansi Inggris yang membuat produk lokal kurang kompetitif. Namun penyebab utama defisitnya kebijakan ekonomi liberal pada dekade awal tahun 1830 adalah Perang Jawa dari 1825 – 1830 (Van Zanden & Daan Mark, 2012: 43-44).

Peperangan menghancurkan prestasi negara dan menggagalkan kebijakan liberal yang membuka terciptanya ‘negara modern; di Jawa. Maka pada pembentukan kebijakan ekonomi liberal di dekade selanjutnya lebih berfokus pada pembukaan lahan di luar Jawa, penyewaan lahan, penarikan pajak, dan penanaman modal asing.

5.1.2 Keuntungan Sistem Kultivasi

Sistem kultivasi adalah bentuk sistem kapitalis awal dibawah kepemimpinan Van den Bosch yang bertugas meneruskan sistem budidaya Daendels. Sistem kultivasi berkaitan dengan penerapan pajak. Pembentukan negara yang dilakukan Belanda sampai tahun 1900 yang ditandai dengan diterapkannya Politik Etis 1901, bertujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar. Salah satunya dengan cara menyediakan fasilitas sekolah – sekolah dalam bentuk formal dan informal untuk

membentuk tenaga kerja terlatih dan murah untuk membangun infrastruktur dan berperan sebagai tenaga buruh pabrik di perusahaan – perusahaan Belanda dan swasta. Pembentukan kebijakan Belanda yang semula berbentuk merkantilisme berubah kearah industri seiring dengan pergantian kebijakan yang mengarah pada sistem ekonomi liberal.

Mengingat daerah penjajahan Belanda tersebar di Afrika, dan kepulauan Karibia, membuat Van Den Bosch berpikir untuk mendapat bahan baku lebih murah dibanding harus mengambil dari Pulau Karibia. Begitu yang tertulis dalam surat Bosch kepada Raja William I tahun 1829 agar diijinkan untuk melakukan eksploitasi tanaman gula dengan cara budidaya. Dia menulis bahwa selama orang – orang Jawa tidak menemukan komoditas yang lebih menguntungkan selain padi, maka mereka tidak akan mengubah tanaman tersebut. Jawa memiliki kekayaan tanah subur dengan jumlah tenaga kerja yang banyak.

Selama ini pasar nomor satu di Eropa adalah Karibia, jika Jawa dapat menyaingi komoditi gula dan kopi, pemerintah Belanda akan mendapat keuntungan sangat besar. Bosch berasumsi masyarakat memiliki minat untuk mengganti tanaman padi ke tanaman komersial seperti kopi dan gula, yang produksinya sekitar 120 hari (Van den Bosch 1829: 305, 13). Ironinya, sampai di akhir tahun 1830, masyarakat tidak memiliki minat untuk ikut mengembangkan tanaman komersial. Padahal tanaman tersebut sudah ditanam sejak era VOC. Para sejarawan berasumsi jika kepemimpinan Bosch kurang mendapat sambutan oleh masyarakat dibanding Daendels dan Raffles. Hingga tahun 1930, Bosch menggantinya dengan sistem Kultivasi atau sistem tanam paksa.

Pada tahun 1830, seperangkat kebijakan dikenal sebagai Sistem Budidaya (Cultuurstelsel) dilaksanakan untuk menutupi biaya pengeluaran kolonial yang tinggi di Jawa. Perang Napoleon, sebagai peristiwa internasional yang mempengaruhi sejarah kolonial, dan perang Belgia yang bersatu dengan Belanda pada 1812, membuat keuangan Pemerintah semakin melemah. Bosch berpendapat bahwa sistem budidaya atau sistem tanam paksa akan menguntungkan keduanya penjajah dan

terjajah. Bahkan, itu membawa Belanda untung besar, menambah konsumsi penduduk asli yang berarti menambah penghasilan luar negeri pemerintah, pejabat Eropa dan Cina semakin kaya dengan tingginya pendapatan, namun beban yang paling berat akan dirasakan oleh penduduk desa di Jawa.

Sistem Budidaya secara teoritis diperlukan agar desa yang berpartisipasi menanam tanaman ekspor akan mengumpulkan dana yang cukup, salah satunya untuk memenuhi wajib pajak pertanian kepada pemerintah. Tanaman ekspor yang paling menguntungkan diantaranya: kopi, gula, nila, teh, kayu manis, merica, tembakau, kapas, sutera, dan cokelat yang dijual dengan harga tetap kepada pemerintah, sehingga ketika dijual ke pasar Eropa harganya akan tinggi dan surplus keuntungan didapat Belanda. dijual kepada pemerintah dengan harga tetap.

Dalam catatan P.B.R. Carey (1979 : 82 – 85), sistem budidaya membawa perubahan besar pada Jawa periode 1830 dan 1850, kecuali di daerah Banten. Itu karena petani disana sudah merasa cukup puas dengan penanaman padi yang ada, juga disebabkan kematian yang tinggi akibat konsumsi candu. Kemajuan selanjutnya dari sistem ini adalah meningkatnya populasi penduduk yang merupakan fertilitas natural akibat beroperasinya sistem budidaya selama tiga puluh tahun. Van Luiten (2010 : 1 – 28) menyebutkan bahwa sistem bekerja dengan baik hanya pada awalnya di tahun 1830.

Produksi ekspor gula dan kopi di awal tahun 1830 – 1870 mengalami perubahan signifikan. Ekspor gula dan kopi (dan nila) meningkat dramatis: output kopi dari 20.000 ton pada tahun 1829 menjadi 64.000 ton pada 1839, dan output gula dari 6.700 ton pada 1831 menjadi 58.000 ton pada 1840. Kenaikan ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang Jawa untuk dijadikan negara kolonial. Mekanisme penanaman tanaman ekspor dilakukan dengan tahapan : (1) Pemerintah pusat mengalokasikan ke berbagai residensi untuk penanaman kopi gula dan nila, yang diteruskan ke wilayah Kabupaten untuk menanam tanaman ekspor dalam jumlah yang proporsional, misalnya daerah Timur Jawa penanaman kopi, sisanya menanam nila, (2) harga yang ditetapkan harus kompetitif untuk dijual ke pasar

Eropa. Penanaman tanaman ekspor ini dengan catatan pemerintah belum sama sekali membuka kesempatan bagi pengusaha swasta dan asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Catatan bahwa petani dan administrator lokal Indonesia memang tidak memiliki pengalaman untuk berjualan di Pasar Eropa, dan pengalaman yang minimal untuk mengolah produk pertanian, serta menjaga kesuburan tanah, namun Bosch cukup memberi contoh kepada penduduk asli tentang penanaman tanaman ekspor. Menurut penelitian beberapa sumber, salah satunya Wahid (2012 : 255 - 268) mengungkapkan bahwa tidak ada ilmuwan Belanda yang mampu memprediksikan tingkat kesuburan tanah di Jawa, dan bagaimana dampak dari 'sawah' yang ditanami dengan tanaman berbeda dengan jangka waktu berdekatan, dapat mempengaruhi fertilitas tanah. Pengetahuan mengenai ilmu tanah masih sangat sedikit pada periode tersebut. Sejarawan Van Niels (1979 : 101 – 103) mengungkapkan di tahun 1870, terdapat beberapa hektar di wilayah Jawa mengalami kerusakan akibat penanaman tanaman ekspor, yang berdampak pada persediaan beras penduduk lokal.

Dalam sistem ini, Bosch menghadiahkan para petani yang berhasil menanam tanaman ekspor berupa uang, yang akhirnya digunakan untuk membayar sewa tanah. Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah penyediaan tenaga kerja untuk membawa tanaman ke gudang negara, pembangunan jalan, dan pemrosesan tanaman gula di pabrik gula. Sistem Kultivasi dinilai memiliki masalah, kompensasi moneter untuk pembayaran tenaga kerja ini sangat rendah (Elson 1994 dan Fasseur 1975).

Namun, yang menakjubkan, sistem ini bekerja dengan sangat baik selama dekade pertama, produksi ekspor tumbuh dengan cepat. Keberhasilan awalnya adalah hasil dari sejumlah faktor. Pertama, negara kolonial merekrut kerja sama elit lokal dan regional (kepala desa dan anggota kelas priyayi yang lebih tinggi) dengan memasukkan mereka ke dalam sistem. P.B.R Carey (1979 : 84 – 85) melihat status priyayi dalam tataran patriarki menjadi nilai tambah bagi terlaksananya sistem kultivasi. Asisten residen dan kontroler diisi orang – orang Belanda yang juga harus mendapat persetujuan oleh Bupati yang diisi oleh orang lokal. Priyayi menjadi

perantara dalam jalur komunikasi perekonomian liberal yang dapat memperkuat status sosial mereka, dan beberapa hak istimewa yang sebelumnya dibatasi Raffles, kini dipulihkan. Demikian pula klaim mereka untuk bagian dari sawah diakui (Sutherland 1979: 12).

Tujuan penting Bosch adalah sifat turun menurun ‘priyayi’ yang akan mempermudah pemerintah untuk mempengaruhi petani agar menanam tanaman ekspor. Ini adalah cara dari sistem liberal untuk mengurangi kekuasaan priyayi terhadap tanah. Timbal baliknya adalah para priyayi memperoleh hasil panen tanaman ekspor (*kultuurprocenten*), yang memberi mereka insentif kuat untuk bekerja sama dengan kebijakan baru. Sistem Tanam Paksa menghasilkan multiplier ekonomi kepada elit lokal dan pemerintah. Bupati menjadi sangat kaya dan kuat kedudukan, dan Pegawai negeri Belanda yang juga menerima bagian dari *kultuurprocenten*.

Tidak hanya elit lokal yang dimasukkan ke dalam sistem baru. Pedagang Cina juga memainkan peran besar, khususnya dalam pemrosesan gula, di mana mereka memiliki keahlian dan kewirausahaan yang tinggi. Keberhasilan awal yang dimonopoli oleh pemerintah bekerjasama dengan pengusaha gula Cina hampir mengabaikan pasar. Keduanya mendirikan pabrik – pabrik baru di desa, sehingga banyaknya pekerja tak terbatas dari desa – desa sekitarnya. Dapat dipastikan bahwa, harga tebu yang dijual kepada pemerintah dan pengusaha Cina adalah harga yang sama, monopoli harga (Fasseur 1975: 65). Keberhasilan awal Sistem Tanam Paksa mendamaikan kepentingan tiga elit dari negara – kolonial (elite Belanda), elit Jawa dan pedagang Cina.

Rekonsiliasi ini menghasilkan identitas dan struktur sosial budaya yang cukup ketara. Dalam pengembangan sistem tanam paksa, bupati adalah pelayan terpercaya bagi pemerintah kolonial. mereka dianggap sebagai ‘saudara termuda’ Residen Belanda, kemudian asisten residen dan kontroler sebagai jabatan paling tinggi yang dijabat oleh penguasa lokal. Bahkan, struktur baru yang muncul terdapat ‘dua birokrasi’ yang saling berdampingan, yakni : administrasi formal dijabat oleh warga sipil kelahiran Belanda, dan 'struktur sosial-politik' masyarakat adat Jawa, yang

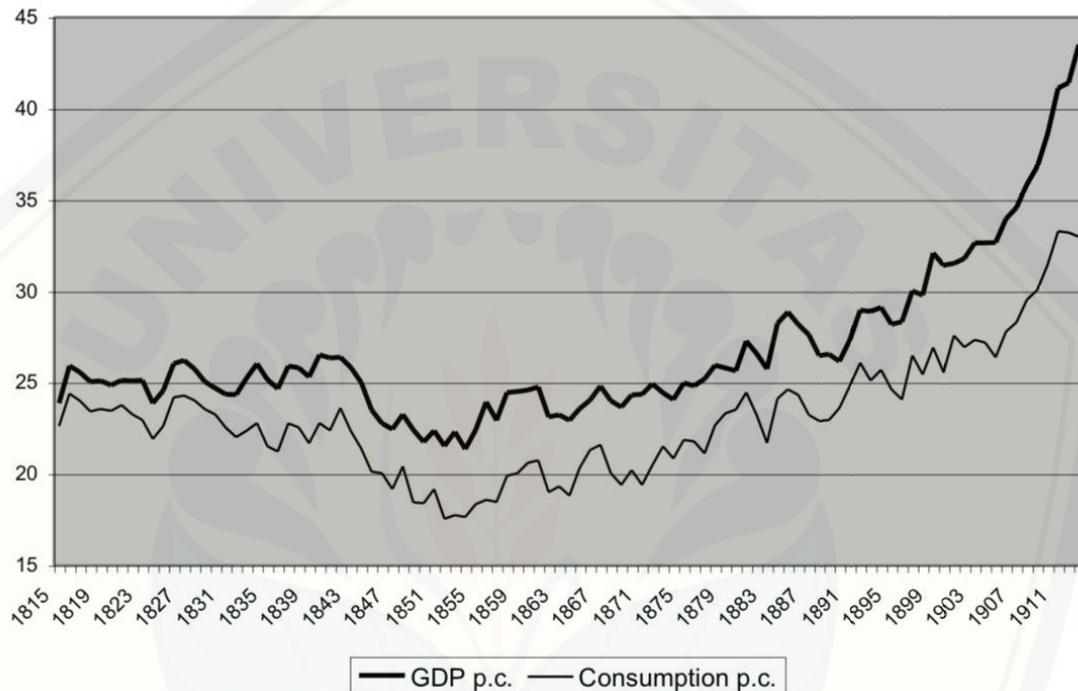
hubungan keduanya seperti patron – klien, saling melindungi dan memberi hadiah, seperti yang terdapat pada adat Jawa.

Administrator Belanda tertinggi dianggap sebagai 'adik bungsu' (yaitu penasihat intimnya) dari bupati setempat, yang dijabat oleh elit pribumi dan pengaruhnya sangat besar di masyarakat. Dalam sistem sosial ini, menghasilkan hubungan vital antara individu Jawa sebagai penguasa lokal, dan orang Eorpa sebagai atasan mewakili pemerintah. Dalam jangka panjang, struktur sosial yang terbentuk ini dapat berpengaruh terhadap kesatuan masyarakat yang berkembang menjadi sebuah bangsa (Elson, 1994: 261-4).

Seperti disebutkan sebelumnya, bagaimana Sistem Tanam Paksa mempengaruhi kondisi sosial ekonomi jangka panjang masyarakat Jawa adalah mengenai kenaikan pendapatan yang luar biasa berbanding lurus dengan biaya produksi (Elson 1994: 301-22; Booth 1998: 93-95). Produksi ekspor naik luar biasa, tetapi dengan biaya tinggi. Selain itu, 'kemakmuran' dari tahun 1830 diikuti dengan adanya wabah kelaparan tahun 1840-an, merupakan bagian dari faktor – faktor yang dapat mempengaruhi surplus yang didapat pemerintah. Ada yang menilai kelaparan dikaitkan dengan kerusakan tanah yang ditanami tanaman ekspor secara terus – menerus yang mengganggu persediaan tanaman padi. Selain itu, masyarakat lokal yang menjadi buruh juga hanya dibayar sedikit dari besarnya keuntungan pemerintah, elite lokal, dan Cina. Beberapa penelitian mengasumsikan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang meningkat selama tahun-tahun ini, dengan argumen pada dasarnya bahwa peningkatan pendapatan ekspor dari tanaman komersial pasti memiliki dampak yang menguntungkan pada kesejahteraan ekonomi (Maddison 1989; Booth 1998: 15-9). Namun interpretasi dari Booth dan Madison ini mengabaikan penurunan usaha tekstil di beberapa wilayah. Jika ingin mengukur kesejahteraan di negara kolonial, ukuran yang lebih tepat adalah menghitung konsumsi per kapita dengan mempertimbangkan tingkat investasi selama sistem berlangsung. Nilai investasi selama sistem kultivasi meningkat dan sebagian besar

hasilnya diambil oleh pemerintah belanda dalam bentuk 'batig slot', merupakan surplus keuntungan kolonial yang dialihkan ke negara Induk, Belanda.

Gambar 5.2.1.1 Estimasi Hasil Kolonial Drain sebagai Presentase GDP di Jawa 1820 - 1880.



Sumber : *Changing Economy in Indonesia, 2*

Dari gambar diatas dapat dilihat kesenjangan antara ekspor dan impor cukup lebar yang menunjukkan tingkat eksploitasi kolonial yang tinggi dari tingkat nol pada 1820-an kemudian meningkat sebanyak 8 hingga 12 persen dari PDB Jawa tahun 1850-an. Kemudian mengalami penurunan sebagai hasil reformasi bertahap selama tahun 1860-an dan 1870-an. Selama tahun 1850-an, ketika sistem berfungsi paling efisien, hasil dari *batig slot* menghasilkan keuntungan 3,8 persen ke PDB Belanda setiap tahun, dan pendapatan dari Jawa menyumbang lebih dari sepertiga dari anggaran Negara Belanda (Van Zanden dan Van Riel 2000: 223).

PDB tumbuh selama tahun 1830-an, tetapi stagnan selama tahun 1840-an (khususnya antara tahun 1842 dan 1854), dan PDB per kapita turun hampir 10% selama dekade kedua dari Sistem Budidaya (Gambar 4.2.1).

Gambar 5.2.1.2. PDB dan Konsumsi per kapita, 1815-1913 (dalam harga)



Sumber : Van Zanden. 2002.

Dari gambar diatas, panen buruk sedang terjadi di pertengahan tahun 1840-an, kemudian tahun 1849/50 adalah sebabnya, namun ada sebab yang lebih kompleks yang menyebabkan pendapatan Pemerintah mengalami penurunan, yakni konsumsi per kapita mengalami penurunan pada tahun-tahun tersebut (Gambar 4.2.2). Hal ini disebabkan juga oleh penghisapan atau eksploitasi kolonial terus meningkat begitu juga dengan investasi. Ini membuat konsumsi masyarakat lokal menurun. bagian dari PDB jauh lebih tinggi daripada sebelum 1830 (mereka meningkat dari sekitar 5% di

Pada saat yang sama struktur ekonomi berubah secara substansial, seperti penurunan pada bidang tekstil dalam PDB sekitar 15% pada tahun 1820-an menjadi 6-7% di awal 1850-an. Ini adalah hasil dari pertumbuhan output yang sangat lambat, khususnya tahap 'finishing' dari produksi batik yang menyebabkan jatuhnya harga

relatif tajam. Selain itu, ekspor bidang pertanian meningkat dari sekitar 4% pada 1820 - an menjadi lebih dari 12% pada awal 1850-an.

Kondisi yang terjadi di akhir tahun 1840, merupakan kritik atas harga yang ditetapkan dan peningkatan efisiensi selama penerapan sistem kultivasi. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keuntungan bersih bagi negara karena administrator kolonial mengakui sistem tersebut membuka peluang bagi orang – orang tertentu untuk mengambil bahan baku mentah dan menjualnya untuk kepentingan pribadi (Fasseur, 1975 : 43ff). Kritik yang disampaikan Max Haveelar dalam “The Auction of Coffe” juga memprotes kelebihan keuntungan (surplus) yang didapat negara dengan memeras tanah dan tenaga kerja negara koloni secara berlebihan. Partai Liberal di Eropa juga mendesak Belanda untuk segera menerapkan kebijakan liberal. Dimana Jawa sebagai pusat negara kolonial, tidak hanya dimiliki Belanda, melainkan negara lain di Eropa juga dapat menanam saham di Indonesia. Beberapa data diatas menunjukkan meningkatnya inefisiensi ekonomi di Jawa pada tahun-tahun akhir 1840. Pada kenyataannya pertumbuhan yang tidak berkelanjutan pada tahun 1830-an disebabkan oleh perebutan tanah oleh kalangan elit lokal terutama di daerah Vorstenlanden, munculnya gerakan Nativime (gerakan anti – Eropa) di Banten, Perang Aceh, dan sebagainya, mengarahkan sistem pada kemunduran ekonomi di tahun 1840-an.

Terdapat beberapa poin yang diambil pemerintah untuk melaksanakan reformasi setelah terjadi penurunan ekonomi di akhir tahun 1840, yakni :

1. Selama (akhir 1840 - an dan) 1850 - an reformasi diarahkan pada perampingan Sistem Budidaya dan meningkatkan fungsi pasar. Contohnya adalah:
 - Penghapusan tanaman budidaya yang paling tidak efisien, khususnya nila, penyederhanaan kontrak dengan pabrik gula
 - Penghapusan *pasarpacht* pada tahun 1851, pajak atas pasar lokal yang terhambat perdagangan lokal

2. Reformasi sistem moneter dengan cara pengenalan mata uang dalam bentuk koin perak (kecil) dan pemakaian guilden Hindia Belanda dengan guilden Belanda, untuk menstabilkan mata uang
3. Peningkatan tanaman ekspor yang dijual di pasar Jawa dan melakukan penetapan harga ulang atas produk – produk yang dihasilkan
4. Tenaga kerja Rodi perlahan-lahan digantikan oleh tenaga kerja upah. Percobaan pada akhir 1840-an menunjukkan bahwa upah buruh gratis jauh lebih efisien.
5. Selama paruh kedua tahun 1860 an, sistem ekonomi liberal mulai diterapkandengan memulai secara bertahap penghapusan semua bentuk kerja paksa, dan menggantikannya dengan pekerja upahan
6. Produksi gula secara bertahap berubah menjadi industri yang didasarkan pada kontrak dengan desa dan petani, dan penanaman kopi, yang berlanjut.
7. UU Agraria tahun 1870 memungkinkan Orang Eropa untuk menyewa tanah (yang tidak digunakan oleh penduduk asli) dari negara kolonial untuk jangka waktu hingga 75 tahun, dengan tujuan untuk mendirikan perkebunan dan melakukan eksploitasi (Fasseur, 1975 : 23 - 26).

Perubahan penting pada pertengahan 1860 adalah pembangunan jaringan kereta api dan mulai berkembangnya perusahaan swasta yang didukung oleh pemerintah Belanda sebagai tanda memasuki masa liberalisme ekonomi.

Hingga tahun 1872, Sistem perdagangan dunia tetap menunjuk Amsterdam sebagai pasar Eropa utama untuk produk tropis. Keuntungan dari sistem kultivasi ini mampu menghapus defisit pemerintah kolonial, ketersediaan dana pensiun, pembiayaan gedung di Jawa, pembangunan jaringan kereta api, mendanai kompensasi pemilik budak setelah penghapusan perbudakan di koloni Suriname, dan membayar ekspansi Belanda ke Sumatra dan kepulauan timur. Berikut keuntungan dari Sistem Kultivasi.

Tabel 5.2.1.1 Hasil Keuangan Sistem Budidaya, 1840-1849
(dalam ribuan gulden nilai Indonesia sekarang)

Period	Products				
	Coffee	Sugar	Indigo	Pepper, Tea	Total Net Profit
1840-1844	40.278	8.218	7.3836	647	39.341
1845-1849	24.548	4.136	7.726	1.725	35.057

Sumber : Fasseur (1975:20)

Kesuksesan Sistem Kultivasi sering dikaitkan dengan penemuan warga kebangsaan Inggris, James William Bayley yang pernah menerbitkan buku berjudul “How to Manage a Colony in 1861”. Mekanisme dan keuntungan perdagangan liberal dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

5.1.3 Penerapan Sistem Ekonomi Liberal

Selama abad – 19, keuntungan merupakan hal terpenting dari aktivitas penjajahan. Hubungan negara metropolis (a metropolis) dengan tanah jajahan (a colonial) menurut Smith (1776) terbentuk melalui struktur sosial. Diantara kemajuan di bidang militer, administrasi, dan perusahaan dalam tatanan Belanda, bidang sosial dan ekonomi relatif menjadi faktor terbesar kemajuan negara jajahan. Jawa, salah satu pulau terbesar masyarakat terjajah terbesar di dunia, yang berkontribusi besar terhadap peningkatan ekonomi pasar Eropa (Jan Luiten, 2017 : 1). Konsep ‘negara’ yang disebut Luiten dalam artikel “Colonial State Formation and Patterns of Economic Development in Java 1800 – 1913”, menyebut Indonesia sejak tahun 1800 adalah suksesor Belanda.

Perusahaan *Dutch East India* secara hampir keseluruhan dioperasikan di Jawa dengan kebijakan baru untuk mengontrol dan menguasai masyarakat pribumi sepanjang tahun 1800, 1870, sampai 1930. Fakta ini mendukung keuntungan besar yang diambil Belanda dari masa merkantilisme hingga liberalisme sangat besar dibanding dengan perusahaan – perusahaan modern saat ini seperti: *apple*, *google*,

facebook, shell, dan sebagainya (Times, 2019 : 2). Kebijakan baru yang dibuat mencakup perluasan pajak, pemberlakuan kebebasan perdagangan (*free enterprise*) melalui swasta, ekspor dan impor (bekerjasama dengan pedagang ekspatriat dan populasi Eropa – Pribumi) untuk meningkatkan basis perekonomian di Jawa. Pulau – pulau lain yang tersebar di *Nederlands Indies* selain Jawa biasanya digunakan untuk mencari bahan baku komoditi serta pengolahan.

Setiap kebijakan yang dijalankan pemerintah Belanda menghasilkan surplus dan defisit. Keuntungan besar yang diambil pemerintah sejak masa diberlakukannya Merkantilisme dibawah J.P Coen, Daendels, Raffles, Van der Capellen, hingga Van den Bosch sebagai awal dari pembentukan negara kolonial liberal, didapat dengan jalan kooperatif dan massive. Keterlibatan kaum elit priyayi pribumi semakin mempermudah Belanda untuk mengumpulkan keuntungan dari eksploitasi. Dari segi struktural, kaum elit pribumi mendapat keuntungan dari keudukannya yang absolut, meski tidak tahu sebenarnya Belanda tengah mengurangi hak istimewa priyayi dengan sistem bagi rata di ahir tahun 1860 – an. Awal tahun 1870 ditetapkan sebagai pembentukan ekonomi liberal dengan undang – undang tertulis. Sebabnya, sudah dijelaskan di awal pembahasan bahwa Belanda didesak oleh para aktivis Partai Liberal untuk segera membuka Jawa untuk dunia karena hasil sistem tanam paksa yang luar biasa banyak, dan sangat eksploitatif. Raja William II menyetujui bahwa negara kolonial harus segera dibentuk melalui perluasan lahan dan penanam modal asing.

Secara teori dalam liberalisme, pemerintah hanya sebagai pengawas ekonomi, tetapi faktanya liberalisme di Jawa sepenuhnya dipegang pemerintah sebagai agen ekonomi. Pemerintah Belanda mempromosikan Indonesia sebagai lahan eksploitasi yang menguntungkan dan investasi yang akan banyak menghasilkan keuntungan. Begitu bunyi iklan yang tertulis di koran – koran maupun telegram pada saat itu. Tahun – tahun penting dalam sejarah keuntungan Liberalisme terbagi menjadi dua periode : (1) dari tahun 1860 – 1885, dimana ekonomi dipegang para penanam swasta, dan (2) setelah adanya resesi ekonomi akibat perlawanan lokal pada pertengahan

tahun 1880, (3) periode 1885 – 1900, Indonesia sebagai dasar finansial keuntungan Belanda.

Liberalisme ekonomi adalah sebuah ide baru yang berasumsi bahwa semua bentuk ekonomi adalah sama. Semua individu mempunyai hasrat untuk saling berkompetisi dan memaksimalkan keuntungan. Penerapan liberalisme ekonomi jelas a-historis dan meniadakan bentuk keragaman ekologis, organisasi sosial dan politik. Karena dalam kenyataannya, liberalisme ekonomi berupaya memisahkan kegiatan-kegiatan ekonomi dari relasinya dengan agama, etnisitas, kekerabatan dan organisasi politik (Polanyi, 2001). Sejarah panjang ekonomi di Indonesia tertanam dalam relasi-relasi sosial komunal seperti etnisitas, kekerabatan dan organisasi politik. Keberlanjutan sejarah yang terjadi hingga saat ini adalah bentuk dasar dari kapitalisme Indonesia sesungguhnya dimana sistem perdagangan berada pada dalam skala kecil dan tidak berbasis monopoli. Namun demikian, sistem perdagangan skala kecil ini cenderung stabil karena ia terkait dengan ikatan sosial dan tidak mengambil keuntungan besar yang selalu paralel dengan resiko hutang dan volatilitas harga-harga pasaran dunia yang cenderung labil.

Van Leur (1955) menggambarkan sejarah mendalam (deep history) dari sistem ekonomi Indonesia yang bersifat skala kecil dan tidak dikuasai oleh monopoli tertentu. Jika kita perhatikan, keberlanjutan perdagangan dan usaha skala kecil ini masih berkelanjutan hingga sekarang. Ekonomi skala-skala kecil juga mempunyai relasi sosial organisasi yang kuat. Sebaliknya, sistem ekonomi skala besar dan monopolis tidak hanya menciptakan solidaritas mekanis, namun juga mempunyai kekuatan yang merusak model ekonomi skala kecil.

Definisi liberalisme atau kebebasan pasar lebih merupakan mitos karena Negara merupakan aktor Komparasi Munculnya Liberalisme Ekonomi utama dalam mengatur mekanisme lalu lintas dan alokasi barang dan sumber daya secara efisien dengan patokan penting pada harga-harga di pasaran. Negara bukan berada *vis a vis* dengan pasar melainkan melakukan negosiasi secara berulang dengan kelas kapitalis.

Kebijakan Ekonomi yang diterapkan Pemerintah Belanda mengenai sistem merkantilisme sebelum 1830, sistem kultivasi 1830 – 1870 merupakan langkah awal dari penerapan ekonomi liberal dengan memposisikan para pedagang Cina dan Asing sebagai pemegang utama perdagangan. Ekonomi liberal yang ditujukan untuk membuka lahan seluasnya untuk memperluas pendapatan pemerintah selain bidang pertanian. Di tahun 1870 terdapat perkebunan dan pertambangan yang diperluas jangkauannya dengan penambahan komoditi, dan pengeboran bahan tambang untuk menarik minat pengusaha asing untuk menanamkan sahamnya di Indonesia.

Penerapan liberalisme ekonomi hingga pasca kolonial juga masih diterapkan oleh Negara dan birokrasi sebagai aktor pentingnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1920 misalnya, disebabkan oleh stimulasi pertumbuhan ekspor di bidang perkebunan gula, teh, dan tembakau yang didorong oleh perusahaan-perusahaan swasta Belanda (Booth, 2007: 73-74, 94-98). Negara kolonial memegang peran dalam mengatur semua alur ekspor-impor, seperti kuota dan tarif barang masuk. Selain itu, semua ekspor yang dilakukan Negara koloni lebih ditujukan kepada Negara Induk. Perihal seberapa besar total keuntungan surplus kolonial, data statistik dari arsip – arsip yang tersedia mencatat cukup lengkap lalu lintas perekonomian pemerintahan Belanda, meski sayangnya beberapa arsip tidak dapat menjangkau kurun waktu, perdagangan kecil, dan daerah tertentu.

Lalu lintas perdagangan pemerintah Belanda dalam kurun waktu 1830 – 1870 dan 1870 – 1941, mencakup kegiatan ekspor – impor, keuntungan dari perdagangan pertanian dan perkebunan, tingkat konsumsi masyarakat lokal dan asing yang mempengaruhi jumlah surplus keuntungan akan disampaikan pada sub bab selanjutnya.

5.2 Surplus Keuntungan Kolonial Masa Ekonomi Liberal

Sistem liberalisme di Hindia Belanda, pemerintah mempunyai peranan penting dalam menciptakan *supply and demand* dengan cara mengontrol dan membentuk pasar. Melalui kuasa administrasi dan monopoli sektor tertentu, Negara menciptakan modal melalui pajak, sewa dan persediaan buruh murah, seperti kontrol penanaman rempah-rempah di kawasan pulau tertentu di Maluku agar harganya tidak jatuh di pasaran dunia, kemudian regulasi produksi gula di Jawa Barat dan kontrol produksi lada di Sumatera Selatan adalah bukti bahwa control dan monopoli Negara terhadap sumber daya tanah dan alam (Furnivall, 1939: 31, 33, 39).

Kondisi pertanian Jawa berada dalam kondisi kritis hampir 60% di sepanjang tahun 1870. Ini dikarenakan minimnya pengetahuan pemerintah tentang ilmu pertanian. Dan penjajahan Belanda tidak seperti Inggris yang membangun persemakmuran dan hanya mengambil keuntungan tidak terlalu besar, Belanda justru mengambil keuntungan besar yang tidak sebanding dengan kerusakan geografis yang ada. Tahun 1885 posisi Jawa berada dalam kondisi buruk. Dari kondisi ini kemudian pemerintah mulai membangun kembali 'sawah' di sekitar untuk persediaan beras bagi masyarakat.

Pertumbuhan populasi akan membutuhkan banyak logistik. Sampai tahun 1940, jumlah penduduk meningkat dua kali lipatnya sampai pada angka 23.38 juta orang di Jawa. Di tahun 1870 berlaku sistem buruh upahan menggantikan buruh gratis yang dinilai kurang manusiawi oleh para kritikus Eropa. Buruh memiliki hak pekerja yang diikat kontrak dengan adanya *coolie ordonantie* di tahun 1885. Selain itu, pemerintah Belanda juga mengadakan perluasan lahan diluar provinsi di Jawa. Ini difungsikan untuk mengembangkan pendapatan selain pertanian, melalui pertambangan. Kebijakan resmi Belanda berkenaan dengan investasi swasta di koloni berubah secara radikal ketika Sistem Budidaya diberhentikan tahun 1870. Selama empat dekade sebelumnya, Pemerintah mengeksploitasi Jawa sebagai salah satu negara penghasil perkebunan besar berupa : gula, kopi, dan indigo (C. Fasseur,

Kultuurstelsel en koloniale baten; De Nederlandse exploitatie van Java 1840-1860 (Leiden, 1975)).

Surplus keuntungan kolonial pada masa liberal ini dibagi berdasarkan komoditi terpenting yang sukses diolah dan dipromosikan oleh Belanda kepada pengusaha – pengusaha swasta diantaranya negara Amerika Serikat, dan Inggris sebagai pemegang modal terbesar. Komoditi paling penting ternagi menjadi dua yakni (1) Keuntungan di bidang Pertambangan terutama minyak, dan (2) Keuntungan bidang Pertanian terutama Gula.

5.2.1 Surplus Keuntungan di Bidang Pertambangan Minyak / Petroleum

Cara Belanda untuk memperluas penjajahan selepas beberapa keuntungan dan kerugian hasil sistem kultivasi diantaranya adalah membuka lahan di wilayah – wilayah diluar Jawa. Kondisi masyarakat mencakup pertambahan populasi, penggunaan buruh oleh pemerintah, dan penguasa lokal yang bersikap kooperatif terhadap pemerintah sangat mempengaruhi akselerasi perluasan eksploitasi. Teori David Ricardo mengenai perdagangan internasional, dengan mengandalkan komoditi – komoditi tertentu yang diolah Belanda di wilayah – wilayah tertentu di Indonesia, dapat menganalisis beberapa perusahaan yang terlibat untuk menghasilkan surplus keuntungan.

Berdasarkan analisis Gordon, perusahaan – perusahaan minyak yang berdiri ini dapat dikategorikan sebagai keuntungan privat karena sistem bagi hasil 50% pengusaha asing dan 50% uang hasil penjualan minyak masuk ke kas pemerintah Belanda (Gordon, 2010 : 53). Pendirian perusahaan asing diawali dengan pembukaan lahan yang dilakukan pemerintah Belanda. Sistem ekonomi yang bebas membuka peluang bagi perusahaan – perusahaan swasta untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Ekspansi pemerintah dilakukan dalam skala ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dalam skala mikro, pemerintah meneruskan eksploitasinya ke daerah – daerah di luar Jawa diantaranya Kalimantan, Jambi, Aceh, dan Gorontalo. Pendekatan

terhadap elit lokal adalah cara pertama Belanda agar para penguasa daerah ini mau bekerjasama menyediakan lahan dan pekerja untuk melakukan pengeboran pertambangan.

Para penguasa lokal seperti bupati dan priyayi sebagian besar setuju dan memiliki keinginan untuk menarik perhatian pemodal swasta, agar menanam modalnya melalui kerjasama dengan pemerintah. Meski terlihat menjanjikan, namun faktanya para penguasa lokal ini tidak dapat menjamin keuntungan besar karena kondisi wilayah di luar Jawa memiliki infrastruktur yang sangat terbatas.

Sultan Siak di Riau memiliki ketertarikan sama kepada para investor dan kaum birokrat antara tahun 1870 dan 1880. Tahun 1858, sebuah perjanjian dibuat antara Sultan dan pemerintah Belanda. Sikap Sultan yang setuju ini tidak lain karena untuk mengamankan posisinya. Sultan khawatir para pedagang dari Selat Malaka akan menguasai daerah Siak. Rumor beredar bahwa Sultan juga memiliki aset kepemilikan timah, selain tembakau. Namun dinamika ekonomi yang terjadi di Siak tidak terlalu baik. Tanah yang buruk mempengaruhi penanaman tembakau dan eksploitasi timah tidak menguntungkan, sehingga Siak harus rugi besar. Dampak politis dari gagalnya perekonomian berpengaruh pada pemindahan ibukota Sumatera Timur ke Deli. Kegagalan bagi elit lokal karena Sultan tidak lagi mendapat dukungan dari rakyatnya, namun tidak untuk pemerintah. Jalur perekonomian pemerintah Belanda telah terbentuk di Sumatera.

Selain Sumatera, eksploitasi diperluas ke Kalimantan Utara. Kawasan utara yang didominasi oleh *British North Borneo Company* yang berkuasa atas Malaysia dan utara Kalimantan tahun 1881. Tahun 1885 pemerintah Belanda dengan penguasa lokal, Sultan Sambaliung, Gunung Tabur, dan Bulungan telah memiliki akses untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi daerah setempat. Adanya perusahaan Inggris mendorong Belanda untuk bekerjasama agar dapat mendirikan stasiun angkutan laut. Tetapi reaksi politik masyarakat terhadap perusahaan Inggris membangkitkan minat Investor Belanda untuk segera melakukan pencarian tambang di wilayah tersebut.

Di Brunei, penguasa lokal bersikap tidak kooperatif terhadap pemerintah Belanda. Sultan Brunei misalnya menilai perlindungan pemerintah dianggap tidak memuaskan. Akibatnya, pemerintah memindahkan pusat ibukota yang semula di Tawau (Sabah) dipindahkan ke ibukota Bulungan (Kalimantan Utara). Sehingga membuat bisnis Sultan menjadi terhambat. Selain itu, otoritas Sultan menurun karena pemerintah Belanda mengontrol wilayah pertambangan minyak di Kalimantan Utara secara permanen. Antara tahun 1893 dan 1897 tiga penguasa lokal dipaksa untuk melepaskan otoritas mereka khususnya, sehubungan dengan kegiatan ekonomi seperti pemberian konsesi dan pengumpulan bea cukai. Penambangan batu bara di Sambaliung, Kalimantan Utara dikuasai oleh pemerintah Belanda, yang mempengaruhi perekonomian masyarakat lokal.

Di Gorontalo, seorang raja mengizinkan permintaan dari firma *Bauremann & Parmentier*, sebuah perusahaan Eropa milik Bauerman untuk mencari emas di Gorontalo. Raja bertanggung jawab terhadap konsesi sedangkan pemerintah Belanda bertugas mensurvei cadangan emas dengan menugaskan insinyur Van Schelle. Belanda juga menugaskan asisten residen, Scherer, yang bertugas menjaga ketertiban politik yang sedang berada dalam kekacauan sejak raja terakhir Gorontalo. Kedua orang ini membawa pengaruh besar bagi investor swasta yang membuat kedudukan Pemerintah Belanda semakin nyata. Pada tahun 1889 Gorontalo berada di bawah pemerintahan kolonial langsung (tidak lagi berada dalam pemerintahan tidak langsung melalui pangeran Melayu). Di akhir tahun 1890, Gorontalo resmi berada dibawa kontrol pemerintahan Belanda. Gorontalo menghasilkan komoditi emas yang menunjang peta eksploitasi dan keuntungan Belanda.

Di Aceh dan Jambi, terdapat pertambangan minyak yang berkembang di Indonesia dan sangat menentukan posisi Belanda sebagai agen ekonomi dalam ekspansi ekonomi mikro. Secara makro, pembentukan surplus dibentuk di beberapa daerah di provinsi luar Indonesia dengan memanfaatkan pergolakan politik yang terjadi di wilayah tersebut. Perang Aceh yang terjadi sejak tahun 1873 merupakan perang paling kronik dan mengerikan dalam sejarah perlawanan kolonial. Selain

harus membagi modal dengan Inggris, wilayah Tamiang dan Perlak di pantai utara berada dalam zona perang dan tidak memungkinkan untuk melakukan eksploitasi oleh perusahaan swasta.

Pemberontakan yang terjadi di beberapa wilayah, membuat pemerintah Belanda mengubah kebijakan politiknya. Selain itu, perlawanan yang dilakukan Teuku Umur membuat Belanda lebih frustrasi. Singkatnya, Kerajaan Belanda meminta kepada Kesultanan Aceh untuk mengakses ladang minyak di Timur Sumatera dengan melakukan pengeringan (*drying up*). Dibawah komando Van Heutz di tahun 1898, pasifikasi antara pemerintah Belanda dan Aceh dilakukan dengan membuka wilayah Tamiang dan Perlak sebagai wilayah eksploitasi minyak untuk para investor swasta. Selama perang berlangsung, eksploitasi ini dijaga ketat oleh tentara kolonial.

Di Jambi, Belanda memanfaatkan perebutan politik dengan menggulingkan Sultan Taha dan menggantikannya dengan pamannya dilindungi oleh garnisun Belanda di ibukota. Faktanya, selama beberapa dekade kekuasaan Belanda hanya berkisar pada sekitar Ibukota Jambi. Komoditi yang dapat menambah surplus swasta dan pemerintah di wilayah ini diantaranya pasokan minyak. Ada banyak investor yang berminat melakukan ekspedisi ilmiah untuk meneliti dan mengebor kedalaman minyak di daerah Jambi sekitar 1880. Sayangnya, pengeboran minyak baru dilakukan selepas tahun 1900, setelah pemerintah mengubah kebijakan karena persaingan antara pengusaha swasta, antara Kerajaan Belanda dan perusahaan *Standard Oil* yang monopoli pasokan minyak di Indonesia. Di tahun 1903 saja ada lebih dari 2.000 permintaan untuk pengeboran di Jambi, diduga penyadapan minyak dilakukan oleh Standart Oil. Pada tahun itu juga militer Belanda melakukan ekspedisi untuk menepati janjinya pada penerus Jambi dengan membunuh Sultan Taha pada tahun 1904. Kematian sultan menandai kekuasaan Jambi berada dibawah pemerintah Belanda.

Dalam beberapa kasus, ekspansi yang dilakukan Belanda di Siak, Kalimantan timur laut, Sulawesi Utara, Flores, Aceh, Jambi didorong oleh adanya kepentingan masuknya modal swasta di daerah – daerah terpencil di Indonesia, untuk mendapat

untung yang juga besar. Seringkali Belanda sebagai agen ekonomi menjanjikan yang penuh optimistik bahwa keuntungan besar akan didapat swasta asing, meski dalam kasus – kasus tertentu Belanda harus menelan kerugian karena faktor geografis dan akibat reaksi politis.

Seringkali pemerintah bersikap tidak tegas terhadap calon pemodal yang prospektif karena takut akan mengotori wilayah yang akan dieksploitasi, juga karena kurangnya fasilitas umum yang memadai seperti: jalan beraspal, dan sebagainya. Pemerintah memberikan konsesi kepada calon – calon penanam modal dengan syarat perusahaan atau pemohon individu setuju untuk membiayai pengeluaran tambahan apa pun saat melakukan eksploitasi di wilayah yang dituju. Sebagai imbalannya, pemodal swasta asing berada dalam proteksi Eropa.

Adapun perusahaan – perusahaan swasta yang bekerjasama dengan Pemerintah Belanda menghasilkan surplus keuntungan. Berikut adalah data – data yang diambil dari tahun – tahun tertentu untuk menjelaskan secara detail dengan sumber yang terbatas, sebagai berikut :

1. Royal Dutch Shell

Royal Dutch Shell (gambar terlampir pada lampiran C) atau lebih dikenal sebagai *Shell*, adalah sebuah perusahaan minyak dan gas multinasional yang berkantor pusat di *The Hague*, Belanda dan didaftarkan di Inggris. *Royal Dutch Petroleum Company* adalah sebuah perusahaan asal Belanda yang didirikan pada tahun 1890 untuk mengembangkan sebuah lapangan minyak di Pangkalan Brandan, Sumatra Utara, dan awalnya dipimpin oleh August Kessler, Hugo Loudon, dan Henri Deterding. Hingga tahun 2016, Shell merupakan perusahaan terbesar ketujuh di dunia, dengan pendapatan sebesar 144,39 miliar dollar. Pada bulan Februari 1907, *Royal Dutch/Shell Group* resmi terbentuk melalui penggabungan dua perusahaan, yakni Royal Dutch Petroleum Company dari Belanda dan "Shell" *Transport and Trading Company Ltd* dari Inggris. Penggabungan ini sebagian besar disebabkan adanya keinginan dari kedua perusahaan untuk lebih kompetitif bersaing

dengan *Standard Oil*. Berdasarkan data Bank Inggris (Banktrack, 2014 : 3), pendirian *Royal Dutch Shell* memiliki kesepakatan bahwa hasil keuntungan dibagi keuntungannya : Belanda mendapat 60% dan Inggris mendapat 40%. Dengan perluasan wilayah pengeboran minyak ke Balikpapan berdasarkan perjanjian Borneo tahun 1902, hasil keuntungan *Royal Dutch Shell* dari 1890 – 1925 berkisar f 600 juta atau sekitar 350\$ juta USD (De Bussy, 1925).

2. Standart Oil

American company Standart Oil (gambar terlampir pada lampiran C) adalah perusahaan minyak milik Amerika yang pernah menanamkan sahamnya di Indonesia. Berdasarkan keterangan Linbald dalam “The Petroleum Industry in Indonesia Before The Second World War” (1989 : 54), tahun 1898, *Standart Oil* bernegosiasi dengan *Muara Enim Company*, sebuah perusahaan minyak milik penguasa lokal di wilayah Sumatera Selatan. Namun pada faktanya, persaingan antara *Royal Dutch Shell* dengan *Standart Oil*, membuat *Standart Oil* ditolak oleh penduduk setempat dan cenderung membuat perjanjian dengan *Royal Dutch Company*.

3. Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM)

BPM (gambar terlampir pada lampiran C) didirikan di Den Haag pada 26 Februari 1907, merupakan anak perusahaan dari *Royal Dutch Shell*, dengan pengeboran pertama kali dilakukan di pelabuhan Balikpapan pada 10 Februari 1897. BPM berfokus pada eksplorasi, produksi, dan penyulingan minyak di Kalimantan. Menurut Linbald (Ibid, 1897 : 55), aliansi antara *Royal Dutch Shell* dan BPM menghasilkan sekitar 80 f juta atau 40\$ USD dari tahun 1897 – 1907. BPM mengontrol bidang ekspor dan semua produksi minyak, yang dibatnuk oleh Dordt Petroleum tahun 1911 sebagai perusahaan nomor satu monopoli minyak di Indonesia. sampai tahun 1925, penghasilan bersih BPM mencapai f 300 juta atau senilai 157\$ USD yang 100% penghasilannya diambil oleh pemerintah Belanda. BPM berfokus di wilayah Sumatera Selatan dengan jumlah 1,2 juta ton tahun 1933 dan 2,2 juta ton

sampai tahun 1937. Harga minyak (petroleum) per barel (151 liter) tahun 1937 adalah 228\$ USD, maka dengan produksi 2,2 juta ton, penghasilan BPM mencapai 3 milyar dollar sampai tahun 1937.

4. Verenigde Nederlandsche Scheepvaart (VNS)

VNS (gambar terlampir pada lampiran C) adalah perusahaan pelayaran Belanda yang didirikan di Den Haag yang ada antara tahun 1920 dan 1970. Namun, VNS sudah memiliki keuntungan sejak tahun 1908 yang berasal dari pengiriman cargo, logistik, buruh, dan penumpang. Tahun 1920, keuntungan bersih VNS berjumlah sekitar f 200 milyar atau senilai 223 \$ milyar dollar USD. VNS sendiri merupakan perusahaan kontainer terbesar ketiga di dunia yang berpusat di The Hague, Belanda. Berdasarkan keterangan Kris Alexanderson (2019 : 10 – 15) dalam bukunya “Subsersive Seas : Anti Colonial Networks Across The Twentieth Century Dutch Empire”, penghasilan VNS setelahnya berasal dari korporasi dengan beberapa perusahaan, demi mewujudkan Pax Nerlendica, penguasaan atas Indonesia, perusahaan ini membayarkan pajaknya pada Bank Indonesia sekitar 25% dari pendapatan per tahun. Berikut adalah daftar perusahaan beserta pajak yang harus disetorkan kepada VNS sebesar f 3.750.000 per tahun sejak tahun 1920 - 1939 , sebagai berikut :

a. *Holland-Amerika Lijn (HAL) te Rotterdam;*

Adalah perusahaan Belanda yang bekerjasama dengan Amerika, *Holland-America Line* pada awalnya adalah perusahaan Belanda yang mempertahankan hubungan pengiriman antara Belanda dan Amerika Serikat. Perusahaan itu berbasis di pelabuhan Rotterdam. Pada tahun 1989, perusahaan diambil alih oleh *American Carnival Corporation & plc*.

b. *Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) te Amsterdam;*

Stoomvaart-Maatschappij "Nederland" (SMN) adalah perusahaan pelayaran Belanda yang didirikan di Amsterdam yang ada antara tahun

1870 dan 1970. Pada tahun 1970, SMN bergabung dengan beberapa perusahaan pelayaran Belanda lainnya untuk membentuk Nederlandsche Scheepvaart Unie (NSU), yang dikenal sebagai Nedlloyd dari tahun 1977 dan seterusnya. Perusahaan pelayaran dikenal sebagai De 'Nederland' dalam penggunaan pidato. Moto SMN adalah "Sempre Mare Navigandum" (laut harus selalu dinavigasi).

c. Rotterdamsche Lloyd (RL) te Rotterdam;

RL didirikan pada 15 Juni 1883 dengan tujuh kapal, di bawah manajemen Wm. Ruys & Zonen, yang didirikan kembali tahun 1839, ketika pemilik kapal Rotterdam Willem Ruys J.D.zn (1809-1889) berlayar dengan kapal layar di Hindia Belanda dan Timur Jauh. Sebagai hasil dari pembukaan Terusan Suez, putranya Willem Ruys (1837-1901) memperluas perusahaan pada tahun 1872 dengan menggunakan kapal uap di Batavia. Pada tahun 1875, ia mendirikan perusahaan paruh waktu Stoomboot Reederij "Rotterdamsche Lloyd", yang namanya diubah menjadi Stoomvaart Maatschappij "Rotterdamsche Lloyd" pada tahun 1881, dan yang akhirnya dikonversi pada tahun 1883 menjadi perusahaan publik dengan nama Rotterdamsche Lloyd NV.

d. Van Nievelt Goudriaan (NiGoCo) te Rotterdam;

Perusahaan pengiriman didirikan pada tahun 1905 oleh Nievelt dan goudriaan, dua kakak beradik yang memiliki izin membuka pangkalan minyak di Kalimantan. Perusahaan berkembang menjadi perusahaan pengiriman selama krisis Perang Dunia I. Pada tahun 1929, perusahaan ini bergabung dengan VNS dan membayar sejumlah pajak per tahun kepada VNS. Perusahaan ini mengalami krisis global pada tahun 1930-an karena depresi besar yang mendera Amerika dan Eropa. Perusahaan pelayaran ini mengalami banyak kerugian dalam Perang Dunia Kedua tepatnya tahun 1941.

e. Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM) te Amsterdam;

Koninklijke Paketvaart-Maatschappij (KPM) adalah perusahaan pelayaran Belanda, yang memiliki kantor terdaftar di Amsterdam dengan kantor pusat operasional di Batavia, yang ada antara tahun 1891 dan 1966. Perusahaan ini bertugas untuk menjaga keamanan pengiriman di dan dari Hindia Belanda. Merupakan salah satu perusahaan yang dimerges oleh **Perusahaan Pelayaran Negara Indonesia** (Pelni) pada tahun 1957 dan bagian lainnya diambil alih oleh *Royal Java-China-Paketvaart-Lijnen* (KJCPL) pada tahun 1967. KPM didirikan di Amsterdam pada 4 September 1888 oleh *Rotterdamsche Lloyd* (RL) dan *Stoomvaart Maatschappij Nederland* (SMN). Dari tahun 1916, kantor pusat Belanda, bersama dengan beberapa perusahaan pelayaran Amsterdam lainnya, berlokasi di *Scheepvaarthuis* di Prins Hendrikkade. Perusahaan baru mengambil alih sebagian kapal *Nederlandsch Indische Stoomvaart Maatschappij*. Setelah dua tahun persiapan, KPM mulai menerapkan jadwal pertama pada 1 Januari 1891.

Perusahaan ini berfokus pada pengiriman untuk penumpang dan kargo antara pulau-pulau di Hindia Belanda, yang disebut "pengiriman antar-pulau. Dari tahun 1906, rute dari kepulauan India ke negara-negara asing juga dibentuk, yang disebut "garis luar". Pada tahun 1908 Jalur Jawa-Australia (JAL) diperkenalkan oleh KPM, tahun 1910 Jalur Jawa-Siam (JSL) dan pada tahun 1915 Jalur perdagangan Deli sampai Cina (DSCL). Kapal KPM ditenggelamkan oleh penjajah Jepang pada tahun 1942.

f. Java-China-Japan Lijn (JCJL) te Amsterdam;

Royal Java-China-Paketvaart Lines NV (KJCPL) (gambar terlampir pada lampiran C) adalah perusahaan pelayaran Belanda yang didirikan di Amsterdam yang ada antara tahun 1902 dan 1970. Hingga tahun 1947 namanya adalah Java-China-Japan Line (JCJL), di luar Belanda perusahaan itu dikenal sebagai *Royal Garis Antar Negara* (RIL).

Perusahaan yang melayani pengiriman dari Jawa dan Cina. Pada tahun 1970, KJCPL bergabung dengan sejumlah perusahaan pelayaran Belanda lainnya untuk membentuk *Nederlandsche Scheepvaart Unie (NSU)*, yang dikenal sejak tahun 1977 sebagai *Nedlloyd*. *Nedlloyd* adalah sebagai *Nedlloyd Lines* kemitraan antara *Koninklijke Rotterdamsche Lloyd (KRL)* di Rotterdam dan *Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)* di Amsterdam

- g. *Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij (KNSM)* te Amsterdam (gambar terlampir pada lampiran C) ;

Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij (KNSM) adalah perusahaan pelayaran Belanda yang didirikan di Amsterdam yang ada antara tahun 1856 dan 1981. *KNSM* adalah perusahaan terbesar di Amsterdam, sebangailima besar perusahaan pelayaran nasional dalam Pemerintahan Belanda. Penekanan perusahaan adalah pada kapal kargo berukuran sedang dengan akomodasi penumpang terbatas. Pada puncaknya pada tahun 1939, perusahaan pelayaran memiliki 79 kapal pengangkut laut. Dari jumlah tersebut, 48 hilang selama Perang Dunia Kedua, tetapi masyarakat selamat dari pertempuran besar ini. Sejak tahun 1903 sampai 1948, perusahaan ini berpusat di Jawa.

Total surplus keuntungan yang didapat perusahaan pelayaran *VNS* dari tujuh anak perusahaannya adalah senilai f 630 milyar atau senilai 706\$ milyar USD dari tahun 1920 – 1939.

5. *Nederlandsche Handel Mij (NHM)*

Perusahaan Dagang Belanda (bahasa Belanda: *De N.V. Nederlandsche Handel-Maatschappij* atau *NHM*; bahasa Inggris: *Netherlands Trading Society*) adalah perusahaan dagang Belanda didirikan atas prakarsa Raja Willem I Belanda untuk mempromosikan dan mengembangkan perdagangan, pengiriman dan pertanian. Selama 140 tahun berikutnya, *NHM* bertahan di Batavia serta meluaskan

ruang operasionalnya ke wilayah Nusantara lainnya maupun di luar negeri, dan mampu bertahan sampai terjadinya nasionalisasi perusahaan Belanda pada tahun 1960-an. Di samping itu, perusahaan ini juga membantu pemerintah Hindia Belanda melakukan pengiriman uang ke Tiongkok, Australia, dan India. Pada tahun 1830 di Nusantara diberlakukan sistem tanam paksa (Cultuurstelsel) yang dipelopori oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Dengan berlakunya sistem tanam paksa maka NHM juga mempunyai fungsi ganda, yakni selain melakukan pengiriman barang, akan tetapi juga melakukan pembelian rempah-rempah dari pemerintah Hindia Belanda. Ternyata harapan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya melalui tanam paksa membuahkan hasil. Pemerintah Hindia Belanda banyak meraup keuntungan dari eksploitasi tenaga kerja pribumi. Namun keuntungan yang selama 40 tahun dinikmati berangsur-angsur menuai kemunduran. Hal tersebut disebabkan pada tahun 1870 sistem tanam paksa dicabut. Pada tahun 1882, *Factorij* NHM Batavia melakukan usaha penuh sebagai bank modern dengan menerima dana pihak ketiga dalam bentuk deposito, rekening koran dan produk jasa lainnya. Surplus keuntungan yang dimiliki NHM per tahun adalah f 91 milyar dari tahun 1824 sampai tahun 1941 NHM berhenti beroperasi, hingga terjadi nasionalisasi tahun 1960. Total keuntungan yang didapat sampai tahun 1941 adalah senilai f 150 milyar atau 168 \$ milyar USD (*Handboek voor cultuur- en handelsoedememingen in Nederlandsch- Indie 1886-1940*, Amsterdam, 1888-1941).

6. Dordtsche Petroleum Mij (DPM)

DPM berdiri pada tahun 22 Juli 1887 yang didirikan oleh Adrian Stoop. Merupakan perusahaan Perancis yang bergerak dalam bidang pertambangan minyak, batubara, dan gas. Allen D.H (1957 : 34) dalam bukunya “Western Enterprise in Indonesia and Malaysia (Routledge) ” menjelaskan bahwa DPM perusahaan yang melakukan pertambangannya di Sumatera Selatan dekat Palembang tahun 1882. DPM merupakan partner utama dari Royal Dutch Shell dengan kekayaan senilai f 66 milyar tahun 1897. Sampai tahun 1939, DPM menghasilkan total 4148 ton minyak

(Robert James Forbes, “Studies in Early Petroleum History Vol. 1, 1958 : 64). Total surplus keuntungan yang didapat dari tahun 1887 - 1941 adalah sebesar 3,7 \$ trilyun USD.

Selama melakukan eksploitasi pertambangan, Belanda memulai investasinya senilai 500,000 gulden (f 500,000). Berdasarkan data diatas, total surplus keuntungan kolonial Belanda setelah dijumlahkan dari 6 perusahaan besar Belanda dalam bidang pertambangan adalah senilai f 8,56 trilyun atau sekitar 4,7 \$ trilyun USD dari tahun 1870 – 1941.

5.2.2 Surplus Keuntungan di Bidang Pertanian

Pada awal 1860-an, pemerintah Belanda yang liberal mulai menghentikan pengembangan sistem Budidaya, menghapus monopoli pemerintah dari komoditi rempah-rempah, nila, teh, tembakau, dan *cochineal* (monopoli rempah-rempah telah diberlakukan sejak awal abad ketujuh belas). Di tahun 1870 Undang - Undang Gula mengatur pemerintah untuk melakukan penarikan penanaman gula yang telah lebih dari 12 tahun, agar tidak terjadi monopoli, dimulai pada tahun 1878. Hukum Agraria juga disahkan pada tahun 1870, memungkinkan orang asing untuk menyewa tanah dari pemerintah selama tujuh puluh lima tahun, membuka Jawa sebagai permulaan era perdagangan bebas. Di tahun 1870, pemerintah memanagerisasi perekonomian Jawa melalui ekspansi luar biasa (Carey, 1979 : 94 – 95).

Kultur pemerintahan membuka diri terhadap perdagangan bebas dan metode ekspansi terbaru untuk meningkatkan pendapatan, terutama dalam perdagangan gula. Tahun 1870 merupakan katalis dari spesifikasi pemerintah terhadap pendapatan dari komoditi yang paling menguntungkan dan dapat dijual kepada semua kalangan. Komoditi perjudian dan candu memang tetap dijual sejak 1810, namun pasarnya memasuki pasar bebas dan tertentu, perlindungan terbaru pemerintah karena tingginya kematian di Jawa akibat candu. Akhir penerapan sistem Kultivasi tahun 1860 merupakan periode awal modernisasi dan komunikasi yang terjalin lama sejak imperialisme kuno, ditandai dengan pembangunan jaringan kereta api sebagai di

sepanjang kota Semarang tahun 1865, sebagai usaha peningkatan transportasi negara. Jawa, tidak hanya sebagai pusat pengembangan sistem *laissez-faire* tetapi membuka bentuk perdagangan dunia.

Di tahun 1870, pemerintah telah memperluas jaringan eksploitasi melalui provinsi – provinsi di luar Jawa. Pertambangan dan pertanian adalah dua bidang terpenting yang menunjang perekonomian Belanda. setelah keuntungan bidang pertambangan ditemukan dalam angka triliyunan dollar, maka keuntungan bidang pertanian semakin diuntungkan dengan adanya kemajuan teknologi terutama dengan berkembangnya pabrik – pabrik gula di Jawa dan Sumatera. Menurut analisis Knight (1999 : 202) dalam “Sugar, Technology, and Colonial Encounters: Refashioning the Industry in the Netherlands Indies, 1800–1942”, gula adalah komoditi unik yang didatangkan dari perbatasan Eropa dan Mediterania, gula merupakan tanaman industri kolonial. Antara gula dan kolonialisme adalah hal yang kompleks, dimana proses insustrialisasi gula dikuasi oleh teknologi Eropa.

Adapun perusahaan – perusahaan Belanda yang bekerjasama dengan swasta dan menghasilkan surplus keuntungan. Berikut adalah data – data yang diambil dari tahun – tahun tertentu untuk menjelaskan secara detail dengan sumber yang terbatas, sebagai berikut :

1. Nederlandsch – Indische Escompto Mij

Nederlandsch – Indische Escompto Mij didirikan pada tahun 1857 di Batavia, oleh Paulus Tiedeman jr. Dan Carel Wiggers van Kerchem. *Escompto-Maatschappij* merupakan perusahaan terbesar di Hindia Belanda setelah *Nederlandsche Handel-Maatschappij* dan *Nederlandsch-Indische Handelsbank*. *Escompto* kredit terbesar di Hindia Belanda yang cabangnya tersebar di Jawa dan luar Jawa. Di awal tahun 1880, sistem keuangan masyarakat yang diatur oleh pemerintah Belanda memiliki sistem perkreditan yang dipegang oleh bank milik negara seperti De Javanische Bank. Meski telah disediakan fasilitas kredit resmi bagi penduduk pribumi, namun tidak semua penduduk memanfaatkannya dengan baik. Petani pribumi yang berada pada

level bawah tidak tersentuh lembaga perbankan. Bank rakyat tetap tidak dapat menjangkau masyarakat desa. Petani lebih suka menggunakan pedagang perantara, melalui orang – orang ‘Cina Minding’, orang tionghoa yang berprofesi sebagai peminjam kredit. Sehingga pada tahun 1900, berkembangnya *Escompto* membantu masyarakat memperoleh uang dalam waktu yang singkat dan administrasi yang mudah. Menurut Rasyid (2007 : 173 – 175) dalam bukunya “Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah : Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia”, pada tahun 1918, bank ini telah memperoleh keuntungan dalam bidang penukaran uang (money exchange) senilai f 174.000. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan memberikan kredit bagi nasabah yang melakukan perdagangan hasil bumi dalam bentuk pembiayaan ekspor. Tahun 1939, keuntungan *Escompto* mencapai f 50 miliar gulden atau senilai 12,5 \$ milyar USD dengan 10 cabang yang tersebar di Jawa dan Sulawesi.

2. Hollandsch-Amerikaansche Plantage Mij

Naamlooze Vennootschap Hollandsch Amerikaansche Plantage Maatschappij, atau NV HAPM, adalah perusahaan Amerika yang bekerjasama dengan Belanda. Perusahaan ini bergerak di bidang industrialisasi kelapa sawit. Didirikan pada 8 Juli 1911 dengan pusatnya di Amsterdam dan pusat operasional di Tanjung Barat, Sumatera. Hiroyoshi Kano (2008 : 189 - 192) dalam bukunya “Indonesian Exports, Peasant Agriculture and The World Economy, 1850-2000 in Southeast Asian State” yang diterbitkan *National University of Singapore*, menyebutkan bahwa NV HAPM memiliki 24 anak perusahaan yang tersebar di Sumatera dan Jawa terdiri dari anak perusahaan yang bergerak di bidang industri gula, kopi, dan tembakau, dengan nama perusahaan sebagai berikut :

Tabel 5.2.2.1 Daftar anak perusahaan NV HAPM

No	Anak Perusahaan	Lokasi
1	Goerah Batu	Sumatera Timur
2	Pamanoekan-en Tjiasem-landen	Jawa Barat
3	Goenoeng Pamela	Sumatera Timur
4	Wingfoot ca.	Sumatera Timur
5	Bergepang	Sumatera Timur
6	Dolok Merangis	Sumatera Timur
7	Rambong Sialang	Sumatera Timur
8	Dolok Oeloe	Sumatera Timur
9	Batag Serangan	Sumatera Timur
10	Bandar Negri	Sumatera Timur
11	Serangdjaja	Sumatera Timur
12	Soengei Silau	Sumatera Timur
13	Soengei Dadap	Sumatera Timur
14	Toerangie	Sumatera Timur
15	Simo	Jawa Tengah
16	Ramboetan	Sumatera Timur
17	Bandar Poelau	Sumatera Timur
18	Marijke	Sumatera Timur
19	Adolina Oeloe	Sumatera Timur
20	Danau Salak	Kalimantan Timur
21	Goerah Batoe	Asahan, Sumatera Timur
22	Kwala Piasa	Asahan, Sumatera Timur
23	Soengei Baleh	Asahan, Sumatera Timur
24	Damoeli	Kwaloe, Sumatera Timur
25	Landoet	Kwaloe, Sumatera Timur

Sumber : Hiroyoshi Kano (2008)

Keuntungan yang dicapai perusahaan *Naamlooze Vennootschap Hollandsch Amerikaansche Plantage Maatschappij* sampai pada tahun 1937 adalah senilai f 44

miliar, yang kemudian tahun 1972 diakuisisi oleh Amerika dan tahun 1992 adalah milik perusahaan Bakrie Indonesia.

3. Centrale Suiker Mij (CSM)

Centrale Suiker Maatschappij n.v. didirikan pada tahun 1919 untuk produksi gula dari bit gula. Perusahaan tersebut merupakan penggabungan antara *NV Wester Suikerraffinaderij*, *NV "Hollandia"*, dan *CV Van Loon & Co*, sebuah perusahaan yang berkembang melalui akuisisi utama adalah Unilever pada tahun 2000, senilai € 670 juta. Perusahaan ini menjadi satu-satunya produsen gula yang tersisa di Belanda. CSM sampai tahun 2019 memiliki anak perusahaan sebanyak 50 cabang yang tersebar di seluruh dunia, dengan pengembangan bioteknologi makanan. Aoyagi dan William (1985 : 16) dalam "History of Tempeh : The Soyfood of Indonesia" menyebutkan bahwa tempe, makanan khas Indonesia juga diolah oleh CSM setelah akhir penjajahan Jepang. Di tahun 1942, CSM menghasilkan sekitar CSM kemudian menghasilkan sekitar 380.000 ton gula per tahun. Brandes Knight (2009 : 212) dalam "A House of Honey: White Sugar, Brown Sugar, and the Taste for Modernity in Colonial and Postcolonial Indonesia" menyebutkan harga per kuintal gula tahun 1930-1942 adalah sekitar 48 guilder. Total surplus keuntungan yang diperoleh *Centrale Suiker Maatschappij n.v.* dari tahun 1919 sampai 1942 adalah senilai f 42,5 miliar gulden atau 21,2 \$ miliar USD.

4. Cultuur – Mij 'De Ooskust' atau Deli Maatschappij

Deli Mij didirikan tahun 1869 dan berganti nama menjadi *Cultuur – Mij 'De Ooskust'*. 50% saham *Deli Maatschappij* dibagi untuk *Nederlandsche Handel-Maatschappij*, perusahaan pengganti VOC di tahun 1830. Pada abad ke-19, *Deli Maatschappij* mengeksploitasi lahan seluas 120.000 hektar. Aktivitas perusahaan tersebut berdampak pada makin berkembangnya Medan. Pada perkembangannya, Deli Mij mengembangkan dua komoditi ekspor utama yakni beras, dan tembakau. Namun harga komoditi tembakau terus mengalami penurunan sejak tahun 1930

akibat boikot yang dilakukan musuh Deli Mij di Amsterdam. Data terakhir yang diperoleh, jumlah perkebunan Deli menurun dari 169 perkebunan tahun 1911 menjadi 45 perkebunan tahun 1941. Berdasarkan data dalam laporan Siandip Hazareesingh and Harro Matt (2015) dalam “Local Subversions of Colonial Cultures : Commodities and Anti – Commodities in Global History”, jumlah produksi beras tahun 1910 sampai 1942 adalah sekitar 30 miliar ton. Keuntungan *Deli Mij* sepanjang tahun 1870 sampai 1942 adalah berkisar f 60 miliar gulden.

5. Handels Vereeniging Amsterdam (HVA)

HVA (gambar terlampir pada lampiran D) adalah kumpulan dari para investor swasta di masa ekonomi liberal, atau disebut *planters*. Akta pendirian perusahaan dibuat dihadapan Notaris J. G. Pouw Jr di Amsterdam pada tanggal 23 Desember 1878 dengan saham sebanyak 2.500 lembar dan modal ditempatkan sebesar NLG (Gulden) 1.250.000, berlaku efektif mulai 1 Januari 1879. Pada saat pertama kali berdiri, perusahaan mempunyai 144 orang pesaham. Di Jawa HVA mengelola 4 komoditas dengan 23 unit produksi ; dengan uraian sebagai berikut : 16 unit Pabrik Gula, 3 Kebun Tapioka dan Serat, 3 Kebun Karet, 1 Kebun Kopi. Di Sumatera HVA mengelola 4 komoditas dengan 16 unit produksi ; dengan uraian sebagai berikut : 4 unit Komoditi Serat (Dolok Iilir, Laras, Bah Djambi, Bandar Betsy), 5 unit Kebun Kelapa Sawit (Tindjowan, Dolok Sinumbah, Pagar Djawa, Tonduhan, Boeloe Blang Ara), 3 unit Kebun Teh (Balimbingan, Sidamanik, Kajoe Aro), 4 unit Kebun Karet (Bangoen, Gohor Lama, Aloer Djamboe, Poelae Tiga). Total keuntungan yang didapat HVA selama tahun 1880 sampai 1939 adalah senilai f 30 miliar gulden, atau 15 \$ miliar USD.

6. Vereenigde Klattensche Cultuur – Mij

Vereenigde Klattensche Cultuur – Mij adalah perusahaan privat milik keluarga yang memberikan sekitar 50% pajak kepada pemerintah Belanda. Alexander Claver (2014 : 120) dalam Dutch Commerce and Chinese Merchants in Java Colonial

Relationships in Trade and Finance, 1800–1942”, terbitan KITLV, *Vereenigde Klattensche Cultuur – Mij* didirikan oleh keluarga Dorrepaal yang berpusat di Hague, Belanda sejak tahun 1887. Mulai 1 Januari 1889 perdagangan *Mirandolle Voûte & Co* anak dari keluarga Dorrepaal, Grace Dorrepaal (gambar terlampir pada lampiran D) adalah perwakilan resmi *Klattensche Cultuur Maatschappij*, berbisnis di Semarang. Keuntungan yang didapat di bidang pengolahan tembakau adalah berkisar f 6 juta gulden per tahun dari tahun 1889, sampai tahun 1941, penghasilan *Vereenigde Klattensche Cultuur – Mij* adalah sekitar f 306 juta gulden.

7. Nederlandsch – Indische Suiker Unie

Nederlandsch – Indische Suiker Unie adalah Asosiasi Belanda-India untuk Pemasaran Gula (Nivas atau NIVAS. Tugas Nivas untuk mempromosikan kepentingan anggotanya sehubungan dengan penjualan gula dan memberikan informasi tentang penanaman gula. Keanggotaan wajib untuk semua produsen gula yang berpusat di Hague, Belanda. Pada tahun 1932, Asosiasi Belanda-India untuk Pemasaran Gula didirikan untuk meningkatkan produksi global dan konsumsi gula dan untuk merangsang pasar bebas untuk gula. Kantor pusat operasi berada di Surabaya. Keuntungan yang didapat NIVAS selama 10 tahun berdiri saampai 1942 adalah berkisar f 28 miliar gulden atau 14 \$ miliar USD.

Selama melakukan eksploitasi pertanian, Belanda memulai investasinya senilai 500,000 gulden (f 500,000). Berdasarkan data diatas, total surplus keuntungan kolonial Belanda setelah dijumlahkan dari 7 perusahaan besar Belanda di bidang pertanian adalah senilai f 255 miliar gulden atau sekitar 127,5 \$ miliar USD dari tahun 1870 – 1941.

Jika dijumlahkan selama periode ekonomi liberal dari tahun 1870 sampai awal penjajahan Jepang tahun 1941, total surplus keuntungan dari bidang pertambangan dan pertanian adalah senilai f 25, 5 Triliyun Gulden atau senilai 1,27 \$ Triliyun USD, yang diterima pemerintah Belanda dari Indonesia.

BAB 7. PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Penelitian ini mengindikasikan pertumbuhan ekonomi Belanda yang mencapai “surplus” dari awal kedatangannya untuk mendirikan sebuah perusahaan besar. Satu perusahaan Belanda di masa pemerintahan ekonomi liberal, memiliki anak cabang dengan jumlah 10 – 50 perusahaan yang tersebar di hampir seluruh dunia. Bahan baku dan tenaga kerja (buruh) yang dibutuhkan adalah orang – orang pribumi yang ada di Indonesia. Keuntungan yang terbentuk dari masa transisi sistem kultivasi hingga sistem ekonomi liberal menghasilkan dampak yang luar biasa bagi perekonomian Eropa. Namun di sisi lain, kepentingan pribumi seakan diabaikan.

Drainase Finansial yang menjadi isu kekinian karena protes keras dari bangsa eks – kolonial, pada kenyatannya mendorong Indonesia menjadi negara berkembang di masa depan. Sebenarnya Belanda tidak akan ada tanpa Indonesia. Perdebatan keras mengenai kebijakan Belanda tentang Ethical Policies terjadi dikalangan sejarawan. Kebijakan ini justru dibuat Belanda untuk mengambil aham pribumi secara masif sejak pendirian Pabrik Gula di awal 1920 dan Perusahaan – perusahaan Pertambangan.

Sekiranya pembentukan VOC dan WIC hanya menjadi narasi pembuka dari pembentukan negara kolonial. Maka, keuntungan yang dihasilkan dari perusahaan – perusahaan milik Belanda bekerjasama dengan para pemodal asing seperti: Perancis, Inggris, Amerika, Jepang, dan Cina, bernilai f 45 triliyun gulden atau 20,5 \$ triliyun USD selama tahun 1878 – 1941 terutama di bidang Pertambangan dan Pertanian. Sekiranya itu hanya keuntungan yang terdapat didalam arsip – arsip Belanda, dan laporan penelitian sejarawan, untuk keuntungan yang privat dan memang tidak dicatat menjadi persoalan tersendiri yang dapat dikaji pada penelitian selanjutnya.

7.2 Saran

Berdasarkan penelitian diatas, yang menjadi fokus kajian adalah pemahaman terhadap sejarah Indonesia masa kolonial. pengaruh dari adanya kolonialisme terhadap pembentukan keuntungan untuk membangun perekonomian Eropa. Sehingga terdapat beberapa saran bagi pihak – pihak terkait, sebagai berikut :

1. bagi mahasiswa, untuk lebih memberikan perhatian lebih kepada ilmu – ilmu humaniora terutama menyangkut Sejarah Bangsa yang inferior, agar generasi bangsa dapat mengambil kebijaksanaan dengan mempelajari sejarah dari berbagai perspektif.
2. bagi almamater, hendaknya menambah literatur mengenai kajian kolonial tentang keuntungan kolonial di Indonesia.
3. bagi pembaca, agar penelitian ini mendapat kelanjutan yang lebih dalam dan wawasan yang lebih luas, serta kritik dan saran mengenai Surplus Keuntungan Kolonial Belanda di Indonesia Tahun 1878 - 1941

DAFTAR PUSTAKA

- Alexanderson, K. 2019. *Subversive Seas : Anti Colonial Networks Across The Twentieth Century Dutch Empire*. UK : Cambridge University Press.
- Allen D.H. 1957. *Western Enterprise in Indonesia and Malaysia*. UK : Roulledge
- Altes, K. W. 1987. *Changing Economy in Indonesia*, Vol. 7: Balance of Payments 1822–1939, Amsterdam: Royal Tropical Institute
- Aoyagi, William. 1985. *History of Tempeh : The Soyfood of Indonesia*. The Soyfood Center : Japan.
- Ardant. 1975. *The Formation of National States in Western Europe*. USA : Princeton University Press.
- Baal, V. J. 1867. *Ontglipt Verleden : Verhaal Van Mijn Jaren Een Wereld Die Voorbijging*. Dutch : CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK DEN HAAG.
- Bataviasche Koloniaal Courant*, 14 December 1810. KILTV press.
- Baud, J.C. 1853. *Proeve van eene geschiedenis van den Handel en het verbruik van opiumin Nederlandsch Indië, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indië* , No. 1, pp. 1–220.
- Baudet, H. 1983. *Nederland en de rang van Denemarken, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden* (1975), 430-44. See also: H. Baudet and M. Fennema *el al.*, *Het Nedcrlands belong bij Indie*. Utrecht : Antwerpen.
- Bayeley, M. 1861. *How to Manage a Colony, Vol I*. London : Hurst and Blackett Pub.
- Beknopte Encyclopedie Van Nederland – Indie*. 1921. Netherland : KITLV.
- Berg, N. P. 1907. *Munt – Crediet – En Bankwezen, Handel En Scheepvaart in Nederlandsch Statistische Bijdragen*. De Javanische Bank Archieved.

- Berger, P. 1966. *The Social Construction of Reality*. UK : Penguin Books.
- Berger, P. 1975. *The Social Construction of Reality*. USA : Boston University.
- Blusse, L. 1988. *Strange Company . 105 Settlers, Mestizo Women and The Dutch in VOC in Batavia*. Dordrecht Foris Pub : KITLV.
- Boeke, J. H. 1917. *De Indische Woekerwet*. Batavia : Koloniale Studien.
- Boeke, J. H. 1953. *Economics and Economic Policy of Dual Societies as Exemplified by Indonesia*. USA : Arms Press Inc.
- Booth, A. 1989. *A Modern Economic History of Southeast Asia*. England : Macmillan.
- Booth, A. 2009. *Globalisation and Poverty : Indonesia in Twentieth Century*. Jakarta : LPEM.
- Bosch, J. V.D. 1829. *Advies Van Den Luitenant-Generaal Van Den Bosch Over Het Stelsel Van Kolonisatie*, in D.C. Steijn Parve, *Het koloniaal monopoliestelsel getoetst aan geschiedenis en staathuishoudkunde*. Zaltbommel: Joh. Noman en Zoon (published in 1851).
- Bosma, U. 2007. *The Cultivation System (1830 – 1870) and Its Private Entrepreneurs on Colonial Java*. Singapore : Cambridge University Press.
- Bosma, U. 2014. *The Economic Hitoriography of The Dutch Colonial Empire*. *Journal Tijdschrift Voor Sociale En Economische Geschiedenis*, Vol. 11, No.2, 2014, 153 – 166. Netherlands : Leiden University.
- Carey, P. 1977. *Kuasa Ramalan Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785 1855*. Jakarta : KPG.
- Carey, P. 1984. “Changing Javanese Perception of the Chinese Communities in Central Java, 1755-1825”, *Indonesia*, No. 37 (April) : 20 -35.

- Carey, P. 2011. *Revolutionary Europe and The Destruction of Java's old Oder 1808 – 1830*. UPI : Historia Press.
- Claver, A. 2004. *Dutch Commerce and Chinese Merchants in Java : Colonial Relationships in Trade and Finance, 1800 – 1942*. KITLV : Leiden University.
- Daendels, H. W. 1814. *Staat der Nederlandsche Oostindische Bezittingen, Onder Het Bestuur Van Den Gouverneur Generaal Herman Willem Daendels, Ridder, Luitenant-Generaal, In De Jaren 1808 – 1811, Deel 3, Bijlagen II (Finanti, le Zaken) ('s Gravenhage)*.
- Dick, H. 1993. *A Fresh Approach to Southeast Asian History*, in John Butcher and Howard Dick (ed.), *The Rise and Fall of Revenue Farming: Business Elites and the Emergence of the Modern State in Southeast Asia*. New York: St. Martin.
- Dick. 1904. *The Policy and Administration of the Dutch in Java*. London: MacMillan.
- Diehl, F.W. 1993. *Revenue farming in the Netherlands East Indies 1816-1925*, in John Butcher and Howard Dick (eds.), *The Rise and Fall of Revenue Farming: Business Elite and the Emergence of Modern State in Southeast Asia*. New York: St. Martin Pres.
- Eeng, P. 2002. *Indonesia's Growth Experience in The 20th Century : Evidence, Queries, Guesses*. *Journal Explorations in Economic History*, 29, 3, pp. 1 - 27. Australia : The Australian National University.
- Eeng, V.D. 2010. *Economic Benefits from Colonial Assets : The Case of The Netherlands and Indonesia 1870 – 1958*. Australia : Australia National University Press.
- Elson, R.E. 1994. *Village Java under the Cultivation System*. Sydney: Allen & Unwin.

- Encyclopaedie van Nederlandsch-Indie*. 1917. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Eng, P. van der. 1992. *The Real Domestic Product of Indonesia, 1880–1987*. Journal Explorations in Economic History, 29, 3, pp. 360–76. Australia : The Australian National University.
- England Banktrack*. 2014. UK : Oxford University Press.
- Fasseur, C. 1979. *Een koloniale paradox. De Nederlandse expansie in de Indonesische archipel in het midden van de negentiende eeuw (1830-1870)*, *Tijdschrift voor Geschiedenis*. Netherland : KITLV.
- Forbes, R.J. 1958. *Studies in Early Petroleum Histoy Vol. 1*, 1958 : 64. Netherland : Leiden University.
- Furnivall, J. S. 1944. *Netherlands India: A Study of Plural Economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Furnivall, J.S. 1939. *Netherlands India: A Study Of Plural Economy*. UK : Cambridge University Press.
- Geerts. 1981. *Agama Jawa : Abangan, Santri, dan Priyayi dalam Kebudayaan Jawa*. Jakarta : Buku Kita.
- Geertz, C. 1966. *Religion of Java*. USA : Chicago Press.
- Gerderen, V. 1961. *Duit Woordenboek*. Netherland : Groningen Press.
- Geuns, V. 1911. *Het Rietbranden Vraagstuk in Pekalongan*. Netherland : KITLV.
- Giddens, A. 1999. *Runaway World : How Globalization is Reshaping Our Lives*. New York : NYC Press.
- Gordon, A. 2012. *How Big was Indonesia's Colonial Surplus in 1939 – 1941*. Journal of Contemporary Asia Vol. 42, No. 4, November 2012, pp. 560–580. Routledge. UK : Taylor & Francais Group.
- Gottschalk. 1985. *Mengerti Sejarah*. Jakarta : UI press.

Gutem, V. 1919. *Tjina Mindering, eenige aantekeningen over het Chineesche gelchierter swezen op Java*. Batavia : Koloniale Studien.

Handboek voor cultuur- en handelondernemingen in Nederlands-Indië. Amsterdam: De Bussy, 1888-1940.

Hazareesingh, Matt. 2015. *Local Subversions of Colonial Cultures : Commodities and Anti – Commodities in Global History*. Britania Raya : Palgrave Macmillan.

Hempel, C. 1966. *The Philosophy of Natural Science*. New Jersey : Princenton University.

Hobswan, E. 1975. *The Age of Capital*. London : Weiden & Nicolson.

Hughenoltz, W. R. 1994. “The Land Rent Question and Its Solution, 1850-1920”, in Robert Cribb (ed.), *The Late Colonial State in Indonesia: Political and economic foundation of the Netherlands Indies, 1880-1942*. Leiden: KITLV.

Kano, H. 2008. *Indonesian Exports, Peasant Agriculture and The World Economy, 1850-2000 in Southeast Asian State*. Singapore : National University of Singapore.

Kinight, J. 2009. *A House of Honey: White Sugar, Brown Sugar, and the Taste for Modernity in Colonial and Postcolonial Indonesia*. UK : Routledge Press

Knight. 1996. *The Idea of Colonialism Studies*. Australia University.

Knight. 1999. *Sugar, Technology, and Colonial Encounters: Refashioning the Industry in the Netherlands Indies, 1800–1942*. UK : Routledge Press.

Knight. 2017. *Methodology of Educational Research*. pp. 243. UK : Apleton Century Crofts Inc.

Kuitenbrouwer, M. 1985. *Nederland en de opkomst van het moderne imperialisme; Kolonien en Buitenlandse Politick*. Dieren : Amsterdam.

- Leur, V. 1955. *Indonesian Trade and Society*. W. Netherland : Van Hoeve Publishers.
- Linbald, J. 1989. *The Petroleum Industry in Indonesia Before The Second World War*. Netherland : Leiden University.
- Linbald, T. 1989. *Economic Aspects of the Dutch Expansion in Indonesia 1870–1914*. Modern Asian Studies, Volume 2, Issue 01 / February 1989, pp 1 – 24. UK : Great Britain Press.
- Linbald, T. J. 1989. *Economic Aspects of Dutch Expansion in Indonesia 1870 – 1914*. Modern Asia Studies. Issue 01. Journal Cambridge. 23 : 1- 24.
- Lodewijk. 1807. *Asian Possesion*.
- Luiten, J. V. 2002. *Colonial State Formation and Patterns of Economic Development in Java 1800 – 1913*. Netherland : Leiden University.
- Maddison, A. 1990. *The colonial burden: A comparative perspective*. In M. Scott & D. Lal (Eds.), *Public policy and economic development: Essays in honour of Ian Little* (pp. 351-375). Oxford : Oxford University Press.
- Merkerk, E.V.N. 2017. *Entangled Historis : Unravelling The Impact Colonial Connections of Both Javanese and Dutch Women's Work and Household Labour Relations, c. 1830 – 1940*. Netherland : Amsterdam University Press.
- Mijer, P. 1848. *Verzameling van instructiën, ordonnanciën en reglementen voor de regering van Nederlandsch Indië vastgesteld in de jaren 1609, 1617, 1632, 1650, 1807, 1815, 1818, 1827, 1830 en 1836, met de ontwerpen der staats-commissie van 1803 en historische aantekeningen*. Batavia: Lands Drukkerij.
- Nagtegaal, L. 1996. *Riding The Dutch Tiger : The Dutch East Indies Company and Northeast Coast of Java 1680 – 1743*. Leiden : KITLV.

- Niel, V. 1990. *Java's Northeast Coast*. (346, 347, 394). Leidelmeijer, Van suikermolen tot grootbedrijf, pp. 8-22; Roger Knight, 'The contractor as suikelord and entrepreneur. Otto Carel Holmberg de Beckfeit (1794-1857)', in J. Thomas Lindblad and Willem van der Molen, eds., *Macht en majesteit. Opstellen voor Cees Fasseur bij zijn afscheid als hoog*
- Polak, J. J. 1943. *The National Income of The Netherlands Indies, 1921 – 1939 ; Changing Economy in Indonesia* Vol. 5 : National Income. pp.25 – 102.
- Polanyi. 2001. *The Great Transformation : The Political and Economic Origins of Our Time*. Boston : Beacon Press.
- Purwanto, B. 2001. *Historisisme Baru dan Kesadaran Dekonstruktif : Kajian Kritis terhadap Histori Indonesia Sentris*. Humaniora : UGM Press.
- Purwanto, B. 2016. *Gagalnya Indonesia Sentris*. Yogyakarta : Ombak.
- Raffles, T.S. 1817. *History of Java*. UK : UK Press.
- Rasyid. 2007. *Kopra Makassar Perebutan Pusat dan Daerah : Kajian Sejarah Ekonomi Politik Regional di Indonesia*. Jakarta : Yayasan Obor.
- Ricardo, D. 1817. *The Principle of Political Economy and Taxation*. Canada : Batoche Books Kitchener 2001.
- Rouffaer, G. P. 1931. *Adatrech Bundel*. Netherland : KITLV press.
- Salmon, Claudine. 1991. *The Han Family of East Java : Enterpreneurship and Politics (18th-19th Century)*, Archipel, 41.
- Schrieke, B.J.O. 1951. *Indonesian Sociological Studies*. Netherland : The Hague.
- Scott, J. 1981. *Ekonomi Petani : Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta : LP3ES.

- Smith, A. 1776. *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Britain : Thommas Pub.
- Souza and George Bryan. 2009. *Opium and Company : Maritime Trade and Imperial Finances on Java, 1684- 1796*, *Modern Asian Studies*, 43, 1, pp. 129-145.
- Stevens, Th. 1982. *Van der Capellen's koloniale ambitie op Java*. Amsterdam: Historisch Seminarium.
- Sutherland, H. 1979. *The Making of Bureaucratic Elite*. Singapore : Heinemann Education Book ltd.
- Tijn, T. H. 1971. *Een nabeschouwing', Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden* 86. Nederland
- Times. 2019. *The Chronical of VOC Empire*. USA : Times Press.
- Torrens, R. 1815. *The Cornslaw*. London : Longman press.
- Trocki, Carl A. 1999. *Opium, Empire, and the Global Political Economy: A Study of the Asian Opium Trade, 1750-1950*. London: Routledge.
- Verdoorn, P.J. 1960. *The Intra-Block Trade of Benelux*. In *Robinson, E.A.G., Ed., Economic Consequences of the Size of Nations*. London : Macmillan & Co.
- Vickers, A. 2013. *A History of Modern Indonesia (Second Edition)*. UK : Cambridge University Press.
- Vitalis, L. 1851. *Over de pachten in het algemeen, de onzedelijkheid van sommige, en de verdrukking waaraan de overmatige misbruiken van andere de Javaansche bevolking blootstellen*, *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*, 13de jaargang, pp. 364-87.
- Waal, E. de. 1865. *Aantekeningen over Koloniale Onderwerpen, Vol. III & IV*. 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff. Zanden, J. L. Van & Marks,D. 2012. *An Economic History of Indonesia, 1800-2010*. London: Routledge.

- Wahid, A. 2017. *Dualisme Pajak di Jawa : Administrasi Pajak Tanah di Wilayah Vorstenlanden pada Masa Kolonial, 1915 – 1942*. UGM : Jurnal UGM.
- Wesseling, H. L. 1979. *Dutch Historiography On European Expansion Since 1945'*, in H. L. Wesseling and P. C. Emmer (eds), *Reappraisals in Overseas History; Essays on Post-war Historiography about European Expansion*. Netherland : Leiden University.
- Wesseling, H.L. *Bestond er een Nederlands imperialisme?. Tijdschrift voor Geschiedenis 100 (1986), 214-25. See also his contribution, 'British and Dutch imperialism', to the Fourth Cambridge-Delhi-Yogyakarta-Leiden Meeting on the Comparative Study of India and Indonesia*. UK : Cambridge University Press.
- Wolters, W. 2006. *Managing Multiple Currencies With Units of Account : Netherlands India 1600 – 1800*. The Netherland : Radbound University Press.

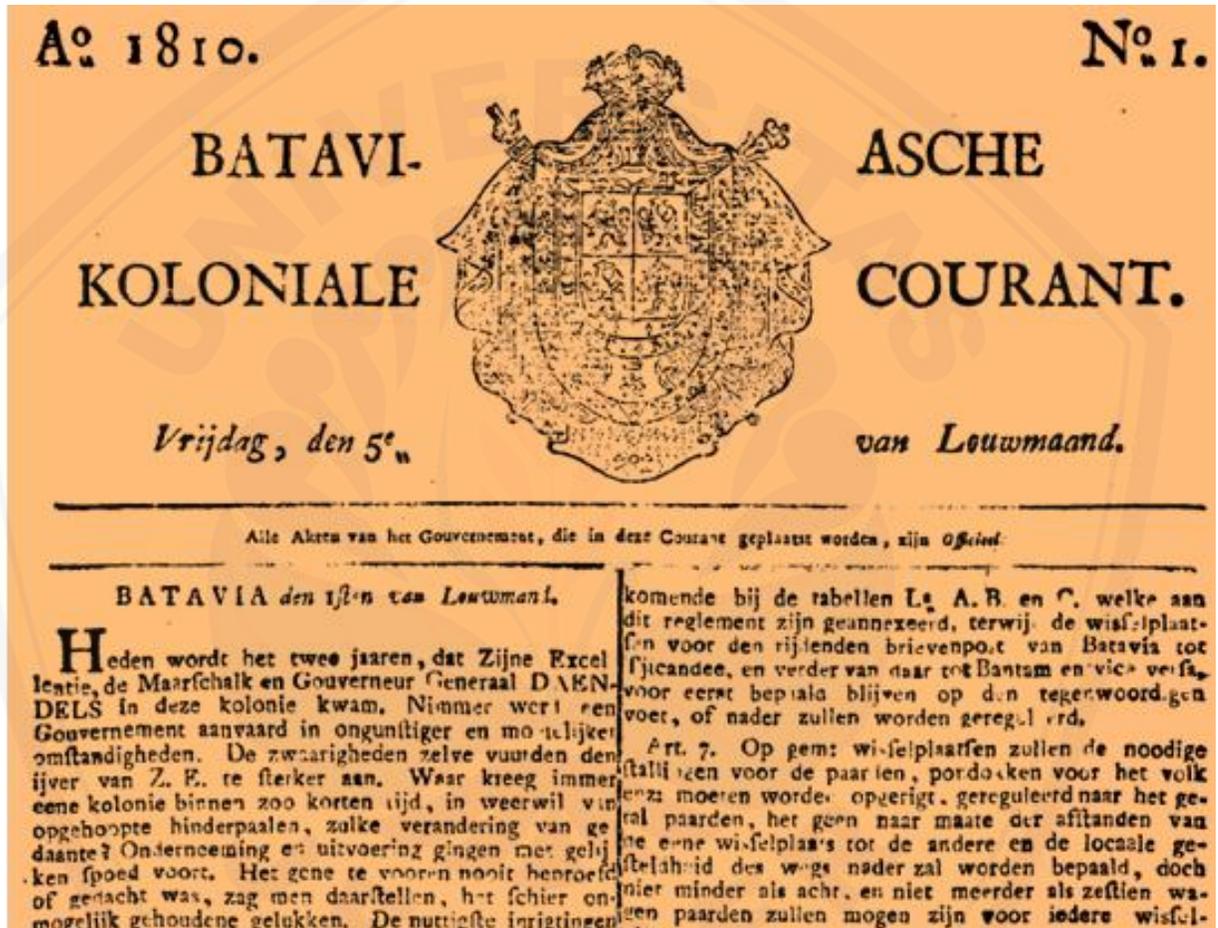
LAMPIRAN A.

Matriks Penelitian

Tema / Judul	Rumusan Masalah	Argumentasi Kontemporer	Pendekatan Penelitian	Teori / Kerangka Berpikir	Metode Penelitian
Surplus Keuntungan Kolonial Belanda di Indonesia Tahun 1870 - 1941	<ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor – faktor apakah yang menyebabkan pemerintah kolonial memperoleh “surplus”? 2. Seberapa besar keuntungan yang diperoleh Belanda selama menjajah Indonesia dalam kurun waktu 1878 – 1942? 3. Bagaimana pengaruh pembentukan surplus keuntungan kolonial terhadap kondisi masyarakat Indonesia? 	<p>Proses terbentuknya perusahaan privat swasta yang menandai politik ekonomi liberal 1870 dibentuk pada tahun 1878. Keuntungan yang didapat di tahun tersebut mendapat dukungan penuh dari Partai Liberal Eropa, pengaruhnya adalah <i>capital flight</i> (modal yang dibawa) dari Indonesia ke Eropa. Tahun 1941 karena Belanda menyerahkan modal dan buruh tanah jajahan kepada Jepang. Surplus keuntungan mengalami stagnansi di tahun 1941.</p>	Sejarah Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> • Teori Perdagangan Internasional David Ricardo 	Penelitian Sejarah

LAMPIRAN B.

Koran Kolonial



Gambar 1. Bataviasche Koloniaal Courant, 14 Desember 1810

Sumber : Diperoleh dari KITLV, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019

Hon^d Sir
 Wednesday Jan^y 14th 1807.
 Canton in my own rooms at
 the English factory, given me
 this morning.

Perhaps I may have time only to write you
 a few lines, but I have just been informed by
 J^r George Stanton that an American ship leaves
 Canton tomorrow, & the letters it takes may reach
 England before the fleet, I came by, be returned.
 If my friends saw an account in the papers of
 our arrival here, & yet no letter from me, they
 might be uneasy; don't I judge you truly? Yet
 it might have happened & no fault of mine.

I arrived here at Canton last night (at one o'clock
 or rather two o'clock this morning) with the
 Pursuer of the Thames, which ship we left the
 preceding evening, 6 o'clock, down out at sea. So
 eager were we to be up here. ||| Just as I had
 written the little note below, in came J^r G.
 Stanton in a hurry, telling me a man had
 fallen off a horse & broken his arm, & begging
 my medical assistance - for the surgeon resident
 here was gone out of Canton. Down I hurry,
 & find the poor Chinese servant pale & fainting,
 sitting on a flight of stairs & the blood trickling
 upon the sleeve of his right arm, which he
 cannot move. I tremble in my inside as I order
 his sleeve to be cut open, fearing to find some

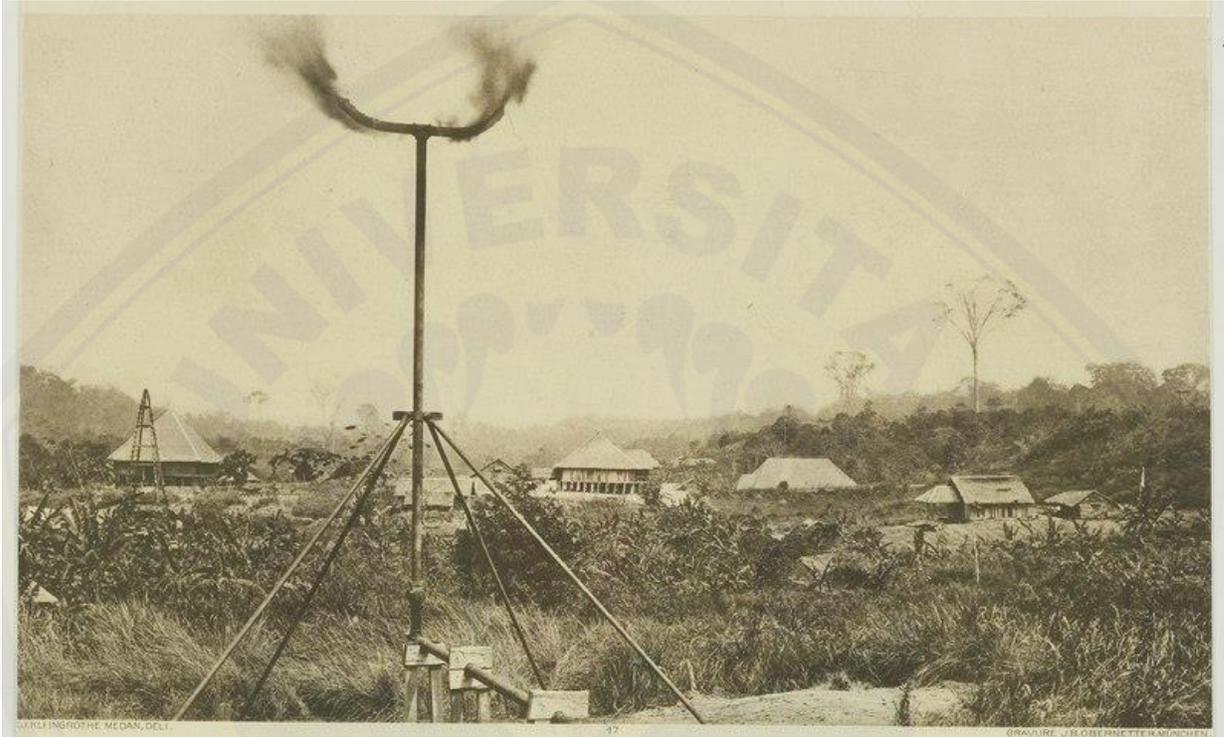
* not out of sight of land, but off Lintin, near
 Macao.

Gambar 2. Asian Possesion, 9 Februari 1807

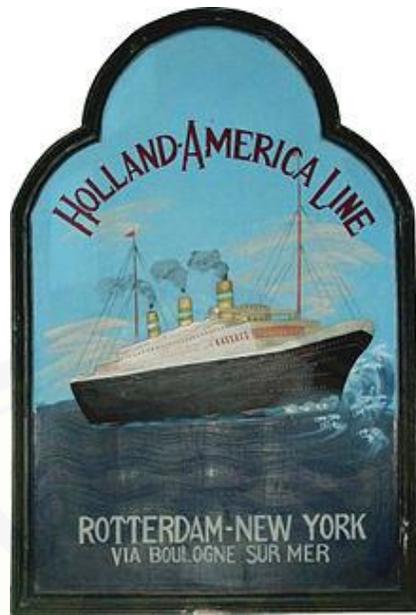
Sumber : Diperoleh dari perpustakaan pusat UGM tanggal 2 Agustus 2019

LAMPIRAN C.

Perusahaan – Perusahaan Belanda



**Gambar 1. Royal Dutch Shell yang beroperasi Tarakan, Kalimantan
Diperoleh dari KITLV, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019**



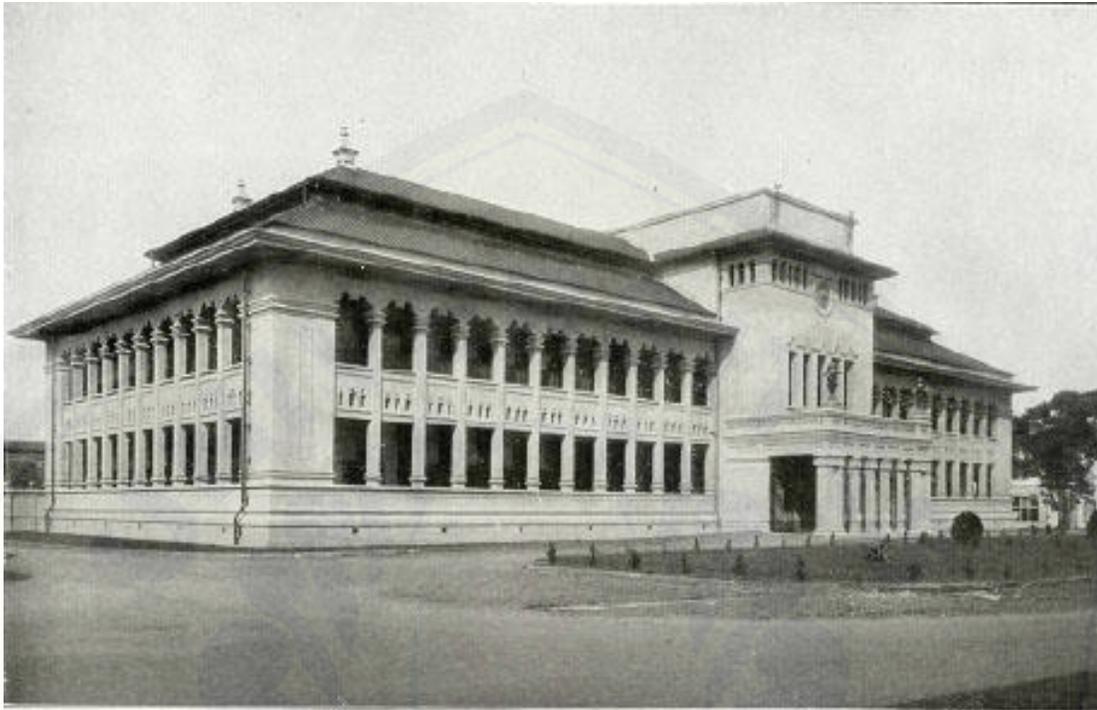
Gambar 2. Standart Oil Amerika

Diperoleh dari KITLV, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019



Gambar 3. Bataafsche Petroleum Mij

Diperoleh dari KITLV, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019



KANTOORGEBOUW SOERABAJA

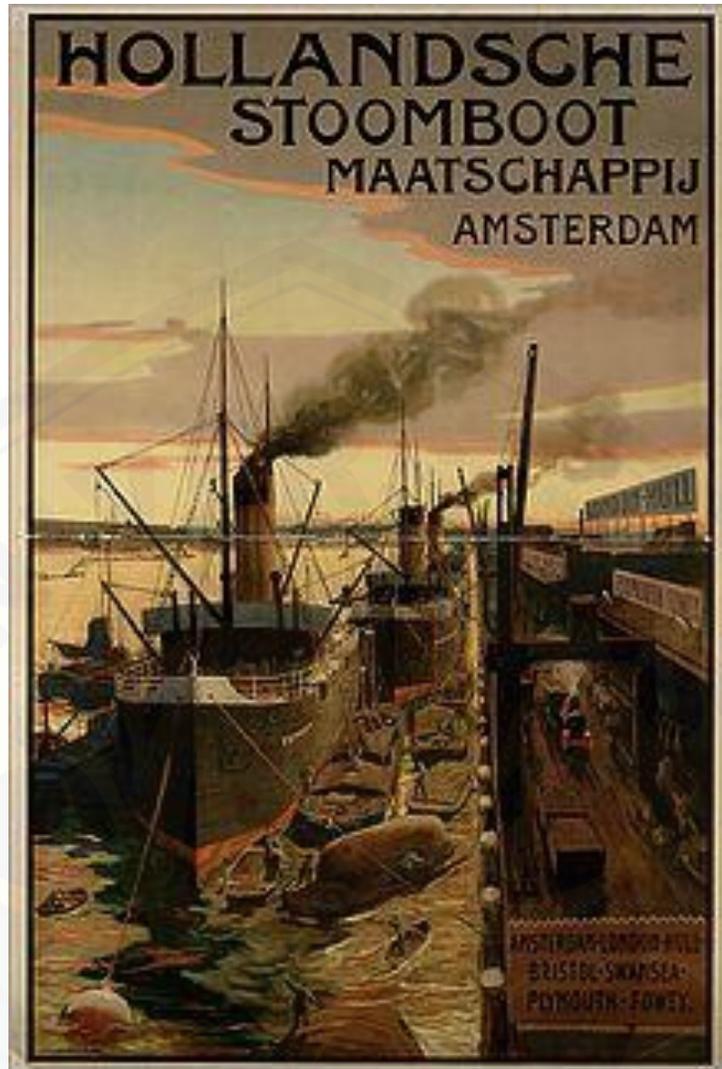
Gambar 4. VNS

Diperoleh dari KITLV, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019



Gambar 5. Royal Java-China-Paketaart Lines NV

Diperoleh dari KITLV, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019



Gambar 6. Koninklijke Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij
Diperoleh dari KITLV, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019

LAMPIRAN D

Pemilik Perusahaan



**Gambar 1. Pemilik Perusahaan Bidang Pertanian
Diperoleh dari KITLV, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019**



Gambar 2. Hellen Grace Dorrepaal
Diperoleh dari KITLV, diakses pada tanggal 2 Agustus 2019